

# LAPORAN PENDAHULUAN

## *PENYUSUNAN ROADMAP SIDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA*



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara**



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Brawijaya Malang**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan daya saing daerah, sebagaimana telah diterapkan di negara-negara maju, adalah memperkuat Sistem Inovasi secara terpadu antara pusat dan daerah. Tujuan umum dibentuknya sistem inovasi adalah untuk membangkitkan kreativitas dan inovasi sumber daya lokal, agar produk-produk daerah dapat bersaing dengan daerah bahkan negara lain. Tanpa adanya inovasi, apalagi dalam dunia modern yang terus bergerak (*runaway world*) ini, dapat dipastikan daerah akan mengalami kemunduran dalam segala aspeknya. Mengingat, persaingan global yang semakin ketat dengan siklus yang makin pendek akibat kemajuan teknologi dan informasi, menjadikan perebutan pangsa pasar yang makin ketat. Oleh karena itu, inovasi daerah yang terintegrasi dengan inovasi nasional menjadi prasyarat mutlak menuju daya saing daerah yang berkemajuan dan berkelanjutan.

Dalam kacamata ekonomi politik, tuntutan kemunculan sistem inovasi karena didorong oleh perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berpengaruh terhadap sistem pemerintahan. Perubahan ini juga mengakibatkan pergeseran ekonomi yang awalnya berbasis industri menjadi ekonomi yang berbasis pengetahuan. Fakta empirik menunjukkan bahwa kepemilikan sumber daya alam yang besar tidak menjamin terciptanya kemakmuran, tetapi optimalisasi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terbukti mampu membawa kemajuan suatu negara. SDM yang cerdas dan berkompeten memiliki keunggulan untuk mengelola perubahan teknologi dalam rangka menghadapi

perubahan pasar dan masyarakat, menjadi lebih dinamis, saling berjejaring dengan persaingan yang ketat. Kemampuan dan ketersediaan SDM akan menentukan posisi tenaga kerja dengan upah yang tinggi, keahlian yang mumpuni dan proses pembelajaran yang terus menerus. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk memformulasi kebijakan yang mengedepankan peningkatan kualitas SDM, penguatan jejaring SDM sehingga mampu memaksimalkan modal SDM melalui inovasi.

Berangkat dari refleksi tersebut, pemerintah memandang perlu untuk menciptakan sistem inovasi, guna menjamin kesiapan sistem untuk menghadapi perkembangan teknologi dan masyarakatnya. Rumusan dari Sistem Inovasi Nasional (SIN), telah menjadi agenda nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Impelementasi atas Undang-Undang sebgaimana dimaksud, terjabarkan dalam Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Substansi Peraturan Bersama Kementrian tersebut adalah mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yaitu dengan membuat *Road Map* SIDa, penataan secara kelembagaan dan pengembangan kualitas SDM, serta pengembangan SIDa berbasis potensi lokal. Dengan adanya sistem inovasi yang terintegrasi, diharakan terhadap sistem koordinasi dan pelaporan terkait inovasi daerah yang harmonis dari daerah sampai pusat.

*Road Map* SIDA adalah desain kebijakan yang akan menjadi panduan dalam menjabarkan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang berbasiskan inovasi. Desain tentu akan mengintegrasikan jejaring institusi, baik institusi pemerintahan sektoral atau lintas sektoral, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia bisnis dan masyarakat. Dalam konteks sinkronisasi kebijakan, maka dalam desain *Road Map* SIDA Provinsi Kalimantan Utara yang akan dibuat harus disusun secara rinci sebagai petunjuk arah bagi inovasi yang mendukung program-program RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 dan Nawa Cita yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019 dan beragam peraturan terkait.

Sebagai sebuah pemerintahan provinsi baru, Kalimantan Utara potensial menjadi *role model* pusat inovasi bagi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara yang meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan serta provinsi-provinsi sekitarnya. Sebagaimana diketahui, Provinsi Kalimantan Utara masih belum optimal dalam kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembangunan. Jika disederhanakan, maka ada dua persoalan penting yang harus segera direspon; 1) Banyak sekali hasil-hasil penelitian dari lembaga-lembaga riset dan perguruan tinggi yang tidak terdokumentasi dalam data Database pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Akibatnya banyak sekali penelitian-penelitian yang bermanfaat bagi daerah belum bisa digunakan secara optimal. 2) Sinergi dan koordinasi antara lembaga riset dan lembaga pendidikan belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah rute pembangunan yang berbasis teknologi agar produk hasil penelitian bisa lebih bermanfaat.

## 1.2.Landasan Hukum

Ketentuan hukum yang melandasi penyusunan *Road Map* SIDA Provinsi Kalimantan Utara ini adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 31 Ayat (5) Undang-undang Dasar 1945;
- b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

- f) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
- g) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- h) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- j) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1); dan
- k) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2).

### **1.3.Tujuan dan Manfaat**

Dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Roadmap SIDA, maka maksud dan tujuan disusunnya dokumen Roadmap Provinsi Kalimantan Utara adalah:

1. Merumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan inovasi daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Mendayagunakan segenap potensi pembangunannya secara efisien guna menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas secara berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Menciptakan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan percepatan pembangunan berdasarkan asas keberlanjutan yang berwawasan lingkungan;
4. Menjadi salah satu dasar pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan daya saing daerah;
5. Menjadi acuan kegiatan-kegiatan kolaboratif di Provinsi Kalimantan Utarayang melibatkan berbagai pihak dengan peran dan fungsi masing-masing; dan
6. Menjadi salah satu masukan dalam penyusunan dan/atau perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara maupun dokumen perencanaan lainnya.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### 2.1. Konsep Sistem Inovasi

Secara konseptual "sistem inovasi" dipahami sebagai sebuah konsep yang serupa tapi tak sama. OECD dan Freeman misalnya, lebih menekankan kepada kerja sama antara lembaga pemerintah dan swasta dalam konvergensi teknologi dalam proses pelayanan publik (lihat OECD, 1999; Freeman, 1987). Sedangkan yang lain hanya menekankan tentang bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan saling berinteraksi dengan menekankan pada konvergensi teknologi dalam proses pemerintahan (Lundvall, 1992; Nelson dan Rosenberg, 1993 ; Metcalfe, 1995). Secara umum definisi konseptual dari inovasi sebenarnya dicirikan 2 hal penting' 1) adanya jejaring tenraksi (*networks interactions*) antara beberapa komponen yang memiliki agenda kegiatan sama, 2) dalam jejaring interaksi tersebut ada sebuah proses inovasi (*inovations*) dan pembelajaran (*learning*) yang terus menerus (Edquist, 1996).

Merujuk pada Edquist (1997), maka karakteristik dari sistem inovasi adalah mekanisme pembelajaran yang terus menerus, sehingga ada proses adaptasi SDM terhadap kemajuan teknologi dan pengetahuan. Sebagai sebuah sistem, inovasi yang berkembang saling berhubungan antara satu sistem dengan sistem yang lain, namun tidak dalam konteks penyeragaman (interdependensi dan non-linieritas). Ini artinya sistem inovasi adalah proses yang terjadi terus menerus dan merupakan hasil sebuah proses sejarah dari komponen-komponen yang terhubung. Sistem inovasi ini juga bersifat menyeluruh (*holistik*) yang digerakkan oleh beragam disiplin keilmuan yang berbeda (interdisiplin). Perubahan Teknologi

berpengaruh terhadap reproduksi pengetahuan birokrasi dan lahirnya budaya birokrasi yang lebih baik adalah contoh dari interdisipliner. Sehingga nanti, setiap daerah akan memiliki keunikan dalam membangun sistem inovasinya.

Maka, jika inovasi dilakukan akan muncul beberapa indikator perubahan. Menurut Solow (1956), inovasi akan melahirkan peningkatan kapital dan jumlah, kualitas maupun produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan temuan dan hasil inovasi (Nadiri, 1993; Griliches, 1990) akan meningkat. Hal ini karena perubahan teknologi akan merangsang masyarakat untuk memaksimalkan pertumbuhan produktifitasnya, misalnya dengan inovasi teknologi, laba dan substitusi teknologi. Sehingga perilaku kompetitif akan semakin meningkat akibat meningkatnya motif berinovasi (Romer, 1990; Kirzner, 1973). Maka dengan semakin berkembangnya Iptek, akan muncul usaha-usaha baru dan pemain-pemain baru yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Dalam konteks desain *Road Map* SIDA Provinsi Kalimantan Utara ini, ada beberapa prinsip yang menjadi dasar acuan, diantaranya:

a) Tujuan yang jelas dan capaian yang rasional

Road Map SIDA yang dibuat harus memiliki program yang jelas dan tidak abstrak, *Oen Mid* pada ide kreatif serta indikator capaian yang rasional. Konteks kejelasan akan menyesuaikan dengan data-data pendukung Sistem Informasi seperti infrastruktur dan SDM. Begitu juga capaian yang rasional dengan mempertimbangan konteks Provinsi Kalimantan Utara.

b) Strategis dan konsisten

Sistem informasi yang strategis adalah harus mengacu pada desain-desain pembangunan yang lain seperti RPJPD, RPJMD, RENSTRA OPD, yang mana tujuannya adalah menjaga konsistensi dalam kerangka ruang dan waktu. *Road Map* SIDA yang dibuat harus menjadi agenda prioritas daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan strategi pembangunan daerah.

c) Fokus Potensi Daerah

Potensi potensi terbaik daerah harus menjadi dasar inovasi dan pengembangan ide-ide kreatif bagi kemajuan daerah. Potensi daerah yang dioptimalkan akan membawa pada daya saing yang kuat bagi daerah.

d) Beroorientasi Daya Saing

Kebijakan strategis yang dibuat harus didasarkan pada kesadaran untuk peningkatan daya saing daerah. Kemampuan daerah dalam mengimbangi perubahan masyarakat dan pasar akan menentukan keberhasilan dalam persaingan bebas.

e) Integrasi Multi aktor

Mewadahi tim ahli dari beragam institusi, seperti lembaga penelitian atau lembaga pendidikan untuk terlibat dalam inovasi pembangunan daerah. Jejaring aktor inovasi inilah yang nantinya akan menjadi motor penggerak inovasi.

f) Berbasis Penelitian dan Pengembangan

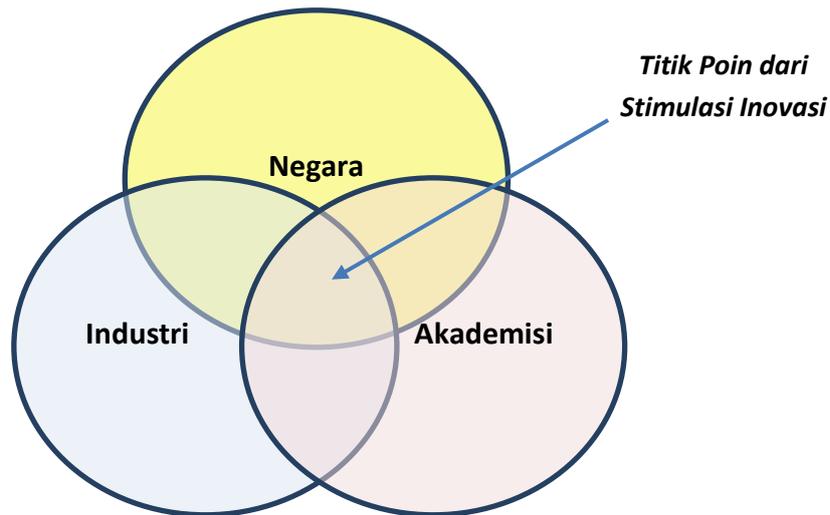
Kedepannya setiap kebijakan pemerintah yang dibuat harus didasarkan pada diseminasi hasil penelitian dan pengembangan (R&D). Prinsip ini menjadi sangat penting karena jika ada kesalahan kebijakan maka bisa di klarifikasi, dievaluasi dan direvisi.

## 2.2. Jejaring Inovasi

Jejaring inovasi dalam konteks ini adalah untuk melakukan jejaring pemerintahan (*networks governance*) dalam konteks sistem inovasi daerah. Dalam logika pemikiran jejaring beban untuk mengembangkan teknologi tidak serta merta hanya menjadi beban pemerintah, namun juga *sake holder* lain seperti kelompok usaha dan kelompok pendidikan. Dalam dunia industri swasta sangat memiliki potensi yang angan besar dalam proses peningkatan inovasi. Begitu juga dengan lembaga penelitian dan lembaga pendidikan, yang memiliki tugas utama untuk mengembangkan inovasi dan ide-ide kreatif.

Secara konseptual ini sering dikenal dengan pendekatan *Triple Helix model* yang ingin membangun jejaring pemerintahan yang melibatkan industri, akademisi dan pemerintah. Akademisi melalui lembaga pendidikan dan lembaga penelitian, memiliki peran utama dalam membangun inovasi-inovasi berbasis penelitian dan pengembangan. Bukan hanya sekedar itu, perguruan tinggi bisa juga mengambil peran pin-off (pembentukan *net-start Company*) yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Begitu juga dengan dengan perusahaan, tugas utamanya adalah membangun industri yang mendorong lahirnya inovasi. Semakin cepat teknologi mempengaruhi pasar, maka industri juga akan semakin

mendorong proses-proses penelitian dan pengembangan yang sebenarnya adalah tugas konvensional akademisi. Pada level inilah pemerintah mendapat kemudahan terjebak pada "*The valley of The death*", karena kurangnya kompetensi dengan melakukan jejaring dengan industri dan akademisi. Perhatikan gambar berikut:



**Gambar 2.1.**  
**Model Triple Helix dalam Implementasi SIDA**

Pada tahap inilah kemudian model transformasi kebijakan iptek akan dicapai. Pengetahuan akan mempengaruhi perekonomian (*knowledge-based economy*), sehingga pengambil keputusan juga harus memaksa diri melakukan cara pikir sistemik dan kalkulatif. Begitu juga pasar dan kemajuan yang tercipta tidak lagi pasif, menunggu model linier (*supply push & market/demand pull*) menjadi didorong oleh inovasi. Semakin kuat jejaring ini akan memperluas jejaring organisasi yang terlibat dalam inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan

### 2.3. Daya Saing Daerah

Daya saing adalah kemampuan daerah dalam mengatasi dinamika persaingan yang lahir karena perkembangan teknologi, perubahan pasar atau perubahan pelaku pasar global. Daya saing harus selalu ditingkatkan sebagai stamina daerah yang memberikan jaminan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan pembaharuan sumber daya unggul yang berkelanjutan. Daya saing dalam konsep lama (*factor driven stage*) dimaknai sebagai kekayaan sumberdaya alam dan tenaga kerja yang murah. Pada perkembangan selanjutnya adalah investasi (*investment drive stage*), yang daya saingnya ditentukan efisiensi dalam produk dan layanan standar. Pada puncaknya daya saing adalah inovasi (*innovation drive stage*), dimana daya saing ditentukan oleh hasil inovasi dalam produk dan jasa. Secara singkat perhatikan ilustrasi dibawah ini.



**Gambar 2.2.**  
**Ilustrasi tingkatan Daya Saing**

## 2.4. Analisis Sistem Inovasi daerah

Analisis Sistem Inovasi Daerah dalam konsep ini akan mengacu pada pendekatan ANIS (*Analysis of National Innovation Systems*), dengan melakukan kontekstualisasi variabel dan indikatornya pada level daerah. Pendekatan ANIS berdasar bahwa sistem inovasi dipengaruhi oleh 30 faktor penting, dimana masing-masing faktor dikelompokkan ke dalam 3 level, yaitu:

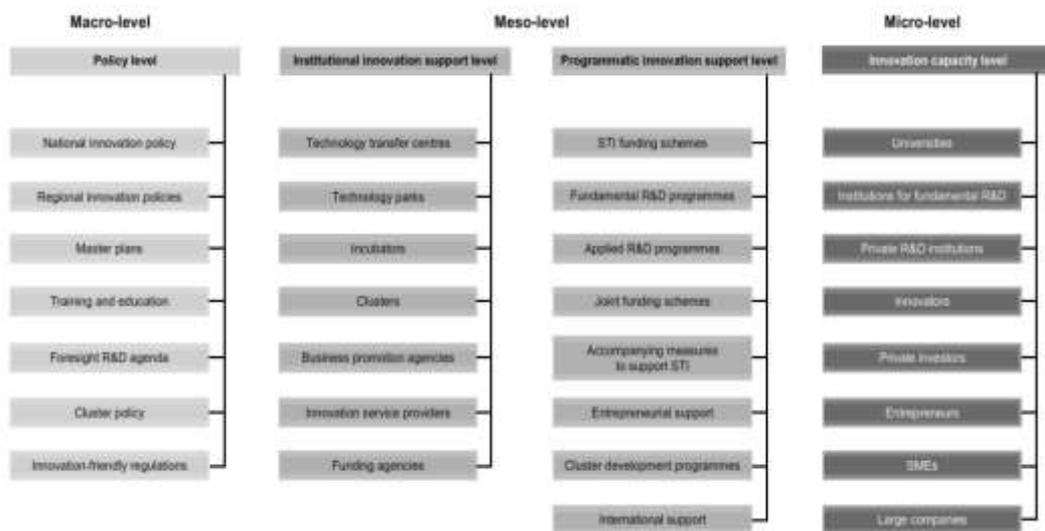
- a) Level Makro : Tingkat Inovasi kebijakan.

Dalam level makro inovasi dipengaruhi oleh kondisi kerangka kerja dimana sistem hadir, seperti hukum, aturan dan regulasi yang sangat menentukan arah kebijakan, baik dalam konteks positif atau negatif. Investasi publik terhadap inovasi sangat tergantung pada tingkat kebijakan itu dibuat. Misalnya saja keputusan politik mungkin hanya mempengaruhi formalitas kerangka kerja inovasi namun tidak terintegrasi di dalam praktiknya.

- b) Level Meso : Tingkat dukungan lembaga inovasi dan program Inovasi Bekerjanya lembaga dalam level mes biasanya dicirikan transfer teknologi yang terpusat, kluster, jasa provider inovasi dan lembaga donor. Dalam tingkat ini sangat mungkin kemudian kebijakan politis dilaksanakan dalam tataran riil. Dalam pengembangan dan kemunculan melibatkan publik, khususnya pada daerah yang tidak menarik investor. dukungan inovasi termasuk dana publik sehingga kebijakan inovasi bisa di realisasikan.

c) Level Mikro : Tingkat Kapasitas Inovasi

Pada tingkat ini adalah besarnya dukungan dari aktor-aktor lain dalam sistem inovasi; sebagai contoh perusahaan (Skala besar, Menengah dan UMKM), pengusaha, Universitas, lembaga penelitian dan pengembangan (R&D) swasta atau publik, lembaga keuangan lainnya.



Sumber : IIT 2012

**Gambar 2.3**  
**Ukuran dalam penilaian Analisis Sistem Daerah**

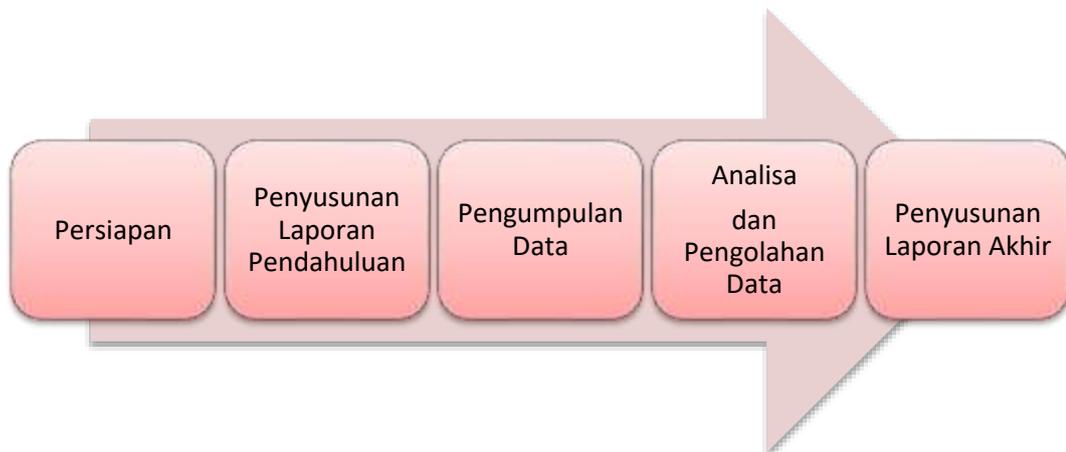
## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Mengacu pada KerangkaAcuan Kerja (KAK)Kegiatan Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kalimantan Utara, maka penjabaran metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 3.1.Tahapan Penelitian

Kegiatanpenelitian yang dilakukan sebagai bagian dari penyusunan *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kalimantan Utarasecara umum tergambar dalam alur penelitian berikut:



**Gambar 3.1**  
**Alur Penelitian**  
**Penyusunan Roadmap SIDa Provinsi Kalimantan Utara**

Kelima tahapan/alur penelitian tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Tahapan Persiapan

Tahapan ini dilakukan dengan mempersiapkan rencana kegiatan tim peneliti meliputi koordinasi dan konsolidasi antara tim tenaga ahli, surveyor dan tenaga administrasi yang terlibat dalam pelaksanaan

pekerjaan penyusunan *Roadmap* SIDA Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa hal lain yang dilakukan pada tahap persiapan adalah pencarian data-data sekunder yang akan mendukung proses penelitian.

## 2. Tahapan Penyusunan Laporan Pendahuluan

Penyusunan laporan pendahuluan merupakan kegiatan mengkompilasikan data-data sekunder dan primer yang diikat dalam kajian teoritis. Agar diperoleh gambaran permasalahan secara holistik, maka pada akhir penyusunan dapat dilakukan pendesiminasian dalam bentuk seminar laporan pendahuluan.

## 3. Pengumpulan Data

Pada tahap ini adalah proses pencarian atau penggalian data-data sekunder dan primer yang menjadi bahan analisa.

## 4. Analisis dan Pengolahan Data

Proses analisis adalah tahapan mengolah data-data yang diperoleh untuk disusun menjadi sebuah argumentasi yang menjelaskan realitas objek atau subjek yang dikaji. Dalam melakukan pengolahan dan analisa data, tetap perlu memperhatikan validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi.

## 5. Penyusunan Laporan Akhir

Penyusunan laporan akhir adalah penulisan hasil dari keseluruhan kegiatan penelitian yang berisi analisa lengkap, *roadmap* dan semua yang ditargetkan dalam tujuan penelitian.

### 3.2. Variabel dan Indikator

Meskipun kajian ini lebih mengutamakan data kualitatif, tetapi dalam proses analisa akan diukur dalam kerangka acuan variabel dan indikator yang sudah ditentukan oleh BPPT. Untuk jenis variabel dan indikator penelitian, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Variabel dan Indikator penelitian**

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
1	Kebijakan dan Regulasi	Regulasi HAKI Regulasi Persaingan Usaha
2	Infrastruktur Inovasi	Tingkat penggunaan TIK Kondisi Insfrastruktur TIK Jangkauan infrastruktur TIK
3	Kapasitas Lembaga Iptek	Jumlah anggaran iptek SDM lembaga iptek Rasio kecukupan jumlah SDM Daya serap teknologi Kerja sama teknologi
4	Budaya Inovasi	Tingkat pertumbuhan enterpreneur Apresiasi kreativitas teknologi Tingkat kepedulian pengetahuan
5	Perkembangan Klaster	Tingkat perkembangan klaster Tingkat kebijakan klaster

### **3.3. Teknik Pengumpulan data**

Metode analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yang diperkuat dengan analisis data kuantitatif. Artinya dalam kajian ini metode yang dipakai akan menggunakan pendekatan triangulasi, yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif, dimana data yang dihasilkan bersifat deskriptif dengan analisis data yang dilakukan secara induktif. Data-data kuantitatif digunakan untuk membaca kondisi saat ini (*existing condition*) sedangkan data kualitatif untuk menemukan makna daripada generasiliasi (Sugiyono, 2008).

#### **3.3.1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang perolehannya dilakukan secara langsung dari narasumber/responden ataupun berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran atas peubah-peubah yang dimiliki oleh suatu objek.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui mekanisme wawancara (*in-depth interview*) dengan narasumber baik dalam rangka penetapan komoditi unggulan maupun menjangkau informasi mengenai kendala/permasalahan, faktor penghambat dan pendukung serta kebijakan pemerintah dalam pengembangan komoditas terpilih. Sebagai alat bantu untuk mengarahkan dan memudahkan dalam memperoleh informasi digunakan panduan wawancara, daftar pertanyaan dan panduan diskusi.

Data-data penting yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan *Roadmap* SiDa Kalimantan Utara meliputi:

No	Teknik	Kebutuhan Data
1	Observasi objek	Observasi berbasis pada acuan 5 variabel; 1) Kebijakan dan Regulasi, 2) Infrastruktur Inovasi, 3) Kapasitas Lembaga Iptek, 4) Budaya Inovasi, dan 5) Perkembangan Kluster
2	Wawancara	Data wawancara terkait 5 variabel, kepada masing-masing representasi lembaga terkait

### 3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah diolah dan didapatkan tidak secara langsung, berupa studi literatur dan referensi lain dari berbagai tulisan, pedoman, acuan, aturan, serta kebijakan yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam proses perencanaan dan perancangan.

Mengacu pada Panduan Penyusunan Roadmap Penguatan SIDA, maka kerangka kajian Penyusunanakan dilakukan mengikuti bagan berikut :



Sumber: Panduan Penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah, BPPT, 2013





## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM WILAYAH**

#### **4.1. Aspek Geografis**

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia saat ini yang berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas lima wilayah administrasi dengan empat kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Ibukota Provinsi Kalimantan Utara terletak di Tanjung Selor, yang saat ini berada di Kabupaten Bulungan.

Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki luas  $\pm 75.467,70$  km<sup>2</sup>, terletak pada posisi antara 114035'22" – 118003'00" Bujur Timur dan antara 1021'36" - 4024'55" Lintang Utara. Selain itu, berdasarkan batas kewenangan provinsi, Provinsi Kalimantan Utara diketahui memiliki luas lautan seluas 11.579 Km<sup>2</sup> (13% dari luas wilayah total). Secara administratif Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan negara Malaysia tepatnya dengan negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia. Batas daerah daratan terdapat sekitar 1.038 km garis perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Negara Malaysia.

Sebelah Utara	:	Negara Sabah (Malaysia)
Sebelah Timur	:	Laut Sulawesi
Sebelah Selatan	:	Provinsi Kalimantan Timur
Sebelah Barat	:	Provinsi Kalimantan Timur

Posisi geografis Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia membuat provinsi ini berada di lokasi strategis terutama dalam pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa provinsi ini juga berada di jalur pelayaran internasional (*Alur Laut Kepulauan Indonesia/Archipelagic Sealand Passage*) dan merupakan pintu keluar/*outlet* ke Asia Pasifik.

**Tabel 4.1**  
**Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Utara**

Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas Daratan (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
Bulungan	Tanjung Selor	13.925,72	10	81
Malinau	Malinau	42.620,70	15	109
Nunukan	Nunukan	13.841,90	16	240
Tana Tidung	Tideng Pale	4.828,58	5	29
Tarakan	Tarakan	250,80	4	20
<b>Kalimantan Utara</b>		<b>75.467,70</b>	<b>50</b>	<b>479</b>

Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016 - 2021

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, Kabupaten Malinau merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Kalimantan Utara (56 persen), sedangkan daerah dengan luas wilayah terkecil adalah Kota Tarakan (1 persen). Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara selain berupa pegunungan juga merupakan daerah kepulauan. Pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara terletak di Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tana Tidung dan Kota Tarakan. Jumlah pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara adalah 161 pulau dengan luas total mencapai 3.597 m<sup>2</sup>. Sementara, panjang garis pantai provinsi ini adalah 3.955 Km, 908 Km (23 persen) merupakan garis pantai daratan, dan 3.047 Km (77 persen) merupakan garis pantai kepulauan.

Secara topografis, setengah dari luas wilayah provinsi Kalimantan Utara memiliki kelas ketinggian antara 500-1.000 m di atas permukaan laut (38,77%), hanya sekitar 5,92% yang memiliki kelas ketinggian 0-7 m di atas permukaan laut. Perkembangan pembangunan diperkirakan akan mengelompok di wilayah yang memiliki ketinggian relatif lebih landai, sedangkan wilayah pegunungan di Provinsi Kalimantan Utara dapat dijadikan kawasan lindung dan *recharge area* (daerah resapan air). Sebagian besar wilayah Kabupaten Bulungan berada pada ketinggian 100-500 m di atas permukaan laut (31,61 persen). Adapun Kabupaten Malinau dan Nunukan didominasi oleh wilayah yang berada di kelas ketinggian 500-1.000 m di atas permukaan laut, yaitu masing-masing 58,46 persen dan 24,12 persen. Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 7-25 m di atas permukaan laut dan hanya sebagian kecil yang memiliki ketinggian 100-500 m di atas permukaan laut (0,01 persen). Kota Tarakan didominasi oleh kelas ketinggian 7-25 m di atas permukaan laut (72,41 persen), sementara sisanya (27,59 persen) berada pada ketinggian 0-7 m di atas permukaan laut.

Kondisi klimatologi Provinsi Kalimantan Utara hampir sama dengan wilayah lain di Indonesia yaitu beriklim tropis, terlebih letak provinsi ini berada di utara lintang 0°. Suhu udara maksimal terjadi pada bulan November dengan 34,40° C dan minimal terjadi pada bulan Februari yaitu 23,40° C. Kondisi rata-rata kelembapan udara tahun 2014 di provinsi ini mencapai angka 84% serta memiliki tekanan udara rata-rata 1.009,7 Mbs. Untuk keadaan kecepatan angin terdapat dalam range yang tidak terlalu fluktuatif, yaitu 4-5 knot dari tahun 2008-2014. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan 410 mm,

sedangkan paling rendah terjadi pada bulan Agustus dengan 132 mm. Rata-rata penyinaran matahari di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2008-2014 diketahui cukup fluktuatif dengan rata-rata terjadi 51 penyinaran matahari pada tahun 2014.

**Tabel 4.2**  
**Kondisi Klimatologi di Provinsi Kalimantan Utara**

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembapan Udara (%)	Tekanan Udara (Mbs)	Kecepatan Angin (Knot)	Curah Hujan (mm)	Penyinaran Matahari (%)
	Min	Max	Rata-Rata					
Januari	23,50	31,60	27,55	84	1.010,2	3	216	34
Februari	23,40	32,00	27,70	83	1.010,1	4	172	42
Maret	24,00	32,50	28,25	82	1.010,6	4	218	64
April	24,20	33,30	28,75	83	1.009,8	4	159	43
Mei	24,40	33,40	28,90	85	1.009,6	5	181	56
Juni	24,00	33,70	28,85	85	1.008,7	4	211	60
Juli	23,60	33,60	28,60	84	1.009,4	4	263	50
Agustus	24,00	33,20	28,60	84	1.010,2	4	132	63
September	23,70	33,60	28,65	83	1.010,2	4	230	58
Oktober	24,50	33,90	29,20	81	1.009,4	5	149	54
November	24,20	34,40	29,30	85	1.009,4	4	315	47
Desember	24,00	32,10	28,05	86	1.009,3	4	410	43

Sumber: BPS, Kalimantan Utara dalam Angka 2015

Kondisi geomorfologi atau fisiografi Provinsi Kalimantan Utara meliputi daratan dan lautan. Daratan berada di bagian barat, sedangkan lautan berada di bagian timur hingga kawasan perairan Ambalat. Bagian barat yang berupa daratan tercermin sebagai pegunungan hingga perbukitan yang merupakan unit geomorfologi (bentang alam) struktur baik berupa lipatan maupun patahan, sedangkan bagian timur sebagai dataran hingga pantai atau dikenal sebagai bentang alam aluvial, sedangkan bentang alam laut berada di bagian paling timur.

Sungai merupakan bagian penting bagi kehidupan dan aktivitas masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Sungai-sungai yang ada di wilayah ini antara lain adalah Sungai Kayan, Sungai Sesayap, Sungai Pimping, Sungai Bandan, Sungai Sekatak, Sungai Jelarai, Sungai Linuang Kayan, Sungai Betayau, Sungai Sembakung, Sungai mandul, Sungai Semandak, Sungai Mintut, Sungai Manguli. Sungai tersebut merupakan media transportasi air bagi masyarakat.

Selain itu, sungai tersebut juga sebagai sumber mata pencaharian nelayan tradisional di wilayah ini (Profil Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2014).

Sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Sungai Pamusian dengan panjang 20.178 km dan sungai terpendek yaitu Sungai Bebakin yang hanya memiliki panjang 1 Km. Untuk kategori sungai terlebar, Sungai Kayan menjadi yang utama dengan lebarnya yang mencapai 550 km. Sementara Sungai Bebakil menjadi sungai tersempit karena hanya memiliki lebar 2 km. Walaupun bukan sungai yang terpanjang ataupun terlebar di Kalimantan Utara, Sungai Naha Aya memiliki debit maksimum yaitu 1.992,52 m<sup>3</sup>/detik. Sementara itu, Kalimantan Utara hanya memiliki 1 danau yaitu Danau Kelaputan Mangkupadi yang terletak di Kabupaten Bulungan seluas 6 ha. Adapun keberadaan Waduk dan Embung di Kalimantan Utara Pada tahun 2014 sudah mencapai 24 buah waduk dan 10 embung, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya terdapat 9 buah waduk dan 11 embung. Waduk yang terluas dan volume paling besar yaitu Waduk Irigasi Binusan di Kabupaten Nunukan dengan luas 3,6 ha dan volume 3000 m<sup>3</sup>. Sementara itu, Embung Air Baku Bolong di Kabupaten Nunukan menjadi embung terluas dan memiliki volume terbesar yaitu seluas 13,44 ha dengan volume 294.500 m<sup>3</sup>.

Penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh hutan, dengan luasan mencapai 6.440.254 Ha atau sekitar 90,06 persen dari luasan total wilayah. Luasan pertanian tersebar sekitar 1,55 persen atau 110.751 Ha dari total luas wilayah. Penggunaan lahan hutan negara mendominasi di seluruh kabupaten, namun terbanyak terdapat di Kabupaten Malinau. Kondisi geografis provinsi ini yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan

lereng yang curam, sebagian besar dimanfaatkan sebagai hutan lindung. Penggunaan lahan permukiman hanya 19.090 Ha atau 0,27 persen dari total luasan wilayah provinsi ini, dengan sebaran lahan permukiman paling tinggi berada di Kabupaten Nunukan.

**Tabel 4.3**  
**Proporsi Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Utara**

No.	Kabupaten	Jenis Penggunaan Tanah				
		Pemukiman	Hutan	Pertanian	Pertambangan	Lainnya
1	Bulungan	4.925	1.086.969	12.040	-	237.497
2	Malinau	2.687	3.927.395	2.301	1.550	42.808
3	Nunukan	6.609	1.167.764	87.254	-	166.952
4	Tana Tidung	1.867	250.506	3.786	1.415	77.563
5	Tarakan	3.002	7.620	5.370	5.914	47.363
Kalimantan Utara		19.090	6.440.254	110.751	8.879	572.183
Persentase (%)		0,27	90,06	1,55	0,12	8

Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka, 2015

#### 4.2. Aspek Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 sebanyak 641.936 jiwa yang terdiri dari laki-laki 340.811 jiwa dan perempuan 301.125 jiwa. Jika distribusi penduduk dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota, maka Kota Tarakan memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 235.275 jiwa ( persen), sedangkan daerah berpenduduk paling kecil adalah Kabupaten Tana Tidung yaitu sebesar 21.891 jiwa ( persen). Rerata pertumbuhan penduduk Kalimantan Utarasepanjang 2010 - 2015 sebesar 4,1 persen pertahun.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010 - 2015**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bulungan	112.663	117.019	120.600	122.985	126.096	129.381
Malinau	59.555	62.580	66.845	71.501	74.469	77.492
Nunukan	141.927	148.822	155.680	162.711	170.042	177.607
Tana Tidung	15.202	16.356	17.079	18.985	20.400	21.891
Tarakan	194.800	202.600	210.700	218.800	227.200	235.565
Kalimantan Utara	524.147	547.377	570.904	594.982	618.207	641.936

Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka, 2016

Kepadatan penduduk rata-rara Provinsi Kalimantan Utara adalah 9 jiwa/km<sup>2</sup>. Terdapat kesenjangan persebaran penduduk, terutama antar kabupaten dengan kota di Provinsi Kalimantan Utara. Kepadatan penduduk di Kota Tarakan mencapai 906 jiwa/km<sup>2</sup> (tahun 2014), akan tetapi berbeda dengan kabupaten/kota lainnya yang memiliki kepadatan hanya 1-12 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kabupaten Malinau, yakni 2 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 4.5**  
**Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara 2010 -2014**

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk				
		2010	2011	2012	2013	2014
Bulungan	13.181,92	9	9	9	12	12
Malinau	40.088,41	2	2	2	2	2
Nunukan	14.247,5	10	11	11	11	12
Tana Tidung	4.828,58	5	5	4	4	4
Tarakan	250,8	777	808	840	872	906
<b>Kalimantan Utara</b>	<b>72.597,21</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka, 2015

### **4.3. Aspek Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi**

#### **4.3.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Perekonomian wilayah secara makro dapat dilihat melalui nilai produk domestik regional bruto (PDRB). Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang penting dalam analisis perkembangan wilayah. Nilai PDRB dapat menggambarkan sektor yang berkontribusi paling besar dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan PDRB per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah.

Meski termasuk provinsi baru, perekonomian Kalimantan Utara beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif, ditandai dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama tahun 2010-2015. Pada tahun

2010 PDRB atas harga konstan Provinsi Kalimantan Utara mencapai 34,9 triliun dan terus meningkat menjadi 40,7 triliun di tahun 2012 dan mencapai 49,2 triliun pada tahun 2015.

**Tabel 4.6**  
**Nilai dan Kontribusi Sektoral dalam PDRB 2010-2015**  
**Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Kalimantan Utara**

No	Sektor	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		(Rp)	%										
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.235.362,30	17,86	6.676.558,60	17,65	7.129.998,50	17,49	7.496.932,40	17,00	8.018.853,30	16,81	8.572.042,70	17,43
2	Pertambangan dan Pengalihan	10.589.650,40	30,33	11.444.992,80	30,25	12.432.417,90	30,50	14.004.971,20	31,76	15.402.476,00	32,29	14.992.687,50	30,48
3	Industri Pengolahan	3.572.234,30	10,23	3.764.732,20	9,95	3.967.913,30	9,73	4.224.983,90	9,58	4.442.962,30	9,32	4.696.203,40	9,55
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18.117,50	0,05	19.081,00	0,05	20.131,60	0,05	20.838,20	0,05	22.732,20	0,05	27.642,40	0,06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24.099,10	0,07	27.384,70	0,07	28.476,40	0,07	29.951,20	0,07	31.727,30	0,07	32.486,70	0,07
6	Konstruksi	4.077.827,20	11,68	4.331.931,90	11,45	4.660.283,30	11,43	4.960.375,50	11,25	5.435.772,90	11,40	5.590.858,60	11,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.736.414,30	10,70	4.087.998,90	10,81	4.360.387,70	10,70	4.593.690,60	10,42	4.804.997,20	10,07	4.880.338,90	9,92
8	Transportasi dan Pergudangan	1.895.708,20	5,43	2.124.320,80	5,62	2.317.973,70	5,69	2.449.809,50	5,56	2.670.084,10	5,60	2.869.543,40	5,83
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	441.799,10	1,27	476.085,80	1,26	515.215,70	1,26	536.685,40	1,22	567.997,20	1,19	599.768,30	1,22
10	Informasi dan Komunikasi	735.049,10	2,11	827.555,90	2,19	924.338,20	2,27	1.026.246,50	2,33	1.149.747,10	2,41	1.308.795,20	2,66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	393.558,60	1,13	433.584,00	1,15	476.983,70	1,17	490.406,90	1,11	513.521,80	1,08	554.558,70	1,13
12	Real Estate	318.923,90	0,91	363.493,80	0,96	389.505,10	0,96	436.049,90	0,99	463.145,30	0,97	485.944,20	0,99
13	Jasa Perusahaan	102.424,70	0,29	116.954,10	0,31	127.032,00	0,31	132.865,00	0,30	144.721,60	0,30	142.828,00	0,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.749.171,80	5,01	1.939.820,70	5,13	2.041.255,00	5,01	2.154.505,00	4,89	2.338.324,10	4,90	2.515.373,20	5,11
15	Jasa Pendidikan	560.484,60	1,61	685.587,30	1,81	821.934,40	2,02	949.650,40	2,15	1.045.605,40	2,19	1.162.030,80	2,36
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	285.293,30	0,82	314.398,20	0,83	351.325,00	0,86	374.558,40	0,85	419.201,80	0,88	494.920,80	1,01
17	Jasa Lainnya	182.459,70	0,52	194.558,10	0,51	203.369,90	0,50	209.179,30	0,47	224.937,10	0,47	262.653,00	0,53
	PDRB	34.918.578,10	100	37.829.038,80	100	40.768.541,40	100	44.091.699,30	100	47.696.806,70	100	49.188.675,80	100

Sumber : Publikasi PDRB Provinsi Kalimantan Utara 2016 dengan hasil olahan

**Tabel 4.7**  
**Nilai dan Kontribusi Sektoral dalam PDRB 2010-2015**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Provinsi Kalimantan Utara**

No	Sektor	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		(Rp)	%										
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.235.362,3	17,06	7.090.802,5	16,72	7.817.666,8	16,52	8.594.446,9	16,34	10.185.809,5	17,10	11.059.286,9	17,61
2	Pertambangan dan Pengalihan	10.589.650,4	30,33	14.384.004,4	33,92	15.796.877,4	33,25	17.803.228,4	33,84	19.148.752,2	32,14	17.620.866,5	28,05
3	Industri Pengolahan	3.572.234,3	10,23	4.155.013,5	9,8	4.458.816,3	9,42	4.882.368,4	9,28	5.607.033,5	9,41	6.113.530,1	9,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18.117,5	0,05	18.185,9	0,04	18.232,9	0,04	17.934,1	0,03	18.702,1	0,03	26.144,8	0,04
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24.099,1	0,07	28.968,4	0,07	30.562,7	0,06	32.627,3	0,06	35.871,9	0,06	37.954,7	0,06
6	Konstruksi	4.077.827,2	11,68	4.566.744,7	10,77	5.516.773,0	11,66	6.018.287,0	11,44	6.921.861,2	11,62	7.550.977,0	12,02
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.736.414,3	10,7	4.396.361,1	10,37	4.786.496,4	10,11	5.116.926,2	9,73	5.875.054,0	9,86	6.535.985,5	10,40
8	Transportasi dan Pergudangan	1.895.708,2	5,43	2.165.062,6	5,1	2.475.470,2	5,23	2.837.927,7	5,39	3.376.384,5	5,67	3.948.457,4	6,29
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	441.799,1	1,27	521.146,2	1,23	605.633,2	1,28	681.652,3	1,30	790.354,9	1,33	902.518,3	1,44
10	Informasi dan Komunikasi	735.049,1	2,11	837.011,2	1,97	942.242,1	1,99	1.057.025,9	2,01	1.206.241,7	2,02	1.378.112,7	2,19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	393.558,5	1,13	447.311,4	1,05	525.100,2	1,11	587.999,9	1,12	653.095,6	1,10	746.708,4	1,19
12	Real Estate	318.923,9	0,91	349.905,3	0,83	379.366,3	0,80	433.757,3	0,82	494.596,0	0,83	557.386,9	0,89
13	Jasa Persewaan	102.424,7	0,29	122.700,5	0,29	136.096,3	0,29	149.759,9	0,28	174.628,3	0,29	181.761,6	0,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.749.171,8	5,01	2.060.560,2	4,86	2.418.449,0	5,11	2.670.622,2	5,08	3.076.340,0	5,16	3.646.780,7	5,81
15	Jasa Pendidikan	560.484,6	1,61	745.926,7	1,76	916.213,2	1,94	1.097.349,6	2,09	1.279.037,9	2,15	1.557.208,5	2,48
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	285.293,3	0,82	323.007,8	0,76	352.885,1	0,75	388.694,7	0,74	453.198,0	0,76	595.395,4	0,95
17	Jasa Lainnya	182.459,7	0,52	198.300,3	0,47	216.851,0	0,46	234.094,4	0,45	275.541,3	0,46	359.760,1	0,57
	PDRB	34.918.578,0	100	42.410.932,7	100	47.333.732,1	100	52.604.702,2	100	59.572.512,6	100	62.818.835,5	100,00

Sumber : Publikasi PDRB Provinsi Kalimantan Utara 2016 dengan hasil olahan

Sektor yang paling dominan dalam menunjang perekonomian daerah di Provinsi Kalimantan Utara adalah sektor primer, khususnya sektor pertambangan dan pengalihan dengan kontribusi sebesar 30,25 persen pada tahun 2011 hingga mencapai 30,48 persen pada tahun 2015. Kontribusi sektor pertambangan dan pengalihan terhadap PDRB Kalimantan Utara sangat fluktuatif. Meskipun demikian, sektor ini tetap berkontribusi paling besar selama lima tahun berturut-

turut. penyumbang terbesar kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 17,43 persen di tahun 2015. Adapun penyumbang ketiga merupakan sektor sekunder yakni konstruksi mencapai 11,37 persen pada tahun 2015, yang kemudian diikuti oleh perkembangan sektor perdagangan 9,92 persen di tahun 2015 dan industri pengolahan sebesar 9,55 persen pada tahun yang sama.

Meski sektor-sektor tersebut di atas menduduki sektor penyumbang terbesar dalam PDRB Provinsi Kalimantan Utara, sektor yang kontribusinya terus menunjukkan pertumbuhan terbesar selama tahun 2010 hingga 2015 adalah sektor jasa pendidikan dengan laju pertumbuhan sektornya mencapai 22,82% terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan telah menjadi fokus kegiatan dan perhitungan kontribusinya terhadap perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Utara. Angka ini kemudian disusul oleh sektor Jasa Kesehatan dan Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa sektor yang berperan dalam pelayanan publik tumbuh pesat dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.

#### **4.3.2. Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan angka turunan dari perkembangan besaran angka nilai tambah bruto atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi lazim digunakan sebagai salah satu indikator untuk pencapaian target pembangunan di bidang ekonomi. Angka laju pertumbuhan ekonomi mengindikasikan terjadinya kenaikan atau penurunan jumlah produksi barang dan jasa pada suatu wilayah.

Melemahnya perekonomian di berbagai negara serta penurunan harga komoditas sumber energi (migas dan batubara) di pasar internasional menjadi salah satu penyebab pelambatan ekonomi nasional dan juga berpengaruh pada regional Provinsi Kalimantan Utara di Tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara mengalami pelambatan pada tahun 2015 yang hanya sebesar 3,13 persen, dimana sebelumnya pada tahun 2014 pertumbuhan ekonominya mencapai 8,18 persen. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh kinerja kategori pertambangan dan penggalan yang terkoreksi sebesar -2,66 persen, diikuti oleh kategori jasa perusahaan yang terkoreksi sebesar -1,31 persen. Pertumbuhan pada kategori Jasa Perusahaan cenderung akan ikut mengalami kontraksi, hal ini disebabkan oleh sebagian jasa perusahaan menyediakan jasanya untuk usaha-usaha pada bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi juga pertambangan batu bara.

**Tabel 4.8**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2010 -2015**

Lapangan Usaha/Industry		2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	7,08	6,79	5,15	6,96	6,90
B	Pertambangan dan Penggalan/Mining and Quarrying	8,08	8,63	12,65	9,98	(2,66)
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	5,39	5,40	6,48	5,16	5,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	5,32	5,51	3,51	9,09	21,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	13,63	3,99	5,18	5,93	2,39
F	Konstruksi/Construction	6,23	7,58	6,44	9,58	2,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	9,41	6,66	5,35	4,60	1,57
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	12,06	9,12	5,69	8,99	7,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	7,76	8,22	4,17	5,83	5,59
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	12,59	11,69	11,02	12,03	13,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	10,17	10,01	2,81	4,71	7,99
L	Real Estat/Real Estate Activities	13,98	7,16	11,95	6,21	4,92
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	14,19	8,62	4,59	8,92	(1,31)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	10,90	5,23	5,55	8,53	7,57
P	Jasa Pendidikan/Education	22,32	19,89	15,54	10,10	11,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	10,20	11,75	6,61	11,92	18,06
R,S, T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	6,63	4,53	2,86	7,53	16,77
<b>Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product</b>		<b>8,33</b>	<b>7,77</b>	<b>8,15</b>	<b>8,18</b>	<b>3,13</b>

\* Angka sementara/Preliminary Figures

Sumber : BPS, PDRB Provinsi Kalimantan Utara menurut Lapangan Usaha 2011 - 2015

### 4.3.3. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi menjadi salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Pada periode 2010-2015, laju inflasi Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan rata-rata 8,1 persen.

**Tabel 4.7**  
**Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2010-2015 di Provinsi Kalimantan Utara**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Inflasi Provinsi Kalimantan Utara <sup>1</sup>	7,92	6,43	5,99	10,35	11,91	6,16
Inflasi Nasional <sup>2</sup>	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35

Sumber : 1) BPS, Kota Tarakan dalam Angka 2015  
2) BPS, 2016

Laju inflasi tiap tahun masih termasuk tinggi jika dibandingkan dengan laju inflasi nasional. Nilai inflasi rata-rata Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yakni 7,92 persen di tahun 2010 turun menjadi 6,16 persen di tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa meski harga barang dan jasa semakin tinggi, pengendalian peredaran uang di masyarakat telah berjalan lebih baik.

### 4.3.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita digunakan untuk menunjukkan nilai PDRB per penduduk. PDRB per kapita digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. PDRB ADHK per kapita Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2010-2015 menunjukkan pertumbuhan ekonomi per kapita yang relatif positif,

meski sedikit menurun di tahun 2015. Pertumbuhan rata-rata PDRB ADHK per kapita penduduk Provinsi Kalimantan Utara sebesar 2,85 persen.

**Tabel 4.8**  
**PDRB ADHK Per Kapita tahun 2010 – 2015 Provinsi Kalimantan Utara**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai PDRB (Juta Rp)	34.918.578,10	37.829.038,80	40.768.541,40	44.091.699,30	47.696.806,70	49.188.675,80
Jumlah Penduduk (jiwa)	524.147	547.377	570.904	594.982	618.207	641.936
PDRB perkapita (Rp/jiwa)	66.619.819	69.109.661	71.410.502	74.105.938	77.153.456	76.625.514

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016 – 2021.

Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita. Pada tahun 2010 PDRB per kapita penduduk Provinsi Kalimantan Utara sebesar 66 juta. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 95,5 juta pada tahun 2014 atau meningkat 9 persen dibanding tahun 2013. Angka ini terus naik hingga 97,8 juta di tahun 2015.

**Tabel 4.9**  
**PDRB ADHB Per Kapita tahun 2010 – 2015 Provinsi Kalimantan Utara**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai PDRB (Juta Rp)	34.918.578	42.410.932	47.333.732	52.604.702	59.572.512	62.818.835
Jumlah Penduduk (jiwa)	524.147	547.377	570.904	594.982	618.207	641.936
PDRB perkapita (Rp/jiwa)	66.619.818	77.480.296	82.910.143	88.413.939	96.363.373	97.858.408

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016 – 2021.

#### **4.3.4. Kemiskinan**

Kemiskinan masih menjadi persoalan prioritas untuk diselesaikan di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2010, persentase penduduk miskin Kalimantan Utara mencapai 12,47 persen atau setara dengan 65,9 ribu jiwa dari total penduduk. Angka ini terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 7,73 persen atau 46.400 jiwa di tahun 2013. Angka kemiskinan kembali mengalami sedikit peningkatan di tahun 2014, yakni sebesar 55.800 jiwa.

**Tabel 4.10**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2010-2014**

Tahun	Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)	Persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan Nasional <sup>4</sup>
2010 <sup>1</sup>	65,9	12,47	13,33
2011 <sup>1</sup>	57	10,33	12,49
2012 <sup>1</sup>	56,7	9,7	11,66
2013 <sup>2</sup>	46,4	7,73	11,47
2014 <sup>3</sup>		6,24	10,96

Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, 2016 -2021

Angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara masih tergolong lebih rendah apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional. Pada tahun 2014, angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara adalah 6,24 persen, ketika angka nasional telah mencapai 10,96 persen. Kondisi ini diharapkan tetap bertahan dan semakin baik, dalam arti semakin menurunnya angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara.

#### **4.4. Fokus Kesejahteraan Masyarakat**

##### **4.4.1. Angka Melek Huruf**

Angka melek huruf menurut Badan Pusat Statistik Indonesia merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka Melek Huruf berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Semakin tinggi Angka Melek Huruf suatu kabupaten/kota maka semakin banyak pula masyarakat yang mampu membaca dan menulis dibandingkan dengan total keseluruhan penduduk di wilayah tersebut. Berikut adalah data angka melek aksara di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2010 sampai dengan 2015.

**Tabel 4.11**  
**Perkembangan Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010-2015**

Uraian	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka melek aksara	Bulungan	93.78	95.02	95.94	92.35	96.64	95
	Malinau	94.29	91.61	91.60	93.74	96.02	98
	Nunukan	94.34	92.71	94.35	93.47	96.88	na
	Tana Tidung	93.37	87.83	93.11	91.33	95.53	na
	Tarakan	97.97	97.87	98.89	98.26	99.50	98.85
	Prov. Kalimantan Timur	97.05	97,21	97,55	-	-	-
	Prov. Kalimantan Utara	na	na	na	na	97.66	80

Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2021

Berdasarkan data tabel di atas, angka melek huruf per kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara secara umum mengalami kenaikan. Angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 97,66 persen pada tahun 2014. Angka tahun 2014 ini dinilai sudah melebihi sasaran rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun nasional 2019 yang sebesar 96,1 persen. Provinsi Kalimantan Utara secara umum perlu mempertahankan dan tetap terus meningkatkan pencapaian ini. Hal ini dapat diusahakan dengan meningkatkan angka melek huruf di beberapa kabupaten/kota seperti Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau yang dinilai masih perlu mengejar ketertinggalannya dibandingkan kabupaten/kota lainnya, meskipun tidak terlalu signifikan.

#### **4.4.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun

keatas. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi puka tingkat partisipasi sekolah masyarakat di wilayah tersebut.

**Tabel 4.12**  
**Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah**  
**Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010 s.d 2015**

Uraian	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka rata-rata lama sekolah	Bulungan	8.11	8.15	8.17	7.9	8.27	na
	Malinau	7.76	8.25	8.26	8.27	8.27	na
	Nunukan	7.42	7.47	7.55	7.07	7.21	na
	Tana Tidung	7.1	7.24	7.64	7.79	7.84	na
	Tarakan	9.36	9.43	9.44	9.28	9.44	9.04
	Prov. Kalimantan Timur	8.87	9.19	9.22	-	-	-
	Prov. Kalimantan Utara	na	na	na	8.1	8.35	na

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021

Berdasarkan data dari tabel di atas, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, kabupaten dengan angka rata-rata lama sekolah paling tinggi di Provinsi Kalimantan Utara adalah Kota Tarakan. Pada tahun 2010, angka rata-rata lama sekolah di Kota Tarakan selama 9,36 tahun dan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2014 naik menjadi 9,44 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk di Kota Tarakan baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 3 SMP dan masih banyak yang tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA atau putus sekolah pada jenjang SMA. Sementara kabupaten yang memiliki angka rata-rata lama sekolah rendah di Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan. Selama tahun 2010 sampai dengan 2014, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tana Tidung selama 5 tahun dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2014 dapat mencapai angka rata-rata lama sekolah selama 7,84 tahun. Hal ini menjelaskan bahwa rata-rata penduduk di Tana Tidung masih banyak yang tidak dapat menamatkan bangku SMP, dengan rata-rata lama sekolah hanya mencapai antara kelas 1 dan 2 SMP. Sedangkan untuk Kabupaten Nunukan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Nunukan selama 7 tahun

cenderung fluktuatif, dengan peningkatan dari tahun 2010 sebesar 7,42 tahun hingga pada tahun 2012 sebesar 7,55 tahun, kemudian menurun pada tahun 2013 sebesar 7.07, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 7.21 tahun. Sama dengan Kabupaten Tana Tidung, hal ini menjelaskan bahwa rata-rata penduduk di Nunukan masih banyak yang tidak dapat menamatkan bangku SMP, dengan rata-rata lama sekolah hanya mencapai antara kelas 1 dan 2 SMP.

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Utara yang hanya mencapai 8.35 pada tahun 2014 dinilai masih cukup jauh dari sasaran rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun nasional 20194 yang sebesar 8,8 tahun. Provinsi Kalimantan Utara secara umum perlu mengejar ketertinggalan untuk mencapai target tersebut. Hal ini dapat diusahakan dengan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di 4 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung.

#### **4.4.3. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK**

Menurut Badan Pusat Statistik, angka partisipasi kasar (APK) menunjukkan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Kegunaan APK adalah menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan apapun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang

pendidikan, dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Berikut ini merupakan tabel angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA di Provinsi Kalimantan Utara.

**Tabel 4.13**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA**  
**Provinsi Kalimantan Utara**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Bulungan	64.33	82.57	98.35	66.87	89.18
Malinau	75.41	95.14	88.75	81.09	89.18
Nunukan	67.86	78.66	100.10	84.92	93.36
Tana Tidung	45.61	62.09	74.54	70.22	85.51
Tarakan	75.55	69.61	84.98	99.86	84.71
Prov. Kalimantan Timur	72.39	73	80.08	-	-
Prov. Kalimantan Utara	na	na	na	85.37	88.44

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021

Pada tahun 2010 APK untuk jenjang SMA/MA/SMK menunjukkan bahwa Kota Tarakan memiliki nilai APK jenjang SMA/MA/SMK tertinggi sebesar 75,55 persen, sebaliknya kabupaten/kota dengan APK jenjang SMA/MA/SMK yang paling rendah adalah Kabupaten Tana Tidung sebesar 45,61 persen. Sementara tahun 2014, Kabupaten Nunukan memiliki nilai APK jenjang SMA/MA/SMK yang paling tinggi 93,36 persen, sedangkan Kota Tarakan justru mengalami penurunan menjadi 84,71 persen dan menjadi kabupaten/kota dengan angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK terendah.

Capaian APK SMA/MA/SMK Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan memiliki nilai APK SMA/MA/SMK yang lebih tinggi dari nilai APK provinsi pada tahun 2014. APK untuk jenjang SMA/MA/SMK Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai 88,44 persen tahun 2014 masih cukup jauh dari sasaran APK SMA/MA/SMK/Paket C Nasional tahun 2019 yang sebesar 91,6 persen. Provinsi Kalimantan Utara perlu mengejar ketertinggalan untuk mencapai target tersebut.

#### 4.4.4. Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Badan Pusat Statistik merupakan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu wilayah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu kabupaten/kota pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu wilayah. APM untuk jenjang SMA/MA/SMK adalah perbandingan jumlah siswa yang berusia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang SMA dengan jumlah seluruh penduduk yang berada pada jenjang umur tersebut.

**Tabel 4.14**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA**  
**Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010 - 2014**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Bulungan	48.33	64.32	72.57	57.25	65.53
Malinau	55.13	61.83	60.52	60.92	65.25
Nunukan	49.74	52.37	62.77	64.40	70.75
Tana Tidung	33.33	47.20	56.82	54.52	64.13
Tarakan	63.72	57.35	68.85	72.69	72.87
Prov. Kalimantan Timur	53.66	54.58	59.75	-	-
Prov. Kalimantan Utara	na	na	na	na	69.64

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021

APM jenjang SMA yang paling tinggi di tahun 2010 adalah Kota Tarakan (63.72 persen), sedangkan kabupaten/kota dengan capaian APM jenjang SMA/MA/SMK terendah adalah Kabupaten Tanah Tidung (33.33 persen). Perkembangan tahun 2014, kabupaten/kota dengan capaian APM jenjang SMA sederajat yang paling besar adalah Kota Tarakan (72,87 persen). Jika melihat kecenderungan perkembangan dari tahun 2010-2014, maka kabupaten/kota dengan kecenderungan perkembangan yang baik adalah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung (kurang lebih 20 persen dan 30 persen). Seluruh

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara mengalami kecenderungan peningkatan APM untuk jenjang SMA/MA/SMK selama 5 tahun terakhir. Kecenderungan perkembangan yang semakin meningkat ini hendaknya tetap dijaga dan ditingkatkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

APM jenjang SMA/MA/SMK di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2010 adalah sebesar 53,66 persen. Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, maka hanya Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau yang melebihi capaian Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan 3 kabupaten lain masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur. Tahun 2014, APM di Provinsi Kalimantan Utara adalah 69.64% persen, jika dibandingkan dengan capaian APM di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2014, maka hanya Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan yang melebihi capaian Provinsi Kalimantan Utara.

#### **4.4.5. Angka Kematian Bayi**

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian *neonatal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian *post neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan luar.

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Kegunaan dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Sedangkan angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka ini dihitung dari nilai 1 dikurangi dengan AKB, di mana angka 1 mewakili per 1.000 kelahiran hidup.

**Tabel 4.15**  
**Angka Kematian Bayi Tahun 2010-2015**  
**Provinsi Kalimantan Utara**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah kematian bayi	146	154	191	146	236	154
Jumlah bayi lahir hidup	11400	12547	11347		12298	11848
Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	12,8	12,3	16,8		19,2	13,00
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	987,19	987,73	983,17		980,81	987,00

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021

Dari tahun 2010 ke tahun 2011, meskipun jumlah bayi meninggal bertambah banyak, AKB sempat mengalami penurunan sedikit menjadi 12,8 dan turun lagi menjadi 12,3 pada tahun 2011 karena peningkatan jumlah kelahiran hidup yang cukup tinggi. Kemudian AKB tahun 2012 naik cukup signifikan menjadi 16,8 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2014 AKB naik kembali hingga 19,2 per 1.000 kelahiran hidup dan AKHB sebesar 981. Jumlah kematian tahun 2014 (236 kasus) adalah yang terbanyak sejak 7 tahun terakhir, AKB di tahun ini juga yang tertinggi dan AKHB terendah sejak 2010.

**Tabel 4.16**  
**Angka Kelangsungan Hidup Bayi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015**

Kabupaten	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Bayi Lahir Hidup	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	AKHB
Kabupaten Bulungan	45	2580	17,4	982,6
Kabupaten Malinau	12	1234	9,7	990,3
Kabupaten Nunukan	32	3747	8,5	991,5
Kabupaten Tana Tidung	1	400	2,5	997,5
Kota Tarakan	64	3887	16,5	983,5
Jumlah	154	11848	13,0	987,0

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021

Pada tahun 2015, kematian bayi mengalami penurunan kembali yang cukup signifikan yaitu menjadi 154 kasus sehingga angka kematian bayi turun menjadi 13 per 1.000 kelahiran hidup. Dari kelima kabupaten/kota, jumlah kematian dan kelahiran hidup terbanyak berada di Kota Tarakan, namun AKB tertinggi berada di Kabupaten Bulungan karena jumlah kematian tidak jauh beda dengan Kota Tarakan dengan jumlah kelahiran hidup jauh lebih rendah dari Tarakan sehingga angka kematian menjadi tinggi. Hal ini serupa dengan yang terjadi di Kabupaten Tana Tidung tahun 2012-2014. Kematian di kabupaten ini tidaklah lebih dari 20 kasus namun karena jumlah kelahiran hidup sangat kecil menyebabkan AKB menjadi tinggi sekali hingga mencapai 45 di tahun 2014.

Secara umum, angka kematian bayi dari tahun 2010-2015 berada di bawah batas yang ditetapkan MDG's untuk tahun 2015. Semua kabupaten/kota pada tahun ini berada di bawah batas MDG's. Upaya-upaya untuk mempertahankan keadaan ini harus terus dilakukan dan dipantau. Program-program yang secara aktif harus digalakkan untuk menekan angka ini adalah program-program seperti imunisasi, pencegahan penyakit menular terutama pada bayi dan anak-anak, program promosi gizi dan pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan anak, termasuk program 1000 hari pertama kelahiran yang menekankan perhatian pada bayi mulai dari kandungan hingga berusia 2 tahun.

#### 4.4.6. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka kematian ibu ini dihitung per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan dan persalinan. Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Angka Kematian Ibu dari tahun 2011-2015 di Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2011 AKI sebesar 119,6 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun selanjutnya AKI ini meningkat cukup besar menjadi 168 tahun 2011 dan 171 di tahun 2014. Namun di tahun 2015 angka ini turun cukup tajam menjadi 127 per 100.000 kelahiran hidup.

**Tabel 4.17**  
**Angka Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2010-2015**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kematian Ibu		15	19	16	21	15
Jumlah Bayi Lahir Hidup	11.389	12.547	11.327		12.298	11.848
Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup		119,6	167,7		170,8	126,6

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, 2016

Pada tahun 2015, jumlah kematian terbanyak di Kabupaten Nunukan, namun AKI tertinggi berada di Kabupaten Malinau yang mencapai 243 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun ini di Kabupaten Tana Tidung tidak terdapat kematian Ibu melahirkan.

**Tabel 4.18**  
**Angka Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015**  
**Provinsi Kalimantan Utara**

Kabupaten	Jumlah Kematian Ibu melahirkan	Jumlah Bayi Lahir Hidup	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
Kabupaten Bulungan	2	2580	77,5
Kabupaten Malinau	3	1234	243,1
Kabupaten Nunukan	6	3747	160,1
Kabupaten Tana Tidung	0	400	0,0
Kota Tarakan	4	3887	102,9
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>11.848</b>	<b>126,6</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, 2016

MDG's Indonesia menargetkan AKI turun hingga angka 102 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2015. Nilai AKI di Kalimantan Utara sejak tahun 2011 masih di atas garis batas MDG's. Terlihat juga sejak tahun 2010-2014 AKI di Kabupaten Tana Tidung sangat melampaui batas MDG's karena jumlah penduduk yang kecil dan jumlah kelahiran hidup yang semakin kecil pula menyebabkan AKI menjadi sangat besar padahal kasus kematian di kabupaten tersebut hanya 3 orang.

Penyebab dari kematian ibu melahirkan ini adalah multifaktorial, sehingga angka kematian ibu ini dapat dikaitkan dengan indikator lain yang berkaitan yaitu seperti cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, jumlah tenaga medis berkualitas, fasilitas di sarana kesehatan, pelayanan selama antenatal (K4), serta kemudahan akses terhadap sarana kesehatan.

#### **4.4.7. Usia Harapan Hidup**

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

**Tabel 4.19**  
**Usia Harapan Hidup Tahun 2010-2015**  
**Provinsi Kalimantan Utara**

Uraian	2010	2011	2012	2013
Angka Usia Harapan Hidup	71,4	71,6	71,8	71,8

Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016 - 2021

Usia harapan hidup di Provinsi Kalimantan Utara dari 2010-2013 mengalami kecenderungan meningkat dengan usia harapan hidup sebesar 71,4 tahun hingga menjadi 71,8 di tahun 2013. Angka usia harapan hidup di Provinsi Kalimantan Utara lebih tinggi bila dibandingkan angka nasional. Target RPJMN tahun 2010-2014 adalah meningkatkan usia harapan hidup hingga 72 tahun di tahun 2014.

Angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh banyak variabel yang erat kaitannya dengan masalah kesehatan penduduk. Oleh karena itulah untuk meningkatkan angka usia harapan hidup perlu memperhatikan hal-hal seperti penanganan terhadap kehamilan yang beresiko, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, jumlah tenaga medis dan kesehatan yang lain, angka kesakitan, kondisi geografis tempat tinggal, penyediaan air bersih, akses terhadap sarana kesehatan, hingga latar belakang pendidikan masyarakat.

#### **4.4.8. Persentase Balita Gizi Buruk**

Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score < -3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwasiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Presentase balita gizi buruk

dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah balita di wilayah tersebut pada waktu yang sama.

Berdasarkan WHO (1999), ada 4 kategori untuk suatu wilayah berdasarkan prevalensi gizi kurang yaitu rendah (<10 persen), sedang (10-19 persen), tinggi (20-29 persen), dan sangat tinggi (30 persen). Di Provinsi Kalimantan Utara, persentase balita gizi buruk mengalami naik turun sejak 2011, namun persentase balita gizi buruk tersebut tidak pernah melebihi angka 1 persen. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,80 persen yang berarti ada 493 balita gizi buruk dibandingkan dengan 61.493 jumlah balita seluruhnya.

**Tabel 4.20**  
**Persentase Balita Gizi Buruk Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2010-2015**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Balita Gizi Buruk		174	493		146	249
Jumlah Balita		70255	61493		68069	
Persentase Balita Gizi Buruk (%)		0,25	0,80		0,21	

Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016 – 2021

Pada tahun 2015, jumlah balita gizi buruk meningkat tajam menjadi 249 balita. Kasus terbesar, lebih dari 50%, disumbang oleh Kabupaten Bulungan. Perbedaan jumlah ini cukup tajam jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di tahun tersebut yang hanya berjumlah puluhan balita saja. Jika dibandingkan dengan kriteria yang ditentukan oleh WHO (1999), persentase balita gizi buruk di Provinsi Kalimantan Utara tergolong rendah.

**Tabel 4.21**  
**Persentase Balita Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015**

Kabupaten	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase Balita Gizi Buruk (%)
Kabupaten Bulungan	160		
Kabupaten Malinau	10		
Kabupaten Nunukan	27		
Kabupaten Tana Tidung	16		
Kota Tarakan	36	23174	0,2
Jumlah	249		

Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016 – 2021

Status gizi seseorang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan individu tersebut. Status gizi seorang ibu hamil sangat mempengaruhi kondisi janin yang dikandungnya. Apabila janin yang dilahirkan bermasalah maka akan menimbulkan permasalahan kesehatan pada bayi tersebut di kemudian hari dan jika tidak ditangani akan berdampak pada pertumbuhan selanjutnya. Masalah ini hanya akan menjadi lingkaran setan jika tidak segera diputus rantainya.

#### **4.4.9. Indeks Pembangunan Manusia**

Ukuran pembangunan yang digunakan selama ini, yaitu, PDB (dalam konteks nasional) dan PDRB (dalam konteks regional), hanya mampu memotret pembangunan ekonomi semata. Untuk itu, dibutuhkan suatu indikator yang lebih komprehensif agar mampu menangkap tidak saja perkembangan ekonomi tetapi juga perkembangan aspek sosial dan kesejahteraan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang dapat digunakan sebagai dasar merencanakan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Melalui IPM pula, dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan.

Dimulai pada tahun 2015, BPS melakukan beberapa penyesuaian pada penghitungan IPM yaitu memasukkan komponen baru pada komponen pendidikan dan pendapatan perkapita. Pada metode baru tersebut, komponen pendidikan meliputi Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling/EYS*) dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, sedangkan pada metode lama, komponen pendidikan meliputi Angka Melek aksara dan Rata-Rata Lama Sekolah. Pada komponen Pengeluaran Perkapita, penyesuaian dilakukan dengan menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai pengganti Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, IPM Kalimantan Utara yang diterbitkan sebelum tahun 2015 akan berbeda dengan data IPM yang diterbitkan pada tahun 2015. Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu kategori sangat tinggi ( $IPM \geq 80$ ), kategori tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ ), kategori sedang ( $60 \leq IPM < 70$ ), dan kategori rendah ( $IPM < 60$ ). Berikut ini adalah kondisi IPM di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

**Tabel 4.22**  
**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2010-2015**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bulungan	66,79	67,63	68,16	68,66	69,25	69,37
Malinau	66,90	68,15	68,88	69,84	70,00	70,15
Nunukan	60,33	60,64	61,18	62,18	63,13	63,35
Tana Tidung	61,16	61,92	62,91	63,79	64,70	64,92
Tarakan	70,95	71,60	72,53	73,58	74,60	74,70
Kalimantan Utara	-	-	-	67,99	68,64	68,76
Indonesia	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55

Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016 – 2021

Berdasarkan tabel di atas, secara umum Nilai IPM seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2010-2015 mengalami peningkatan. Adapun angka Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Utara, pada tahun 2010-2015 di seluruh kabupaten/kota tidak ada yang berada di kategori rendah, semua kabupaten/kota berada di kategori sedang. Pada tahun 2015, selain Kota Tarakan (74,70) dan Kabupaten Malinau (70,15) yang berada di kategori tinggi, kabupaten Bulungan (69,37); kabupaten Nunukan (63,35); dan kabupaten Tana Tidung (64,92) memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia yang berada di kategori sedang. Apabila dibandingkan berdasarkan provinsi-provinsi yang berada di Pulau Kalimantan, nilai IPM Kalimantan Utara selama tahun 2013-2015, selalu berada di urutan kedua setelah Kalimantan Timur di atas nilai IPM Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

#### **4.5. Potensi Pengembangan Wilayah**

##### **4.5.1. Pertanian**

Salah satu sektor yang mempunyai peran vital dalam ekonomi wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Atas dasar hal tersebut, kegiatan pertanian di Kalimantan Utara harus didorong untuk berkembang dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep pembangunan pertanian diharapkan dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya alam daerah secara berkelanjutan, yaitu dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial secara seimbang dalam kerangka SIDA. Oleh karena itu, sebagai pilar

ekonomi masyarakat, maka dalam pembangunan pertanian ini harus memperhatikan atau menetapkan komoditas unggulan yang ramah lingkungan dan mempunyai nilai ekonomi tinggi.

**a. Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan**

Fokus komoditas tanaman pangan Provinsi Kalimantan Utara adalah padi, jagung, dan ubi kayu. Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan merupakan daerah potensial pengembangan ketiga komoditas tanaman pangan tersebut. Secara umum, Provinsi Kalimantan Utara memiliki lahan pertanian yang potensial yaitu seluas 115.721,57 Ha. Tetapi, hanya 14.265,05 Ha saja yang termanfaatkan menjadi lahan sawah. Artinya masih terdapat 101.456,51 Ha lahan yang belum termanfaatkan secara optimal. Adapun tingkat produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015 adalah.

**Tabel 4.23**  
**Produksi dan produktifitas Komoditas Pertanian Tanaman Pangan**  
**Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015**

Komoditas	Luas (ha)	Produksi (ton)	Produktifitas (ton/ha)
Padi Sawah	15.073,00	55.019,00	55,00
Pada Ladang	26.112,00	57.083,00	58,00
Jagung	756,00	5.430,00	66,00
Kedelai	2.423,00	2.239,00	9,24
Kacang Tanah	223,00	257,00	11,03
Kacang Hijau	112,00	113,00	10,09
Ubi Kayu	1.759,00	38.936,00	225,19
Ubi Jalar	282,00	2.851,00	97,30

Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka 2016

## b. Sub Sektor Holtikultura

Jenis tanaman buah-buahan yang menjadi fokus utama pengembangan di Provinsi Kalimantan Utara adalah buah jeruk, durian/lai, dan pisang. Buah Pisang di Provinsi Kalimantan Utara memiliki keunggulan kompetitif karena total produksinya pada tahun 2015 mencapai 905.284 ton. Produksi buah pisang terbesar berasal dari Kabupaten Nunukan dengan total sebesar 97,28 persen dari total produksi provinsi.

Kabupaten penghasil buah durian paling banyak juga terdapat di Kabupaten Nunukan dengan total produksi sebesar 88,83 persen dari total produksi Provinsi. Adapun Kabupaten penghasil buah jeruk paling banyak pada kurun waktu tahun 2015 adalah Kabupaten Nunukan dengan total produksi sebanyak 54,62% dari total produksi provinsi.

**Tabel 4.24**  
**Produksi Buah-Buahan Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2015**

Kabupaten/Kota Regency/City	Mangga Mango	Durian Durian	Jeruk Orange	Pisang Banana	Pepaya Papaya	Nanas Pine- apple	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Kabupaten/Regency</b>							
1. Malinau	1 037,00	6 842,00	2 264,00	9 187,00	817,00	554,00	18 028,00
2. Bulungan	3 177,00	13 003,00	32,00	4 929,00	1 196,00	2 677,00	81 764,00
3. Tana Tidung							
4. Nunukan	182 760,00	14 6050,00	106 850,00	880 680,00	19 450,00	0,00	3 972,00
<b>Kota/City</b>							
1. Tarakan	34 677,00	1 533,00	11 142,00	10 452,00	83 604,00	300,00	35 390,00
<b>Kalimantan Utara</b>	<b>221 651,00</b>	<b>167 428,00</b>	<b>120 288,00</b>	<b>905 284,00</b>	<b>105 067,00</b>	<b>3 531,00</b>	<b>139 154,00</b>

Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka 2016

Selain buah-buahan, komoditas sayur-sayuran di Provinsi Kalimantan Utara berpotensi untuk dikembangkan lebih optimal. Hal tersebut karena geografis wilayah Kalimantan Utara yang cocok untuk budidaya sayur-sayuran dengan ditopang oleh curan hujan yang cukup serta kebutuhan terhadap pasar lokal dan konsumsi keluarga yang meningkat. Jenis sayuran yang dibudidayakan penduduk Kalimantan Utara pada umumnya adalah Cabai, Petsai, Kubis, Bawang Daun, Kacang Panjang, Jamur, Tomat, Terong, Buncis, Ketimun, Labu Siam, Kangkung dan Bayam.

**Tabel 4.25**  
**Perkembangan Produksi Sayuran**  
**Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010-2014**

No	Sayuran	Total Produksi (Ton)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Bawang Merah	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bawang Daun	799,30	923,70	795,80	567,10	440,00
3	Kentang	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
4	Kubis	738,00	541,10	564,10	237,90	37,00
5	Kembang Kol	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
6	Petsai/Sawi	6.796,10	4.633,10	3.539,20	3.601,40	3.255,00
7	Lobak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kacang Panjang	6.635,10	6.058,10	4.610,20	135,40	3.515,00
9	Cabe Besar	1.866,60	2.021,10	1.651,30	1.498,50	1.235,00
10	Cabe Rawit	2.718,00	2.845,20	2.554,70	2.191,10	1.849,00
11	Jamur (Kg)	0,00	1.534,00	4.320,00	410,00	299,00
12	Tomat	4.504,10	5.209,00	3.286,90	3.170,40	3.302,00
13	Terong	3.916,20	4.248,00	3.345,90	3.347,00	3.157,00
14	Buncis	1.504,20	1.926,90	1.871,00	1.637,80	1.523,00
15	Ketimun	6.010,00	5.914,00	4.708,90	3.714,50	3.860,00
16	Labu Siam	918,10	423,10	0,20	2,70	121,00
17	Kangkung	6.577,40	5.743,30	4.213,50	4.387,00	3.859,00
18	Bayam	4.053,80	3.153,00	2.662,00	2.410,30	1.751,00

Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016 – 2021

### c. Sub Sektor Peternakan

Jenis ternak yang dibudidayakan di Provinsi Kalimantan Utara meliputi ternak ruminansia dan unggas. Ruminansia yang umum dipelihara masyarakat adalah sapi, kerbau, kambing, domba dan babi. Adapun unggas meliputi ayam kampung, ayam ras dan itik. Perlu diketahui, ayam asli Nunukan termasuk jenis ayam unggul yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Sapi dan babi merupakan hewan ternak ruminansia dengan populasi tertinggi pada tahun 2013, yaitu 19.650 ekor dan 30.244 ekor. Untuk jenis unggas, ayam ras pedaging

merupakan komoditas yang paling banyak populasinya. Populasi ayam ras pedaging sebanyak 58,1 persen dari total populasi hewan ternak unggas seluruh provinsi (1.585.737 ekor).

**Tabel 4.26**  
**Populasi Ternak Ruminansia Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2013**

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>Sapi</b>	<b>Kerbau</b>	<b>Kambing</b>	<b>Domba</b>	<b>Babi</b>	<b>Kuda</b>
Malinau	2 287	172	773	-	12 802	-
Bulungan	5 569	27	6 553	-	6 599	2
Tana Tidung	971	-	324	-	985	-
Nunukan	8 847	3 242	2 529	44	3 845	7
Tarakan	1 976	27	1 050	-	6 013	12
<b>Jumlah</b>	<b>19 650</b>	<b>3 468</b>	<b>11 229</b>	<b>44</b>	<b>30 244</b>	<b>21</b>

Sumber : [www.kaltara.bps.go.id](http://www.kaltara.bps.go.id)

**Tabel 4.27**  
**Populasi Ternak Unggas Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2013**

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>Ayam Kampung</b>	<b>Ayam Ras Pedaging</b>	<b>Ayam Ras Petelur</b>	<b>Itik</b>
Malinau	131 605	25 218		21 591
Bulungan	320 812	576 072		4 540
Tana Tidung	10 512	53 477		1 907
Nunukan	78 300	329 750	9 000	23 385
Tarakan	971 701	3 390 250	22 462	17 573
<b>Jumlah</b>	<b>1 512 930</b>	<b>4 374 767</b>	<b>31 462</b>	<b>68 996</b>

Sumber : [www.kaltara.bps.go.id](http://www.kaltara.bps.go.id)

Untuk produksi daging ayam ras pedaging pada periode waktu tahun 2013 telah mencapai 56,59 persen dari total produksi daging hewan ternak, diikuti hasil produksi daging ayam kampung dengan 18,32 persen dan sapi yang berjumlah 15,78 persen.

**Tabel 4.28**  
**Produksi Daging Ternak Unggas Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2013 (ton)**

Kabupaten/Kota	Ayam Kampung	Ayam Ras Pedaging	Ayam Ras Petelur	Itik
Malinau	142,90	26,00	-	9,00
Bulungan	221,90	585,00	-	1,90
Tana Tidung	4,20	45,20	-	0,80
Nunukan	81,00	337,60	4,10	9,70
Tarakan	744,50	3 315,30	10,10	7,30
<b>Jumlah</b>	<b>1 194,50</b>	<b>4 309,10</b>	<b>14,20</b>	<b>28,70</b>

Sumber : [www.kaltara.bps.go.id](http://www.kaltara.bps.go.id)

**Tabel 4.29**  
**Produksi Daging Ternak Ruminansia Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2013 (ton)**

Kabupaten/Kota	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
Malinau	41,38	12,37	3,24	-	140,56
Bulungan	152,11	-	4,37	-	59,65
Tana Tidung	21,17	-	0,74	-	8,35
Nunukan	100,14	15,46	18,95	-	47,39
Tarakan	325,38	3,67	9,00	-	145,11
<b>Jumlah</b>	<b>640,18</b>	<b>31,50</b>	<b>36,30</b>	<b>-</b>	<b>401,06</b>

Sumber : [www.kaltara.bps.go.id](http://www.kaltara.bps.go.id)

#### **d. Sub Sektor Perkebunan**

Terdapat beberapa jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan antara lain Karet, kelapa, kopi, lada, aren, kakao, kelapa sawit, dan lain-lain. Namun yang menjadi komoditas unggulan hanya 4 jenis yaitu kakao dan kelapa (Prioritas I), serta kopi dan kelapa sawit (Prioritas II). Sebagai komoditas utama, lokasi pembudidayaan kakao terdapat di semua kabupaten kecuali Kota Tarakan. Pada tahun 2015, total luasan perkebunan kakao di seluruh Kalimantan Utara mencapai 7.773,80 hektar, luasan terbesar terdapat di Kabupaten Nunukan yaitu 5.455,50 hektar. Total produksi Kakao selama tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 6.831,94 Ton.

Untuk komoditas Kelapa, pada tahun 2015 luasannya mencapai 1.258,60 hektar dengan total produksi mencapai 396,60 ton. Luasan perkebunan kelapa terbesar di Provinsi Kalimantan Barat berada di Kabupaten Bulungan, yaitu seluas 837,50 hektar dengan produksi panen kelapa sebesar 274,46 ton.

Sebagai prioritas produk unggulan daerah kedua adalah Kopi. Luas perkebunan kopi di Kalimantan Utara mencapai 1837,90 ha dengan tingkat produksi mencapai 272,62 ton pada tahun 2015. Luas kebun kopi terbesar berada di Kabupaten Malinau yaitu seluas 1.559,00 hektar. Adapun perkebunan kelapa sawit merupakan perkebunan terluas diantara komoditas perkebunan lainnya lainnya. Luas perkebunan sawit di Kalimantan Utara mencapai 23.944 hektar dengan tingkat produksi mencapai 201.059,03 ton.

**Tabel 4.30**  
**Luas Lahan Perkebunan Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2015**

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>		Karet <i>Rubber</i>	Kelapa <i>Coconut</i>	Kelapa Sawit <i>Oil Palm</i>	Kopi <i>Coffee</i>	Lada <i>Pepper</i>	Kakao <i>Cocoa</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Kabupaten/Regency</b>								
1.	Malinau	2 493,00	0,00	1 188,00	1 559,00	3,00	1 879,00	33,00
2.	Bulungan	229,50	837,50	0,00	172,00	134,00	439,00	
3.	Tana Tidung	91,00	11,00	351,90	14,50	6,50	0,30	0,00
4.	Nunukan	270,00	410,10	22 404,30	92,40	30,05	5 455,50	85,10
<b>Kota/City</b>								
1.	Tarakan							
<b>Kalimantan Utara</b>		<b>3 083,50</b>	<b>1 258,60</b>	<b>23 944,20</b>	<b>1 837,90</b>	<b>173,55</b>	<b>7 773,80</b>	<b>118,10</b>

Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka 2016

**Tabel 4.31**  
**Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2015**

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Karet <i>Rubber</i>	Kelapa <i>Coconut</i>	Kelapa Sawit <i>Oil Palm</i>	Kopi <i>Coffee</i>	Lada <i>Pepper</i>	Kakao <i>Cocoa</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Kabupaten/Regency</b>							
1. Malinau	30,00	0,00	9 312,00	171,00	1,20	365,00	0,00
2. Bulungan	2,00	274,46	0,00	28,00	72,62	157,10	0,00
3. Tana Tidung	0,00	2,02	222,03	1,75	0,80	0,00	0,00
4. Nunukan	0,00	120,12	191 525,00	71,87	13,51	6 309,84	0,00
<b>Kota/City</b>							
1. Tarakan							
<b>Kalimantan Utara</b>	<b>32,00</b>	<b>396,60</b>	<b>201 059,03</b>	<b>272,62</b>	<b>88,13</b>	<b>6 831,94</b>	<b>0,00</b>

Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka 2016

Komoditas perkebunan di Provinsi Kalimantan Utara, kecuali kelapa sawit, belum diusahakan secara intensif sehingga kontribusinya terhadap pendapatan masyarakat pekebun dan sumbangannya terhadap PDRB masih rendah. Dengan kata lain, mayoritas perusahaan perkebunan di Kalimantan Utara komoditas perkebunan bersifat kebun rakyat, hanya kelapa sawit yang dijalankan dalam bentuk perkebunan swasta dengan skala besar.

#### 4.5.2. Kehutanan

Dari enam klasifikasi hutan yang ada di Kalimantan, hanya lima jenis yang berada di Kalimantan Utara yaitu Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Dapat dikonversi. Luas total hutan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 adalah 3.835.985 Ha. Dari kelima jenis hutan yang ada di Kalimantan Utara, yang terluas adalah hutan produksi terbatas yaitu seluas 2.076.008 Ha dan yang

terkecil adalah Hutan Lindung yaitu seluas 1.904.288,9 Ha. Kabupaten Malinau merupakan wilayah yang memiliki total luas hutan terbesar dengan luas hutan 3.641.923 Ha, sedangkan yang terkecil di Kota Tarakan dengan luas total hanya sebesar 4.827 Ha. Hutan lindung, hutan suaka alam & pelestarian alam, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi yang paling luas berada di Kabupaten Malinau. Sementara hutan produksi tetap yang terluas berada di Kabupaten Bulungan.

**Tabel 4.32**  
**Luas Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2015**

Kabupaten/Kota Regency/City	Hutan Lindung Protection Forest	Suaka Alam dan Pelestarian Alam Sanctuary Reserve and Nature Conservati- on Area	Hutan Produksi Production Forest			Jumlah Luas Hutan dan Perairan Total Forest and Water Area
			Terbatas Limited	Tetap Permanent	Dapat Dikonversi Convertible	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Kabupaten/Regency</b>						
1. Malinau	682 635,9	992 785,5	1 571 189,3	364 838,7	30 473,7	3 641 923
2. Bulungan	235 37,3	0,0	324 015,6	466 921,2	0,0	0,0
3. Tana Tidung	0,0	0,0	9 084,0	151 704,0	9 874,0	194 062,0
4. Nunukan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kota/City</b>						
1. Tarakan						
<b>Kalimantan Utara</b>	<b>918 011,2</b>	<b>992 785,5</b>	<b>1 904 288,9</b>	<b>983 463,9</b>	<b>40 347,7</b>	<b>3 835 985,0</b>

Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka 2016

#### 4.5.3. Perikanan

Sumber daya perikanan di Provinsi Kalimantan Utara berasal perikanan laut dan perikanan darat. Jenis perikanan darat adalah perairan umum, tambak, kolam, keramba dan budidaya pantai/laut. Pada sektor perikanan, jenis perikanan darat masih menjadi yang utama yakni dari jenis budidaya pantai yang mengalami pertumbuhan jumlah produksi dari tahun ke tahun. Selain budidaya

pantai, jenis perikanan darat yang mengalami pertumbuhan jumlah produksi adalah dari tambak dan kolam. Sementara itu, produksi perikanan laut juga mengalami pertumbuhan pertumbuhan yang fluktuatif. Wilayah dengan perikanan laut yang dominan adalah Kota Tarakan. Sedangkan wilayah dengan produksi perikanan darat yang dominan adalah Kabupaten Nunukan, yakni dari sektor budidaya pantai.

**Tabel 4.33**  
**Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2015**

Kabupaten/Kota Regency/City	Perikanan Laut Marine Fisheries		Perairan Umum Inland Water		Jumlah		Total	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kabupaten/Regency</b>								
1. Malinau	-	-	319,60	291,70	319,60	291,70		
2. Bulungan	5 013,00	5 075,00	352,00	358,70	5 365,00	5 433,70		
3. Tana Tidung	708,00	320,40	262,10	162,00	970,10	482,40		
4. Nunukan	4 250,79	4 301,80	134,30	136,90	4 385,09	4 438,70		
<b>Kota/City</b>								
1. Tarakan	4 324,30	5 018,40	-	-				
<b>Kalimantan Utara</b>	<b>14 296,09</b>	<b>14 715,60</b>	<b>1 068,00</b>	<b>949,30</b>	<b>11 039,79</b>	<b>10 646,50</b>		

Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka 2016

**Tabel 4.34**  
**Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2015**

Kabupaten/Kota Regency/City	Budidaya Laut Marine Culture	Tambak Brackish Water Pond	Kolam Fresh Water Pond	Keramba Cage	Jaring Apung Floating Cage Net	Sawah Paddy Field	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Kabupaten/Regency</b>							
1. Malinau	0	0	1 099	0	0	0	1 099
2. Bulungan							
3. Tana Tidung	0	1 066	303	0	0	0	1 369
4. Nunukan	2 690	261	633	5	0	106	3 695
<b>Kota/City</b>							
1. Tarakan							
<b>Kalimantan Utara</b>	<b>2 690</b>	<b>1 327</b>	<b>2 035</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>6 163</b>

Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka 2016

#### 4.5.4. Sektor Industri

Pemerintah pusat telah menetapkan industri unggulan di Provinsi Kalimantan Utara adalah kakao. Jika dibandingkan dengan data perkebunan yang ada, komoditas kakao dan karet memang memiliki jumlah produksi yang tinggi. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah. berdasarkan data, industri di bidang agro dan hasil hutan masih lebih kecil dibandingkan dengan industri logam, mesin, elektronika, dan aneka industri. Oleh karena itu, pengembangan industri agro perlu lebih dimaksimalkan. Produk unggulan UMKM di provinsi ini, antara lain meubel rotan, anyaman bambu, anyaman rotan, anyaman manik-manik, kue dan roti, bubuk kopi, pengolahan logam, pembuatan kapal, pengolahan rumput laut, minyak atsiri, beras Adan, ikan teri, udang kering, kerupuk durian, amplang, dan batik.

**Tabel 4.35**  
**Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2015**

Klasifikasi Industri <i>Industrial Classification</i>		Perusahaan <i>Establishment</i>	Tenaga Kerja <i>Employee</i>
(1)		(2)	(3)
10, 11	Makanan dan Minuman/ <i>Food and Beverage</i>	68	20 090
13, 14, 15	Tekstil dan Kulit/ <i>Textile and Leather</i>	3	398
16	Kayu-kayuan/ <i>Various woods</i>	13	13 444
17, 18	Percetakan/ <i>Printing</i>	5	337
20-22	Kimia, Plastik dan Karet/ <i>Chemicals, Plastics and Rubber</i>	10	3 652
23-27	Barang Non Logam, Logam Dasar dan Barang dari Logam/ <i>Manufactures of Non Metals, Base Metals and Metals</i>	21	890
28-33	Mesin dan Peralatan, Alat angkutan, Furniture dan Pengolahan lainnya/ <i>Machinery and equipment, transportation equipment, furniture and other processing</i>	12	1 411
Kalimantan Utara*)		132	40 222

Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka 2016

#### 4.5.5. Sektor Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi perekonomian wilayah. Eksistensinya mampu menjadi generator sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan penyedia akomodasi. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sektor pariwisata turut berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian wilayah adalah melalui besar jumlah kunjungan maupun jumlah wisatawan, serta kontribusinya terhadap PDRB.

Pola pergerakan wisatawan yang menggunakan jalur udara, yaitu melalui: (a) Jakarta-Balikpapan-Tarakan; (b) Yogyakarta-Balikpapan-Tarakan; dan (c) Jakarta-Makassar-Balikpapan-Tarakan. Untuk jalur laut, telah dilengkapi dengan pelabuhan utama yaitu di Pelabuhan Tarakan (Kota Tarakan) dan Pelabuhan Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan). Daya tarik wisata di Provinsi Kalimantan Utara, antara lain:

- a. Daya tarik wisata *Heart of Borneo (HoB)*.  
*Heart of Borneo* merupakan keunikan untuk menunjukkan keberadaan hutan primer terluas dan tertua di dunia, yaitu di jantung Kalimantan.
- b. Daya tarik wisata kawasan perkotaan Tarakan-Tanjung Selor.  
Tarakan dikenal dengan minyak dan sejarah pendudukan bangsa asing, Bulungan merupakan salah satu kerajaan di Kalimantan Utara.
- c. Daya tarik wisata kawasan pesisir kepulauan (Nunukan, Bulungan Kepulauan, dan Tana Tidung Kepulauan)

Nunukan, Bulungan Kepulauan dan Tana Tidung Kepulauan merupakan wilayah dengan potensi wisata yang beragam mulai dari pantai sampai dengan hutan hujan tropis.

- d. Daya tarik wisata kawasan pedalaman (pedalaman Bulungan dan Tana Tidung)

Daya tarik pariwisata ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu daya tarik wisata berbasis alam, wisata berbasis sejarah dan budaya, serta wisata berbasis kehidupan masyarakat yang lebih dominan.

- e. Kawasan Perbatasan Negara

Kawasan pengembangan pariwisata perbatasan negara yang ada di Kalimantan Utara, meliputi daerah perbatasan Malinau yang berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia Timur). Dalam pengembangan wisata di kawasan ini, didominasi variasi wisata kehidupan masyarakat dan wisata berbasis alam.

Adapun destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Pantai Amal, Wana Wisata Persemaian, Hutan Mangrove Tarakan, Air Terjun Martin Billa, Sungai Nyamuk, Long Bawan (Krayan), Gunung Rian, Batu Mapan, Hutan Lindung Sungai Sesayap, Pantai Kuning/Taman Laut Karang Tigau, Eks Kerajaan Bulungan.

#### **4.5.6. Energi Sumber Daya Mineral**

Indikator bidang energi dan sumberdaya mineral menurut Permendagri No. 54 tahun 2010 meliputi: 1) penambangan tanpa ijin dan 2) kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Indikator penambangan tanpa ijin yang tersedia adalah batubara, dimana data penambangan tanpa ijin diolah dari Kabupaten

Bulungan, Malinau dan Kota Tarakan dari tahun 2008 hingga 2013. Indikator penambangan tanpa ijin merupakan perbandingan antara area penambangan tanpa ijin yang dapat ditertibkan dengan seluruh area penambangan tanpa ijin total dikalikan 100 persen. Data penambangan tanpa ijin masih menggunakan data yang ada untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2014. Dari gambar dibawah terlihat adanya peningkatan aktivitas penambangan tanpa ijin pada tahun 2009, 2011, dan 2013 yang terjadi di ketiga kabupaten tersebut, sedangkan tahun 2010 hingga tahun 2012 terjadi penurunan penambangan tanpa ijin.

Akibat aktivitas pertambangan tanpa ijin ini akan meninggalkan permasalahan seperti: 1) kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan yang berdampak terhadap kehidupan flora dan fauna, karena penambangan tanpa ijin tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan mereka tidak bisa melakukan reklamasi area pertambangan; 2) meluasnya area penambangan tanpa ijin yang tidak bisa ditertibkan; 3) terbentuknya air asam akibat pembuangan limbah sedimen yang banyak mengandung sulfur/H<sub>2</sub>S yang akan berpengaruh terhadap air tanah dan air permukaan; 4) kerusakan infrastruktur jalan akibat pengangkutan batubara yang melebihi kapasitas muatan; 5) peningkatan penambangan tanpa ijin akibat permintaan batubara dunia untuk kepentingan industri meningkat, sehingga harus ada regulasi dalam lapangan kerja terkait dengan penambangan batubara tanpa ijin.

**Tabel 4.36**  
**Produksi Batu Bara Provinsi Kalimantan Utara (ton)**  
**Tahun 2010 - 2014**

Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014
Bulungan	3.387.417,88	4.110.487,86	9.379.123,00	9.713.810,71	9.769.517,00
Malinau	1.894.757,43	2.140.267,30	2.443.766,77	3.065.207,57	4.027.947,84
Nunukan	3.416.828,18	3.447.153,00	4.128.165,00	5.197.029,00	10.723.578,00
Tana Tidung	4.928.213,43	4.309.850,60	4.011.397,13	5.335.291,31	6.373.284,31
Tarakan	-	-	-	-	-
KALTARA BPS	13.627.216,92	14.007.758,76	19.962.451,90	23.311.338,59	30.894.327,15
KALTARA ESDM	8.703.910,82	14.010.928,76	19.776.259,90	23.311.338,59	17.842.442,00

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016 -2021

Produksi batu bara di Provinsi Kalimantan Utara diolah melalui data yang diperoleh dari GPS meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka tahun 2010 – 2014. Terdapat peningkatan produksi batubara di Kabupaten Bulungan tahun 2010 – 2011 walaupun tidak signifikan diantara tahun 2010 – 2011 dan tahun 2012 – 2014. Tahun 2012 baru terlihat peningkatan yang signifikan. Di kabupaten Nunukan setiap tahun mengalami peningkatan jumlah produksi tetapi peningkatan yang sangat signifikan terjadi tahun 2014 yang mencapai 10 juta metrik ton yang sebelumnya hanya mencapai 5 juta metrik ton. Penurunan jumlah produksi batubara selama kurun waktu tahun 2010 – 2014 hanya terjadi di Kabupaten Tana Tidung yang terjadi tahun 2010 – 2012 walaupun penurunan jumlahnya tidak banyak. Tetapi tahun berikutnya produksi batubara Tana Tidung kembali mengalami peningkatan.

Secara umum dalam lingkup Provinsi Kalimantan Utara, produksi batubara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2010 – 2014. Peningkatan produksi batubara di Kalimantan Utara ini selama kurun waktu tersebut memberikan pengaruh pada kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di PDRB provinsi yang berkisar dari 30,33 persen - 31,99 persen.

Permasalahan yang diperkirakan timbul kedepannya adalah akibat dari disahkannya Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni pengawasan perizinan pertambangan yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Sehingga pemerintah kabupaten/kota sudah tidak memiliki lagi hak untuk mengeluarkan izin dan mengawasi usaha pertambangan. Hal ini telah diantisipasi dengan keputusan Kementerian ESDM yang mengeluarkan surat kepada setiap Dinas ESDM Provinsi untuk mengirimkan personelnnya untuk dijadikan inspektur pertambangan untuk dilatih dan akan ditugaskan di kabupaten/kota asal mereka untuk mengawasi ijin usaha pertambangan.

Produksi minyak bumi di Provinsi Kalimantan Utara yang diolah dari data yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan dari tahun 2008 hingga tahun 2015. Pada tabel dibawah dapat dilihat produksi minyak bumi di Provinsi Kalimantan Utara mengalami kecenderungan meningkat sampai dengan tahun 2012 kemudian menurun pada tahun berikutnya. Hal ini diperkirakan disebabkan karena 1) Harga minyak dunia yang sedang turun; 2) biaya eksploitasi atau eksplorasi yang mahal; 3) regulasi peraturan yang membahas penambahan sumur produksi yang kaitannya dengan perizinan perubahan fungsi lahan yang sangat lama. Kemudian setelah 2 tahun mengalami penurunan, pada tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah produksi minyak bumi walaupun tidak terlalu signifikan.

Sedangkan untuk produksi gas bumi yang diolah dari data BPS yakni Daerah Dalam Angka di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan dari tahun 2008 hingga tahun 2015. Sedangkan data tahun 2015 diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Produksi gas bumi di

Kalimantan Utara dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 cenderung mengalami fluktuasi. Peningkatan jumlah produksi terjadi pada tahun 2009, 2012, dan 2014. Pada tahun 2010 ke 2011 terlihat mengalami penurunan walaupun setiap tahunnya tidak banyak. Pada tahun 2013 dan 2015 produksi gas bumi di Kalimantan Utara juga mengalami penurunan yang pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan.

**Tabel 4.37**  
**Produksi Minyak Bumi Provinsi Kalimantan Utara (Barrel)**  
**Tahun 2010 - 2014**

Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bulungan	1.487.495,00	1.871.628,00	2.661.569,00	2.156.429,00	2.186.648,00	1.590.838,21
Malinau						
Nunukan	704.788,00	776.960,00	834.416,00	585.912,00	455.570,00	480.509,86
Tana Tidung						916.305,45
Tarakan	982,00	962,00	1.307.000,00	1.057.000,00		5.992,89
KALTARA BPS	2.193.265,00	2.649.550,00	4.802.985,00	3.799.341,00	2.642.218,00	
KALTARA ESDM						2.993.646,41

**Tabel 4.38**  
**Produksi Gas Bumi Provinsi Kalimantan Utara (MMSCF)**  
**Tahun 2010 - 2014**

Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bulungan	1.260.708,34		1.837.860,00	3.199.711,00	3.855.701,00	1.715.563,95
Malinau						
Nunukan			4.128.000,00		435.510,00	763.851,98
Tana Tidung						
Tarakan	1.969.000,00	1.722.000,00	1.043.000,00	202,00		393.178,16
KALTARA BPS	3.229.708,34	1.722.000,00	7.008.860,00	3.199.913,00	4.291.211,00	
KALTARA ESDM						2.872.594,09

Terkait dengan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan seperti air yang berada di bawah galian tambang akan menjadi asam, kemudian terjadinya erosi dan sedimentasi, banjir serta pencemaran lingkungan lainnya dapat diantisipasi dengan setiap perusahaan tambang memiliki rencana reklamasi. Dalam hal ini reklamasi berarti mengembalikan

daerah galian menjadi seperti semula saat sebelum dilakukannya aktivitas penambangan. Jika sebelumnya hutan maka reklamasi dilakukan dengan upaya reboisasi, penanaman bibit pohon. Tetapi terkadang perusahaan penambangan tersebut terkesan lepas tangan setelah melakukan penanaman bibit tersebut dan tidak bertanggungjawab setelahnya. Maka diperlukan pengawasan yang berlanjut dari pemerintah agar area pertambangan bisa asri seperti sebelumnya saat belum dilakukan aktivitas penambangan. Berikut ini daftar perusahaan yang mempunyai maupun yang telah melakukan reklamasi daerah pertambangannya di Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu tahun 2010 – 2015.

## BAB V

### KONDISI DAN POTENSISIDaPROVINSI KALIMANTAN UTARA

#### 5.1. Kondisi Eksisting SIDA Provinsi Kalimantan Utara

##### 5.1.1. Penetapan Komoditas Unggulan Daerah

Dari identifikasi potensi daerah yang diperoleh dari data sekunder sebagaimana dijelaskan pada Bab II sebelumnya, maka komoditas unggulan dari masing-masing Kota/Kabupaten di wilayah Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Daftar Komoditas Unggulan Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Utara**

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Komoditas Unggulan Berbasis Agro</b>	<b>Komoditas Unggulan Berbasis Non-Agro</b>
<b>1</b>	Bulungan	Padi, Kakao, Pisang, Durian, Ikan,	Minyak Bumi, Gas bumi, Timah Hitam, Batubara
<b>2</b>	Malinau	Kakao, Hutan, Sapi,	
<b>3</b>	Nunukan	Kakao, Ikan	Batubara, Minyak Bumi, Gas Bumi
<b>4</b>	Tanah Tidung	Kakao, Padi, Durian, Ikan Kakap, Ikan Bawal, Sapi, Kelapa Sawit	
<b>5</b>	Tarakan	Ikan	Minyak Bumi, Gas Bumi, Jasa dan Perdagangan

Sumber : Diolah

Untuk mempertegas pemilihan produk/komoditas yang digunakan sebagai basis pengembangan kompetensi inti industri daerah dapat dilakukan penilaian

skoring terhadap komoditas/produk berdasarkan kriteria-kriteria Beberapa kriteria mengenai komoditas/produk unggulan antara lain (Alkadri et al, 2001) :

1. Ketersediaan dan komonitas bahan baku
2. Potensi dasar : yaitu komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya dan kualitas pelayanan.
3. Penyerapan tenaga kerja: yaitu mampu menyerap tenaga kerja secara optimal sesuei dengan skala produksinya.
4. Kemampuan menjadi penggerak utama (primer mover) pembangunan perekonomian serta mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat. Komoditas unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan dan pengeluaran.
5. Kontribusi terhadap perekonomian daerah, perhatian pemerintah daerah umumnya akan terfokus pada komoditas yang memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Komoditas yang memberikan kontribusi lebih besar biasahnya akan mendapatkan fasilitas-fasilitas bantuan baik teknis maupun non teknis sehingga dapat bertumbuh kembang dengan baik.
6. Dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan di lapangan
7. Nilai tambah ekonomis: nilai tambah komoditi hanya bisa diciptakan jika komoditi tersebut mampu diolah menjadi produk yang diperlukan konsumen.

8. Kesiapan dan kesediaan stakeholder, yaitu masyarakat, pelaku usaha pemerintah.
9. Penguasaan teknologi: penguasaan teknologi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi baik teknis maupun ekonomis, komoditas unggulan juga harus memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.
10. Prestise daerah, prestise daerah diperlukan untuk faktor jika ada keunikan dan sulit ditiru pesaing, dan jika produk tersebut dapat membawa nama daerah untuk lebih terkenal.

Penetapan produk/komoditas unggulan fokus dilakukan dengan menggunakan teknik scoring dengan menetapkan skala penilaian untuk setiap kriteria. Bobot kriteria dianggap sama untuk setiap kriteria mengingat bahwa kesepuluh kriteria memiliki kontribusi yang sama besarnya.

#### **5.1.2. Kebijakan dan Regulasi Daerah**

Sistem inovasi daerah (SIDa) Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan mengacu pada Keputusan Bersama Menristek No. 3 Tahun 2012 dan Mendagri No. 36 Tahun 2012. Penyusunan ini dilakukan untuk mengembangkan ekonomi wilayah dengan mendorong para *stakeholders* sebagai aktor yang berkerjasama dalam melakukan pengembangan. Selain itu, dengan disusunnya SIDa diharapkan pertumbuhan ekonomi regional dapat tumbuh berkembang dengan didukung oleh kekuatan daya saing produk lokal. Pertumbuhan ekonomi regional kini merupakan aspek yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca penerapan otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004, yang kini diperbarui dalam UU No. 23 Tahun 2014.

SIDa merupakan sebuah sistem yang mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan inovasi dengan cara menampilkan kondisi nyata daerah berdasarkan potensi dan masalahnya. Selanjutnya, kondisi nyata ini diintegrasikan pada Rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021. Dalam dokumen tersebut pembangunan Provinsi Kalimantan Utara menjadikan Perwujudan peningkatan perekonomian rakyat yang berkelanjutan akan diawali dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (*green economy*) dan meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah secara keseluruhan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (*green economy*) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dimaknai sebagai upaya mengakselerasi kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan optimalisasi sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, kepariwisataan dan pertambangan disertai pertumbuhan arus perdagangan dan jasa dalam skala regional maupun internasional. Akselerasi ini juga mengintegrasikan infrastruktur, transportasi, teknologi informasi, dan tata ruang. Sektor-sektorstrategis di Provinsi Kalimantan Utara juga dipadukan dalam sebuah wawasan lingkungan hidup sebagai sebuah perhatian pemerintah terhadap kelestarian sumber daya alam. Berdasarkan rancangan pembangunan ini, maka SIDa Provinsi Kalimantan Utara akan memfokuskan pembangunannya pada sektor-sektor strategis sebagai basis pengembangan inovasi daerah Provinsi Kalimantan Utara

Gambaran tersebut diatas, diimplementasikan dalam bentuk regulasi dan kebijakan sangat signifikan dalam menguatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui regulasi dan kebijakan yang tepat sasaran, secara otomatis iklim investasi dapat tumbuh. Tidak hanya itu, regulasi dan kebijakan merupakan bentuk artikulasi dari pemerintah untuk mengimplementasikan rancangan pembangunan daerah yang telah diterapkan secara jangka panjang dan menengah.

Jika diketahui suatu daerah mengalami kemacetan dalam pertumbuhan ekonominya, maka dimungkinkan ada beberapa peraturan daerah dan kebijakan pemerintah yang menghambat hal tersebut. Kebijakan yang bisa dianggap bermasalah dalam wilayah pertumbuhan ekonomi menurut Kepala Biro Hukum Kemendagri, Sigit Pudjianto, ialah peraturan pemerintah daerah yang berpotensi menimbulkan konflik masyarakat atau bersifat diskriminatif dan menghambat investasi di daerah (cnnindonesia.com 5/05/2017)

Di Provinsi Kalimantan Utara, beberapa regulasi dipandang cukup memiliki potensi untuk mendukung embrio SIDA agar lebih berkembang. Beberapa regulasi lain, yang menjeadi kewenangan Kabupaten/Kota seperti izin investasi telah diatur dan tidak terbukti tidak memunculkan masalah yang kontra produktif. Evaluasi Kemendagri terhadap peraturan daerah yang bermasalah pada beberapa waktu lalu tidak menyebutkan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara yang bermasalah.

Berikut merupakan pemetaan regulasi daerah yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara, khususnya yang mendukung prioritas pada sektor-sektor strategis:

**Tabel 5.2**  
**Regulasi Daerah Pendukung Inovasi Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Utara**

<b>No.</b>	<b>Nomor Peraturan Daerah</b>	<b>Perihal</b>
1.	Nomor 1 Tahun 2016	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025.
2.	Nomor 2 Tahun 2016	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025.
3.	Nomor 3 Tahun 2016	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.	Nomor 4 Tahun 2016	Pajak Daerah

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan pada tabel diatas didapatkan 4 peraturan daerah yang fundamental dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan inovasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan aturan tersebut merupakan sebuah potensi awal yang dapat menjustifikasi keberadaan sektor prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Akan tetapi apabila tidak ada pemetaan yang baik dalam mengamati potensi tersebut, maka dimungkinkan setiap regulasi berdiri tanpa adanya hubungan dengan regulasi lainnya.

Potensi pengembangan SIDA yang berasal dari aspek perundang-undangan daerah akan menjadi nilai positif bagi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Walaupun demikian, Peraturan daerah ini didukung oleh beberapa kebijakan yang menguatkan potensi inovasi pemerintah dalam sektor jasa dan

perdagangan. Salah satunya adalah implementasi gagasan e government. Pembahasan keduanya lebih lanjut akan diarahkan pada bab selanjutnya. Kedua konsep baru mengenai rancangan kota ini sudah umum diketahui sebagai upaya untuk membangun kota dengan memaksimalkan TIK dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sehingga, SIDA Provinsi Kalimantan Utara yang akan memprioritaskan sektor jasa akan diintegrasikan dalam kebijakan kota pintar dan hijau.

Akan tetapi beberapa permasalahan dalam lingkup kebijakan masih dinilai negatif dan perlu adanya evaluasi dari pemerintah. Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi Kalimantan Utara yang masih mendapat predikat C. Predikat ini lekat kaitannya dengan perumusan RPJMD yang telah dilakukan oleh pemerintah. Biasanya sinkronisasi antara visi misi, arah kebijakan, hingga kegiatan pemerintah perlu dilakukan ulang untuk dapat meningkatkan predikat nilai yang diraih.

Belum adanya regulasi mengenai Hak atas KeI juga merupakan nilai negatif. HKI dan penanaman modal bisa digunakan sebagai penguat terhadap sektor strategis di Provinsi Kalimantan Utara. Setidaknya melalui HKI pemerintah dapat memberikan fasilitas terhadap jaminan pengakuan hukum terhadap orisinalitas sebuah produk.

Peta dalam aspek regulasi dan kebijakan di Provinsi Kalimantan Utara memiliki kesimpulan bahwa adanya potensi yang mendukung inovasi dalam kedua aspek ini, meskipun juga diikuti oleh beberapa permasalahan. Maka pentingnya menyusun integrasi antara regulasi dengan variabel dan urusan lain menjadi penting untuk dilakukan guna menjadikan potensi sebagai langkah

jangka panjang. Perumusan solusi terhadap permasalahan akan dilakukan dalam tahap rancangan strategi dan arah kebijakan pada pembahasan berikutnya.

### **5.1.3. Gambaran Awal Infrastruktur Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara**

Sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2014-2019 bahwa Provinsi Kalimantan Utara memfokuskan pengembangan sektor jasa dan perdagangan sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Karena itu, Sektor jasa dan perdagangan dipilih sebagai fokus utama dalam Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun berikut merupakan alasan yang mendukung penguatan sektor jasa dan Perdagangan:

1. Misi pembangunan jangka panjang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2006-2025
2. Misi ke 1 dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016 - 2021 yaitu Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan **melalui** peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (*green economy*).
3. Peta potensi kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan sektor sektor pertanian, perikanan, pertambangan dan pariwisata yang ditopang oleh jasa dan perdagangan.
4. Peta potensi infrastruktur inovasi layanan pemerintahan yang terkait dengan sektor pertanian, perikanan, pertambangan dan pariwisata yang ditopang oleh jasa dan perdagangan.

5. Potensi infrastruktur pendukung sektor pertanian, perikanan, pertambangan dan pariwisata yang ditopang oleh jasa dan perdagangan.

Berdasarkan alasan tersebut, maka diperoleh kesimpulan awal bahwa sektor strategis Provinsi Kalimantan seperti pertanian dalam arti luas, perikanan, pariwisata dan pertambangan yang ditopang oleh sektor jasa dan perdagangan menjadi fokusnya. Sektor tersebut menjadi prioritas di Provinsi Kalimantan Utara, mengingat adanya beberapa faktor unggulan dalam wilayah infrastruktur daerah yang akan menunjang keberadaan sektor jasa secara kualitatif dan kuantitatif, sebagaimana berikut:

a. **Lokasi Strategis**

Provinsi Kalimantan Utara dilalui oleh jalur laut utama menuju Malaysia dan negara pasifik lainnya . Karena itu, Provinsi Kalimantan Utara berada di wilayah lalu lintas perdangan yang menjadi denyut nadi perekonomian Kalimantan Utara. Terlebih lagi, terletak berada nyaris di tengah-tengah lalu lintas tersebut jika yang menjadi titik acuan antara Indonesia dan Malaysia

Jika dianalisa, wilayah Provinsi Kalimantan Utara merupakan lokasi strategis untuk pengembangan usaha jasa dan perdagangan. Hal ini dikarenakan wilayahnya yang tidak terlalu luas, namun berada di lokasi strategis aktivitas perekonomian. Pengembangan usaha jasa dan perdagangan dalam potensi kewilayahan ini harus ditingkatkan sebagaimana kebutuhan yang diinginkan oleh pelaku ekonomi dan rancangan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

Beberapa potensi yang dapat diunggulkan dari potensi wilayah ini adalah dapat meningkatkan pendapatan usaha jasa restoran, penginapan, wisata, bisnis,

dan usaha rumah tangga. Peningkatan sektor jasa tersebut dapat ditunjang melalui keberadaan sentra oleh-oleh, UKM, dan wilayah hiburan yang mudah diakses.

Potensi diatas harus dapat dimaksimalkan dengan baik melalui keberadaan infrastruktur yang menunjang. Selama ini, beberapa infrastruktur telah ada dan digunakan dengan baik untuk mempromosikan unggulan daerah, seperti misalnya petunjuk lokasi wisata, sentra oleh-oleh, dan keberadaan tempat penginapan yang mudah dijangkau. Evaluasinya, beberapa kerusakan jalan di beberapa titik penghubung antara Jalan Daendles dengan lokasi yang dimaksud masih perlu diperbaiki, sebab akan menghambat potensi yang sudah ada.

**b. Potensi perindustrian, perdagangan, dan pasar**

Sebagai kota jasa, Provinsi Kalimantan Utara memiliki industri yang menunjang keberadaan sektor strategis, salah satunya adalah keberadaan industri tambang. Keberadaan industri berskala besar ini juga diharapkan dapat memperpendek jarak rantai produksi. Sehingga, melalui hal ini efisiensi ekonomi dapat diusahakan dengan maksimal.

Di Provinsi Kalimantan Utara juga terdapat Perusahaan Jasa transportasi yang menunjang keberadaan sektor jasa. Dimana pada wilayah ini yang mendapatkan dampak positif adalah sektor jasa transportasi yang terpusat di wilayah Pelabuhan dan Bandar Udara di Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

Pada wilayah perdagangan dan pasar, Provinsi Kalimantan Utara memiliki Pasar yang tersebar di masing-masing kabupaten/Kota. Pasar ini merupakan jantung perekonomian dari masyarakat. Dimana setiap harinya selalu dipadati

oleh pengunjung yang datang baik dari dalam ataupun luar kota. Di wilayah ini, juga selain terdapat pasar tradisional, juga terdapat pusat perbelanjaan modern *mall* dan pusat pertokoan.

c. **Pelabuhan dan Bandara**

Provinsi Kalimantan Utara memiliki pelabuhan dan Bandara yang terletak di tarakan dan nunukan. Keberadaan pelabuhan merupakan salah satu sarana infrastruktur yang di dalamnya terdapat aktivitas sektor jasa dan perdagangan. Dengan demikian, selain dapat menjadi sarana akses terhadap roda perekonomian, Provinsi Kalimantan Utara juga dapat berinvestasi dalam bentuk penawaran jasa pada kegiatan ekonomi yang berlangsung.

d. **Wisata dan Sektor Hiburan**

Keberadaan fasilitas wisata di Provinsi Kalimantan Utara menjadi potensi untuk meningkatkan sektor jasa di Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan infrastruktur wisata ini dapat mengembangkan jenis jasa selain jasa hiburan, juga dapat meningkatkan jasa industri dalam skala mikro. Adapun pengembangan dalam wilayah sektor jasa wisata dapat diintegrasikan antara satu dengan yang lain. Integrasi dapat dilakukan dengan mendorong adanya paket wisata. Paket ini biasanya seringkali dimiliki oleh pemilik jasa *tour and travel* untuk menarik minat pengunjung menjelajahi keunikan wisata suatu wilayah.

#### **5.1.4. Kapasitas Lembaga**

##### **a. Kapasitas Birokrasi terkait SIDA**

Pemerintah daerah merupakan instansi penyelenggara layanan publik pada skala lokal yang memiliki wewenang sebagaimana telah diatur dalam UU 23 tahun 2014. Sebagai otoritas penyelenggara layanan, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat pada di tingkat daerah. Pelayanan yang optimal dengan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi satu prioritas untuk menumbuhkan legitimasi masyarakat kepada negara secara politik. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki komitmen terhadap inovasi layanan publik salah satunya dengan menyusun SIDA Provinsi Kalimantan Utara.

Inovasi sebagai sebuah sistem diperkuat oleh beberapa indikator salah satunya adalah kualitas birokrasi yang baik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sendiri saat ini memiliki sumber daya aparatur dengan kualitas yang terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meraih penghargaan Tanda Kehormatan Satya Karya Bhakti Praja Nugraha pada tahun 2016 oleh Kemendagri. Dengan adanya penghargaan ini menjadi satu bukti yang menunjukkan ada potensi baik dalam kinerja Pemerintah provinsi Kalimantan Utara.

Akan tetapi, evaluasi perlu dilakukan karena nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Utara yang masih mendapatkan predikat C. Peningkatan nilai perlu

diupayakan sebab penilaian SAKIP dititikberatkan pada korelasi dan sinergitas dalam arah pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, beberapa program yang tidak menunjukkan progress sebagaimana ditunjukkan pada LKPJ Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015 membuktikan bahwa adanya aktualisasi kinerja yang belum maksimal.

Tak hanya itu, berdasarkan hasil FGD juga diungkapkan adanya ketidakselarasan ide antar SKPD yang membuat inovasi tidak berjalan searah. Pun demikian halnya dengan ego sektoral yang masih begitu kuat di tataran birokrasi. Ini membuat tujuan makro yang ingin dicapai tidak bisa maksimal. Karena ego sektoral hanya berorientasi pada keberhasilan satu institusi tanpa mengindahkan kebaikan bersama.

Atas dasar laporan-laporan mengenai kondisi kinerja birokrasi tersebut dapat ditarik garis besar bahwa perlu adanya peningkatan kapasitas kinerja aparatur yang berlanjut. Hal ini menjadi penting sebab ketersediaan aparatur yang dapat melaksanakan kerja sesuai target dan profesional ditengarai menjadi satu instrumen penting dalam membentuk budaya inovatif. Meskipun demikian, keberadaan instrumen aparatur juga harus diikuti dengan aspek institusi kelembagaan pemerintah yang kuat. Memperhatikan hal tersebut maka perlu untuk dikaitkan mengenai alokasi anggaran yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Menurut hasil LKPJ 2015 disebutkan bahwa alokasi alokasi anggaran Belanja Langsung untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp453.693.374.192,92 terdiri dari Belanja Langsung untuk Urusan Wajib sebesar

Rp419.554.915.596,92 atau 92,48% dan Belanja Langsung untuk Urusan Pilihan sebesar Rp34.138.458.596,00 atau 7,52%.

Pada penyelenggaraan Urusan Wajib, lima urusan memperoleh alokasi Belanja Langsung terbesar dengan alokasi berjumlah Rp339.494.423.358,92 atau 80,92% yaitu Urusan Otonomi Daerah (29,25%), Urusan Kesehatan (22,01%), Urusan Pendidikan (16,49%), Urusan Pekerjaan Umum (7,60%), dan Urusan Lingkungan Hidup (5,57%). Sedangkan dari anggaran Belanja Langsung untuk penyelenggaraan Urusan Pilihan sebesar Rp34.138.458.596,00, sebagian terbesar dialokasikan untuk dua urusan, yaitu Urusan Pertanian memperoleh alokasi sebesar Rp16.459.829.400,00 (48,21%) dan Urusan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp10.143.454.211,00 (29,71%).

Evaluasinya, proporsi anggaran belum terprioritaskan secara maksimal. Di Provinsi Kalimantan Utara industri, perdagangan, dan jasa merupakan sektor prioritas yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sayangnya belum ada korelasi yang baik antara proporsi anggaran, jumlah programnya, dan targetnya.

Urusan perdagangan dan jasa secara berdasarkan fokus wewenangnya dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, EnergiMineral, Industri dan Perdagangan. Pada tahun 2015 dialokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.310.654.500,00 dan realisasinya Rp996.027.350,00 atau 30,09%. Rendahnya tingkat penyerapan karena kegiatan revitalisasi pasar tradisional dengan nilai anggaran Rp2.009.076.300,00 tidak direalisasikan belanja modalnya.

## Capaian Indikator Sasaran RPJMD Urusan Perdagangan

Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Capaian 2014	2015			
			Target	Realisasi	% Capaian	%Thd 2014
1	2	3	4	5	6(5:4)	7 (5:3)
<b>Fokus Pelayanan Urusan Pilihan</b>						
1	Ekspor bersih perdagangan (Juta)	95.660.500	107.433	60.602,7	56,41	0,06
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha formal	7.568	7.869	7.948	101,00	105,02
3	Jumlah usaha baru yang terdaftar di sektor usaha perdagangan	452	755	380	50,33	84,07
4	Persentase peningkatan ekspor non migas	-5,25	6,21	5,34	85,99	-101,71
5	Jumlah bantuan timbangan kepada pedagang (unit)	250	50	50	0	0

Sumber: LKPJ Provinsi Kalimantan Utara 2015

Melihat pada realisasi yang belum optimal tersebut, maka bisa menjadikan sebuah evaluasi kritis terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan kualitas kelembagaan birokrasinya.

Sementara itu, pada urusan perencanaan pembangunan diperoleh hasil sebagaimana berikut:

**Capaian Indikator Sasaran RPJMD untuk Urusan Perencanaan  
Pembangunan Tahun 2015**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2014	2015			
			Target	Realisasi	% Capaian	% Thd 2014
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7 (5:3)
<b>Fokus Pelayanan Urusan Wajib</b>						
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJP yang telah ditetapkan dengan perda	Ada	Ada	Ada	100%	100%
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda/perkada	Ada	Ada	Ada	100%	100%
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan perkada	Ada	Ada	Ada	100%	100%
4	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	Ada	Ada	Ada	100%	100%

Sumber: LKPJ Provinsi Kalimantan Utara 2016

Adanya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan tersebut menjadi satu kunci keberhasilan untuk mencapai kualitas birokrasi. Akan tetapi korelasi dan sinergi antar dokumen kiranya perlu dilakukan mengingat dalam

setiap dokumen pembangunan harus memiliki integrasi antara satu dengan yang lainnya.

#### **b. Kerjasama dalam Konteks SIDA**

Secara konseptual kerjasama pemerintah daerah masuk dalam kajian *networking government*. Konsep ini memberikan petunjuk bahwa kerjasama yang dilakukan oleh instansi pemerintah dapat meningkatkan inovasi layanan publik. Misalnya untuk menerapkan kota berbasis layanan *smart city* maka sebuah kota perlu untuk melakukan kerjasama dengan lembaga studi dan penyedia jasa layanan dan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi. Adanya kerjasama secara teknis juga dapat menjadi satu cara untuk memudahkan Daerah Kalimantan Utara menggapai visi dan misinya.

Pada LKPJ Provinsi Kalimantan Utara 2016 dijabarkan mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dari keseluruhannya belum terlihat kerjasama yang dapat menunjang unsur Sistem Inovasi Daerah. Oleh karena itu, dengan adanya sistem inovasi daerah ini Provinsi Kalimantan Utara diharuskan untuk meningkatkan kerjasama dengan melibatkan akademisi dan pengusaha. Kerjasama unsur triple helix ini diharapkan mampu mendorong inovasi pemerintahan khususnya pada sektor prioritas yakni jasa dan perdagangan.

#### **c. Budaya Inovasi**

Perkembangan teknologi saat ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan terobosan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi. Alasannya, pemanfaatan teknologi informasi dapat mengimplementasikan

perkembangan studi tentang inovasi pelayanan publik. Terlebih lagi, melalui teknologi informasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang awalnya saling berjauhan kini dapat dipangkas. Karena beberapa kebermanfaatan ini, banyak pemerintah daerah menggunakan teknologi informasi sebagai penunjang pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan mereka, seperti misalnya pelayanan mengurus izin secara online.

Pengembangan teknologi informasi dapat mendukung Sistem inovasi daerah yang mengintegrasikan potensi dengan rencana pengembangan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan daya beli produk lokal dengan strategi promosi di website pemerintah daerah. Adanya peluang ini harus dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai sebuah sarana untuk mengimplementasikan inovasi di bidang jasa dan perdagangan. Oleh sebab itu, pemerintah yang peka terhadap teknologi membutuhkan satu konstruksi budaya inovatif.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu pemerintah daerah yang kini serius melakukan pengembangan teknologi informasi. Keseriusan ini dibuktikan dengan adanya ketersediaan website yang menunjang pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Utara. Ditambah lagi, dengan adanya gagasan *smart city* dalam penataan wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan layanan website dan gagasan *smart city* menjadi dua faktor kunci yang akan dibahas pada sub bab ini.

#### d. Kondisi Infrastruktur TIK

Berikut merupakan beberapa program inovasi Provinsi Kalimantan Utara yang memanfaatkan unsur teknologi informasi dalam kaitannya dengan SIDA:

**Tabel**Peta Inovasi berbasis TIK Kaitannya dengan SIDA

No.	Nama Inovasi	Penjelasan
1.	SIPATEN	(Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Merupakan aplikasi sistem yang terhubung dengan jaringan dan dapat diakses oleh semua pengguna dengan cakupan sistem komunikasi eksternal, komunikasi internal, disposisi, dan pembuatan surat dengan dilengkapi alur kerja untuk surat masuk, disposisi, dan surat keluar
2.	e-Lapor	Salah satu sistem aplikasi upaya optimalisasi sistem pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat menuju open government
3.	Simaya	Merupakan aplikasi sistem yang terhubung dengan jaringan dan dapat diakses oleh semua pengguna dengan cakupan sistem komunikasi eksternal, komunikasi internal, disposisi, dan pembuatan surat dengan dilengkapi alur kerja untuk surat masuk, disposisi, dan surat keluar
4.	Website PD	Merupakan website yang menyediakan informasi

No.	Nama Inovasi	Penjelasan
		mengenai kegiatan PD.

Sumber: *diolah dari berbagai sumber*

Dengan adanya ketersediaan inovasi berbasis media IT ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara otomatis meningkatkan transparansi layanan pemerintah terhadap masyarakat. Bagi masyarakat, adanya transparansi dari pihak pemerintah melalui website dapat digunakan sebagai sarana untuk menunjang kebutuhan administrasi mereka. Selain kebutuhan administrasi, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya roda birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan ketersediaan ini, Secara teoritis adanya transparansi dan pelayanan berbasis e-Government di Provinsi Kalimantan Utara akan dengan sendirinya meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Ketersediaan e-Government menunjang Sistem Inovasi Daerah yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara. Adanya website pemerintah telah memberikan sumbangsih terhadap perkembangan produk lokal yang dikembangkan oleh masyarakat. Promosi produk lokal tersebut tersedia dalam website induk resmi Provinsi Kalimantan Utara. Hasilnya, aspek daya saing produk lokal di Provinsi Kalimantan Utara dapat berkembang dengan baik. Selain adanya peningkatan daya saing, ketersediaan media informasi ini menunjang kedatangan investor yang ingin berinvestasi dan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun asing ke Provinsi Kalimantan Utara.

Komitmen pengembangan infrastruktur TIK oleh Diskominfo telah dirasa menunjukkan peningkatan yang baik. Catatannya peningkatan ini harus diikuti

dengan dorongan SKPD lain yang turut mensukseskan. Selama ini, kendala ego sektoral masih menjadi salah satu penyebab terhambatnya layanan berbasis IT di Provinsi Kalimantan Utara. Oleh sebab itu, dengan adanya SIDa Diskominfo meminta kepada seluruh institusi pemerintah di Provinsi Kalimantan Utara dapat turut berpartisipasi dalam memanfaatkan dan mempromosikan layanan *e-government*.

Adapun beberapa produk lokal yang memiliki potensi untuk ditingkatkan promosinya adalah:

**Tabel Produk Unggulan Provinsi Kalimantan Utara**

No.	Kabupaten/Kota	Produk Unggulan	Pemasaran
1	Kabupaten Malinau	Meubel Rotan Anyaman Rotan Anyaman bambu, Anyaman pandan Kopi Bubuk Batik Malinau	Kabupaten Malinau dan luar kabupaten
2	Kabupaten Bulungan	Kue dan roti Mie kering dan mie basah Kopi bubuk Tahu dan Tempe Kerupuk dan Amplang Anyaman Manik dan Anyaman Serat Penyulingan Minyak Atsiri Pengolahan Logam Pembuatan Kapal Meubel Kayu Meubel Rotan	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Berau (Kalimantan Timur), Kota Jakarta, Kota Surabaya, Provinsi Bali, Negara Perancis, China, Uni Emirat Arab
3	Kabupaten Nunukan	Beras Adan Olahan Rumput Laut Kerupuk Durian Ikan Teri Udang Kering	Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Malaysia
4	Kabupaten Tana Tidung	Abon Ikan Pari Anyaman Bambu dan Daun Pandan	Di dalam kabupaten Tana Tidung
5	Kota Tarakan	Ikan Asin Tipis Amplang Batik Khas Tarakan	Di dalam dan luar Kota Tarakan

**Sumber:** RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016 - 2021

Beberapa produk lokal diatas merupakan produk yang dipromosikan melalui inovasi dibidang TIK pada website Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Lebih jauh, mengenai produk unggulan daerah secara spesifik akan dibahas pada sub bab berikutnya.

Walaupun beberapa sarana inovasi telah tersedia, namun terdapat kekurangan perlu diperbaiki diantaranya sebagai berikut:

- Minimnya jumlah masyarakat yang mengakses layanan e-Government
- Lemahnya kualitas SDM birokrasi dalam memanfaatkan website sebagai media layanan publik. Ditambah pula dengan ketersediaan SDM yang kompeten di bidang IT masih minim.
- Belum adanya integrasi antara gagasan smart city dengan sektor jasa dalam pengembangan teknologi informasi
- Minimnya ketersediaan sarana informasi mengenai potensi wilayah: kawasan sentra industri, UMKM, pertanian, yang ada di website
- Beberapa website beritanya belum *up to date*

Dari kelima kelemahan ini setidaknya dapat menggambarkan bahwa potensi infrastruktur inovasi belum termaksimalkan dengan baik. Perlunya integrasi antar program pengembangan dan prioritas perlu segera dilakukan selain juga peningkatan kapasitas di level birokrasi dilakukan.

#### **e. Data Penunjang Inovasi**

Provinsi Kalimantan Utara memilih sektor jasa dan perdagangan sebagai fokus utama pengembangan sistem inovasi daerah. Keberadaan fokus ini nantinya akan ditunjang dengan potensi inovasi layanan publik yang telah tersedia sebagaimana dijabarkan diatas dan juga akan dijadikan sebagai unggulan layanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Untuk mengimplementasikan fokus inovasi sektor jasa melalui keunggulan TIK, maka perlu dipaparkan data terkait yang dapat menunjang formulasi ini.

## Tabel Fasilitas Komunikasi Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2015

NO	SARANA KOMUNIKASI	2015
1	Website Daerah	198
2	Perusahaan Pers yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	57
3	Tabloid Daerah/ Majalah (milik Pemerintah)	19
4	Stasiun Radio milik Pemerintah	1
	Stasiun Radio milik Swasta	1
	Stasiun Radio Komunitas	7
5	Stasiun TV Pemerintah	0
	Stasiun TV Swasta	1
6	Rumah Tangga Pelanggan Telepon PSTN	
7	Wartel	0
8	Penduduk Pengguna Telepon Genggam/ HP	
9	Stasiun BTS/Menara Telekomunikasi	43
10	Warnet	73
11	Rumah Tangga Pelanggan Internet	
12	Kampung Cyber	2
13	Area Hotspot di Area Publik yang difasilitasi Pemerintah	12
14	Mobil Siaran Keliling	14

**Sumber :** Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara

Data diatas menunjukkan adanya perkembangan infrastruktur layanan informasi dan komunikasi publik yang ada di Kalimantan Utara. Jumlah peningkatan website daerah merupakan yang cukup signifikan dari tahun 2013 hingga 2015 menjadi sebuah potensi peningkatan inovasi di Provinsi Kalimantan Utara melalui pengembangan TIK.

Adanya peningkatan pada website daerah menjadi potensi Provinsi Kalimantan Utara untuk mempromosikan layanan publik yang ada di daerahnya. Selain layanan, juga dapat di iklankan kegiatan jasa yang menjadi produk unggulan di Provinsi Kalimantan Utara. Lebih dari itu, penggunaan website daerah juga akan meningkatkan daya beli dan kunjungan wisata jika pemerintah menyediakan layanan khusus mengenai kedua hal tersebut. Keberadaan ini juga ditunjang dengan *progress* pada tabloid/majalah milik daerah. Evaluasinya program ini belum berintegrasi dengan sarana inovasi lainnya, sehingga detilnya nampak promosi mengenai sektor wisata dan produk unggulan belum terunggah dengan baik.

Keberadaan kerjasama daerah dengan perusahaan pers yang meningkat patut untuk dikembangkan lagi. Mengingat sarana ini sebagai ajang interaksi pemerintah dengan masyarakat. Kedepannya promosi mengenai keunggulan dan inovasi daerah harus menjadi agenda prioritas dalam setiap kerjasama yang dilakukan. Dengan adanya sosialisasi ini, maka masyarakat akan lebih tahu. Dan lebih jauh diharapkan dapat berorientasi kerja secara integratif dengan pemerintah setelah mengetahui informasi.

Pada tataran masyarakat, perkembangan jumlah penggunaan telepon genggam yang meningkat pesat harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah

dalam mengembangkan sistem inovasi. Karena dengan adanya perkembangan ini, maka pola integrasi *smart city* dapat dilakukan dengan mudah. Pemerintah dapat menyebarkan informasi melalui layanan internet dan telepon genggam dengan cepat, begitupula dengan masyarakat yang akan mudah mengakses informasi dari pemerintah. Dengan adanya jumlah pemilik telepon genggam sebenarnya juga menjadi potensi untuk menyerap aspirasi masyarakat yang lebih mudah dan efisien. Bagusnya, ini telah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui aplikasi pengaduan yang telah tersedia.

Untuk menjadi *smart city* dengan pengembangan sistem inovasi yang mengarah pada sektor jasa dan perdagangan, idealnya keberadaan kampung *cyber* dan jumlah area hotspot untuk publik dapat ditingkatkan. Akan tetapi, nampak pada data diatas bahwa keduanya mengalami stagnasi. Keberadaan keduanya juga diharapkan bisa mengembangkan layanan industri sektor jasa dan industri kecil masyarakat. Sebab saat ini keberadaan layanan TIK terbukti mampu meningkatkan usaha kecil masyarakat yang berbasis pada media online.

**f. Budaya Inovasi, e-Government, Inovasi Sektor Jasa dan Perdagangan**

Integrasi yang dilakukan diarahkan untuk mengkoneksikan gagasan e-Government, inovasi sektor jasa, dan perdagangan Provinsi Kalimantan Utara dengan budaya inovasi. Satu cara efektif untuk menghubungkan ketiganya adalah dengan optimalisasi infrastruktur kualitas website daerah dan jaringan internet.

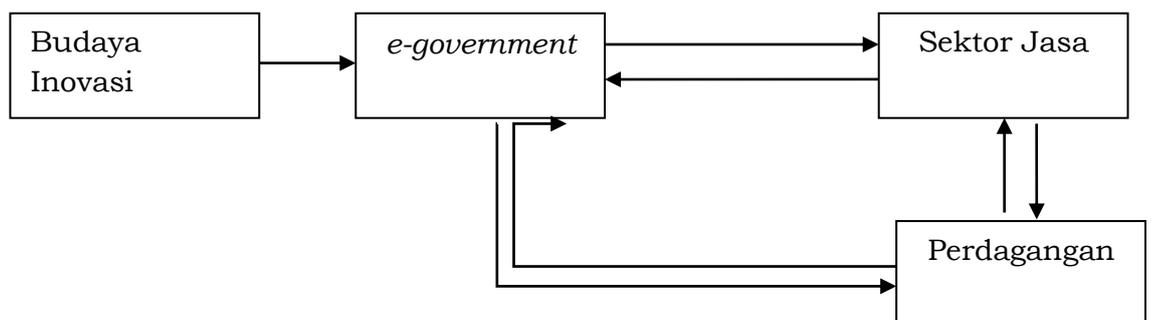
Gagasan Smart City Provinsi Kalimantan Utara harus ditunjang dengan adanya media teknologi informasi yang dikelola oleh para aktor yang mengarah pada masyarakat. Sebagaimana ditampilkan pada data di atas terlihat bahwa

adanya peningkatan dalam infrastruktur teknologi, meski belum maksimal. Ketersediaan media ini akan memungkinkan kegiatan sehari-hari yang efektif, dan efisien. Karena efektifitas dan efisiensi kegiatan ini diharapkan dapat menstabilkan dan menumbuhkan ekonomi pada sektor masyarakat. Jika sudah demikian, maka bukan tidak mungkin aspek daya saing lokal akan meningkat.

Implementasi smart city memungkinkan wilayah kota terjangkau jaringan telepon dan internet. Ketersediaan ini nantinya akan menunjang layanan e-Government yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan layanan publik. Layanan e-Government membuat masyarakat dengan mudah mengurus administrasi mereka tanpa harus membutuhkan waktu dan prosedur yang lama. Adanya layanan ini juga menyediakan pengaduan masyarakat yang direspon secara cepat oleh pemerintah.

Sayangnya, selama ini layanan *e-government* di Provinsi Kalimantan Utara belum maksimal dilakukan. Hal ini menunjukkan tingkat budaya inovasi yang masih belum maksimal di kalangan satuan perangkat dinas. Perlunya kontruksi budaya melalui pembentukan aturan, pengembangan kapasitas, dan perubahan sistem kerja kiranya harus serius untuk dilakukan.

### **Info Grafis Pola Integrasi Budaya Inovasi, E-Government, Inovasi Sektor Jasa Dan Produk Unggulan**



Tak hanya dalam bentuk layanan publik, adanya e-Government juga harus memungkinkan menjadi sebagai sebuah media promosi terhadap produk unggulan masyarakat. Salah satu unsur penting yang harus dipromosikan adalah lokasi-lokasi yang menjual produk unggulan di Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga, para pengunjung Provinsi Kalimantan Utara dapat tertarik untuk membeli produk yang ada.

Smart city dan e-government juga akan dijadikan sebagai media promosi daerah untuk mengkampanyekan wilayah Provinsi Kalimantan Utara terhadap calon investor. Keberadaan layanan ini diminati oleh para investor yang akan melakukan investasi karena mereka merasa mendapat surplus dengan adanya dukungan pemerintah terhadap setiap basis perekonomian yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan adanya integrasi ini maka sistem inovasi daerah yang mengangkat tema mengenai jasa dan lingkungan berkelanjutan dapat dengan mudah diaplikasikan. Keberadaan intergrasi diatas mendukung promosi aksesibilitas infrastruktur Provinsi Kalimantan Utara terhadap sektor jasa dan perdagangan. Sehingga, layanan media inovasi teknologi informasi dapat menunjang infrastruktur sektor jasa dan perdagangan yang telah ada di Provinsi Kalimantan Utara.

#### **g. Perkembangan Kluster**

Perkembangan kluster di Provinsi Kalimantan Utara dilihat melalui perkembangan sektor urusan daerah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sektor prioritas daerah. Selain itu, perkembangan kluster dilakukan juga guna dapat dijadikan bahan analisis dalam melihat disparitas capaian dalam rentang

waktu. Klustresasi di Provinsi Kalimantan Utara tidak digunakan berbasis wilayah karena kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara yang relatif tidak luas.

Kluster jasa, perdagangan, dan industri merupakan sektor yang menarik untuk diperhatikan. Sebabnya ketiga kluster tersebut saling terkait dan berhubungan. Kluster industri merupakan sektor yang dapat mendukung keberadaan kluster jasa dan perdagangan.

Pada data kluster industri dapat dilihat bahwa adanya penyerapan tenaga kerja yang meningkat sejak tahun 2010 hingga tahun 2013. Sebagian besar tenaga kerja di bidang industri bekerja di sub sektor tekstil, barang dan kulit, dan alas kaki. Dimana sub sektor ini mengalami peningkatan yang konsisten sejak tahun 2010 hingga tahun 2013.

Selain itu, pada sektor perdangan dan jasa merupakan sektor yang secara konsisten memberikan sumbangsih pada pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dapat terlihat sejak tahun 2010 sampai 2013 pada data PDRB Provinsi Kalimantan Utara. Dengan adanya hasil ini maka sektor jasa dan perdagangan dapat dirujuk sebagai dua sektor prioritas yang dapat digunakan dalam pengembangan inovasi daerah.

## **BAB VI**

### **TANTANGAN DAN PELUANG SIDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

#### **6.1. Permasalahan Regulasi, Infrastruktur Inovasi, Dan Fasilitas**

##### **Pendukung Terkait SIDA**

Analisis ini merupakan bagian dari tindak lanjut setelah dilakukannya pemetaan. Penjabaran pada analisis menggunakan variabel penelitian yang telah ditetapkan sebagaimana pada bab III, yakni regulasi kebijakan, infrastruktur inovasi, kapasitas IPTEK, budaya inovasi, dan kluster.

##### **6.1.1. Regulasi dan Kebijakan**

Merefleksikan peta awal regulasi dan kebijakan diperoleh gambaran bahwa terdapat potensi yang akan menjadi kekuatan dalam upaya implementasi sistem inovasi daerah. Akan tetapi, dalam gambaran tersebut juga menampakkan beberapa kelemahan yang ada pada kondisi regulasi dan kebijakan saat ini yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berikut merupakan uraian permasalahan regulasi dan kebijakan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara terkait SIDA:

1. Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum masih menjadi sumber permasalahan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Misalnya adalah usaha kos yang tidak berizin dan PKL yang tidak taat aturan di Provinsi Kalimantan Utara menjadi bukti bahwa belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk melaksanakan hukum. Di saat yang sama penegakan aturan daerah belum berjalan optimal, seperti misalnya pelarangan kendaraan

bermuatan berat masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Utara. Kesadaran hukum dan penegakan hukum akan menjadi penting bagi Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan stabilitas perekonomian dan mampu menunjang iklim investasi.

2. Minimnya ketersediaan data yang valid. Selama ini keberadaan data pembangunan daerah yang disediakan oleh BPS dirasa tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
3. Belum adanya regulasi mengenai HKI dan persaingan usaha bisa menjadi penyebab dari belum maksimalnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan HKI diharapkan akan menjamin orisinalitas produk yang muncul dari ide masyarakat. Selain itu, keberadaan regulasi atau kebijakan mengenai persaingan usaha dapat menjadi kekuatan pemerintah untuk membantu usaha masyarakat agar tidak cenderung didominasi atau dimonopoli oleh beberapa pihak.
4. Belum adanya keselarasan ide mengenai pembangunan daerah antara pemerintah daerah dan masyarakat. Misalnya, di Provinsi Kalimantan Utara jasa perhotelan dan rekreasi merupakan sektor yang menyuplai pertumbuhan ekonomi daerah dengan cukup baik. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerbitkan izin hiburan. Pembukaan izin hiburan ini perlu untuk dikomunikasikan dengan warga.

5. Belum adanya hubungan antara regulasi peraturan daerah dengan upaya pencapaian program pemerintah yang bersangkutan menjadi bahan evaluasi yang harus ditindaklanjuti. Keberadaan Perda dan kebijakan idealnya merupakan sebuah pengaturan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target kinerjanya. Akan tetapi, dengan melihat data antara regulasi dan capaian program yang telah dilaksanakan terbukti masih belum adanya korelasi yang signifikan antara keduanya.
6. Masih belum optimalnya sosialisasi peraturan atau hukum daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini perlu untuk dievaluasi mengingat sekarang Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki media TIK sebagai infrastruktur interaksi antara pemerintah dengan masyarakat.

Dari keempat permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlu dioptimalkannya posisi regulasi dan kebijakan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan aturan secara legal dan normatif ternyata belum optimal untuk menunjang keinginan yang diharapkan oleh Pemerintah.

### **6.1.2. Infrastruktur Inovasi**

Saat ini keberadaan inovasi pemerintahan berbasis TIK perlu dilakukan guna memperbaiki kualitas layanan publik. Sebagaimana pada gambaran awal, dipaparkan bahwa infrastruktur inovasi berbasis TIK telah tersedia di Provinsi Kalimantan Utara, salah satunya melalui keberadaan website daerah. Lebih daripada itu, adanya perencanaan berupa gagasan *smart city* menarik untuk

dijadikan sebagai arah dari pembangunan kota yang berkelanjutan. Akan tetapi, permasalahan seperti partisipasi pemanfaatan *e-government* harus menjadi evaluasi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.

1. Lemahnya SDM aparatur pemerintah dalam melaksanakan program inovatif TIK menjadi kendala pelayanan berbasis *e-government*. Lemahnya SDM disebabkan selain minimnya kapasitas aparatur yang ada juga karena minimnya jumlah ketersediaan aparatur yang kompeten sesuai bidang
2. Adanya ego sektoral masing-masing SKPD menyebabkan tujuan bersama sulit untuk dicapai.
3. Minimnya pelayanan inovatif kepada masyarakat sehingga
4. Belum maksimalnya antara gagasan *smart city*, pelayanan berbasis teknologi, sektor jasa, dan produk unggulan daerah.
5. Budaya inovasi yang belum mendukung adanya ketersediaan infrastruktur. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya minat masyarakat dalam dunia *enterpreneurship*
6. Belum maksimalnya keberadaan ruang publik yang ditunjang sarana TIK.

Kelima permasalahan tersebut merupakan kebutuhan mendasar untuk dapat menunjang keberadaan sistem inovasi daerah. Keberadaan infrastruktur TIK yang ditunjang dengan kualitas SDM nantinya akan dihubungkan sebagai sebuah sarana untuk dapat meningkatkan aksesibilitas sektor jasa dan perdagangan.

### **6.1.3. Fasilitas Pendukung**

Keberadaan fasilitas daerah yang terkait dengan SIDA merupakan sarana yang harus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Adanya fasilitas berupa pelabuhan, terminal, dan stasiun menjadi potensi yang dapat menumbuhkan perekonomian regional. Akan tetapi, capaian yang selama ini diperoleh belum dapat maksimal akibat beberapa permasalahan yang belum diatasi. Berikut merupakan permasalahan di wilayah infrastruktur yang terkait dengan SIDA:

1. Belum terintegrasikannya jaringan antar fasilitas pendukung mengancam infrastruktur inovasi tidak berjalan maksimal. Selama ini, potensi tempat pemberhentian alat transportasi, lokasi wisata, dan sentra perdagangan/industri.
2. Belum adanya fasilitas pusat sentra produk lokal menjadikan produk unggulan daerah belum mendapatkan tempat yang pasti untuk diperdagangkan.
3. Belum maksimalnya promosi daerah mengakibatkan kunjungan tamu baik lokal maupun internasional tidak meningkat pesat. Promosi perlu dilakukan dengan menguatkan inovasi yang selama ini telah ada di Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan ketiga permasalahan tersebut terlihat bahwa adanya potensi dalam fasilitas pendukung yang belum termaksimalkan. Selain itu, pembangunan sentra perdagangan produk lokal perlu diupayakan sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menguatkan sektor jasa dan perdagangan.

## **6.2. Identifikasi Solusi Terhadap Permasalahan Regulasi, Infrastruktur Inovasi, Dan Fasilitas Pendukung Terkait SIDA**

Identifikasi solusi terhadap permasalahan yang telah disebutkan diatas dilakukan guna dapat memformulasikan tujuan dan sasaran. Selain itu dengan adanya identifikasi solusi ini juga dapat memunculkan ide dalam menentukan strategi dan arah kebijakan. Berikut merupakan identifikasi solusi terhadap permasalahan diatas:

### **6.2.1. Regulasi dan Kebijakan**

1. Memperkuat landasan hukum yang akan menjadi acuan dalam SIDA melalui pengintegrasian antara *roadmap SIDA* dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. Diharapkan pengintegrasian juga dilakukan pada setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Memperkuat ketersediaan data pembangunan dengan melakukan penggalian data lapangan bersama BPS.
3. Meningkatkan kesadaran hukum melalui sosialisasi terhadap masyarakat dan memperkuat penegakan hukum dengan meningkatkan kualitas penegak hukum daerah
4. Merencanakan pembuatan regulasi yang mengatur mengenai HKI dan persaingan usaha
5. Menyelaraskan ide rencana pembangunan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta melalui pemaksimalan kegiatan Musrenbang.

6. Melakukan integrasi antara regulasi dan setiap dokumen kebijakan yang dapat mendukung sistem inovasi daerah.
7. Melakukan sosialisasi terhadap setiap rancangan kebijakan/regulasi kepada masyarakat. Serta memperhatikan aspirasi yang masuk baik secara formal maupun nonformal.

### **6.2.2. Infrastruktur Inovasi**

1. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pemerintah yang inovatif. Misalnya, kerjasama dilakukan dengan dengan pihak swasta untuk dapat memfasilitasi pengembangan skill dan pemasaran produk unggulan masyarakat.
2. Melakukan pengembangan kapasitas terhadap aparatur pemerintah guna menunjang sistem inovasi daerah. Selain itu, juga perlu untuk melakukan penambahan aparatur kompeten ditempatkan pada posisi yang menunjang inovasi.
3. Mengoptimalkan forum atau *gathering* antar SKPD penunjang SIDA. Sebagai upaya untuk meminimalisir adanya ego sektoral.
4. Menghubungkan capaian kerja gagasan *smart city*, pelayanan berbasis teknologi, sektor jasa, dan produk unggulan daerah
5. Melakukan pengembangan kapasitas terkait budaya inovasi terhadap masyarakat sehingga memunculkan minat pada dunia *entrepreneurship*

6. Menciptakan ruang publik yang ditunjang dengan infrastruktur TIK sehingga dapat mengembangkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan bisnisnya.

### **6.2.3. Fasilitas Pendukung**

1. Mengintegrasikan jaringan antar fasilitas pendukung inovasi, khususnya untuk sektor strategis berbasis pada anggaran dan kinerja.
2. Membangun fasilitas pusat sentra produk lokal untuk mendukung pemasaran produk unggulan daerah
3. Melakukan promosi daerah melalui kegiatan *local branding* untuk meningkatkan kunjungan tamu baik lokal maupun internasional.

Dari ketiga solusi ini, maka dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan arah pengembangan dari SIDA Provinsi Kalimantan Utara melalui indikator capaian yang akan ditetapkan.

### **6.3. Unggulan Daerah**

Setelah dilakukan proses analisis diatas, perlu diupayakan untuk melakukan analisis pada unggulan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Analisis ini dilakukan sebagai upaya untuk menemukan satu petunjuk mengenai inovasi yang akan diimplementasikan.

Produk Unggulan Daerah (PUD) Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan berfokus pada pemanfaatan, optimalisasi sumber daya, dan peningkatan kompetensi lokal dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran serta menciptakan pembangunan

berkelanjutan. Upaya ini dikuatkan melalui strategi pada penguatan daya saing produk lokal. Sehingga, melalui PUD diharapkan adanya pembukaan lapangan kerja baru dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.

Pada rencana aksinya, pengembangan PUD Provinsi Kalimantan Utara disusun sebagai bentuk respon terhadap perkembangan ekonomi dalam skala global, salah satunya adalah Masyarakat Ekonomi Asean pada tahun 2015. Keberadaan PUD diperkuat melalui amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tentang Produk Unggulan daerah Provinsi Kalimantan Utara yakni No. 188.45/334/KEP/425.012/2015 tentang produk unggulan daerah Provinsi Kalimantan Utara 2015 disepakati produk unggulan daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

Berdasarkan pemaparan Bab IV PUD dalam dokumen Rencana Aksi Pengembangan Produk Unggulan Daerah terdapat analisis mengenai kondisi PUD yang ada di Provinsi Kalimantan Utara diantaranya sebagai berikut:

**Faktor Internal:** Kondisi internal menggambarkan semua kondisi yang terdapat pada produk unggulan, baik dari potensi bahan baku, pengolahan, SDM, dan teknologi. Hasil identifikasi potensi/kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada pengembangan PUD

**Kekuatan**

- a. Posisi Provinsi Kalimantan Utara yang cukup strategis yakni terletak di jalur utama dan daerah tapal kuda ;
- b. Bahan baku untuk Produk Unggulan Daerah yang melimpah dan mudah di dapat ;
- c. Ikon mangga sudah terkenal oleh masyarakat luar daerah ;
- d. Mempunyai Terminal Barang dan Pelabuhan ;
- e. Produk Unggulan Anyaman Plastik merupakan satu-satunya yang ada di Jawa Timur ;
- f. Mempunyai ciri khas Provinsi Kalimantan Utara (bayuangga/ manggur/ pendalungan) ;
- g. Merupakan produk-produk hasil kerajinan handmade ;
- h. Sumberdaya Manusia sebagai tenaga kerja dalam bidang PUD sangat besar;
- i. Adanya rumah kemasan yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan.

**Kelemahan**

- a. Beberapa bahan baku Produk Unggulan ketersediaanya masih dipengaruhi oleh cuaca/ musim ;
- b. Pelaku usaha memiliki keterbatasan keterampilan, modal usaha dan jaringan pemasaran dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi;
- c. Beberapa bahan baku masih didapatkan dari luar daerah/ kota ;
- d. Kegiatan promosi yang masih terbatas ;
- e. Produktivitas masih relatif kecil ;
- f. Kemasan produk belum memenuhi standart ;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Belum adanya Perda tentang Penanaman Modal sehingga ada keraguan bagi investor untuk menanamkan modalnya ;</li> <li>h. Pelaku usaha masih menggunakan teknologi sederhana dalam proses produksi dan pengemasan/merk dagang masih belum menarik ;</li> <li>i. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara sebagai tenaga kerja PUD;</li> <li>j. Kurang berminatnya tenaga kerja lokal untuk menjadi tenaga kerja PUD ;</li> <li>k. Produk Unggulan Daerah (PUD) belum memiliki Standart Nasional Indonesia (SNI);</li> <li>l. l. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD.</li> </ul>
<p><b>Faktor Eksternal:</b> Merupakan bagian dari analisis yang mempertimbangkan peluang dan ancaman dari PUD Provinsi Kalimantan Utara</p>	
<p><b>Peluang</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Besarnya pasar regional dan nasional;</li> <li>b. Era pasar bebas, memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015;</li> <li>c. Bahan baku merupakan ciri khas daerah yang tidak semua daerah tidak memilikinya, contoh ikan jenggelek dan ikan punti yang hanya terdapat di laut Provinsi Kalimantan Utara ;</li> <li>d. Bergesernya gaya hidup masyarakat perkotaan pada gaya hidup kembali ke alam (back to nature), dan lebih mencintai produk dalam negeri dapat menjadi pasar yang potensial terutama untuk pengembangan PUD.</li> </ul>
<p><b>Ancaman</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masuknya produk-produk import yang lebih murah (dari Negara tetangga ASEAN);</li> <li>b. Pelaku usaha skala besar lebih mendominasi, sehingga pelaku usaha skala kecil menengah akan semakin tertekan</li> <li>c. Perubahan regulasi dan kebijakan keuangan pemerintah;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Produk unggulan rawan untuk ditiru/ dipalsukan, mengingat belum adanya hak paten;</li> <li>e. Banyaknya produk UKM sejenis dari daerah lain yang lebih murah dan menarik</li> <li>f. Masuknya komoditi dan produk sejenis seperti Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dari luar negeri dengan harga bersaing;</li> <li>g. Kondisi politik dalam negeri;</li> <li>h. Adanya Kompetitor dari dalam dan luar negeri;</li> <li>i. Adanya serangan Hama dan Penyakit Tanaman pada komoditi unggulan</li> </ul>
--	---

**Sumber:** Rencana Aksi Pengembangan Produk Unggulan Daerah, 2015

Berdasarkan pada analisis diatas diperoleh kesimpulan bahwa adanya kekuatan pada pengembembangan produk unggulan daerah Provinsi Kalimantan Utara berupa potensi strategis wilayah yang ditunjang dengan keberadaan infrastruktur. Sedangkan, selama ini belum maksimalnya produktivitas menjadi evaluasi dalam rencana pengembangan SIDA, dimana persoalan ini salah satunya menyangkut terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia para aktor penggerak PUD.

Kondisi nyata berupa kekuatan harus dimaksimalkan secara nyata oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Begitupula dengan kelemahan yang harus diminimalisir dengan memunculkan solusi strategis. Hal ini penting mengingat globalisasi ekonomi dalam skala global seperti MEA dapat menjadi ancaman serius bagi perkembangan produk lokal. Akan tetapi, bila upaya yang dilakukan membuahkan hasil berupa kekuatan daya saing produk lokal Provinsi Kalimantan Utara maka tidak mungkin masyarakat justru dapat mengambil manfaat dari adanya MEA. Oleh sebab itu, kebijakan mengenai PUD harus serius dilakukan

melalui kerjasama berbagai pihak, salah satunya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara direkomendasikan segera menetapkan regulasi mengenai penanaman modal. Dengan adanya regulasi ini, Pemerintah dapat mengatur arus modal yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan PUD ini juga akan menjadi penting dalam Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Yakni akan menjadi sebagai penguatan landasan untuk menetapkan basis penunjang dari keberadaan sektor jasa dan perdagangan.

#### **6.4. Daya Saing**

Daya saing daerah yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karenanya, penyusunan SIDA ini mendorong sektor prioritas dengan diikuti oleh daya saing daerah yang meningkat. Meningkatnya daya saing dapat menjadi satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berikut merupakan kondisi aspek daya saing daerah Provinsi Kalimantan Utara:

##### **6.4.1. Produktivitas Total Daerah**

Produktivitas total daerah mampu memberikan gambaran laju produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian Provinsi Kalimantan Utara. Sektor primer dan perdagangan merupakan sektor yang paling tinggi dibanding delapan sektor lainnya. Setiap tahunnya sektor ini mengalami peningkatan. Selain itu sektor jasa menempati urutan berikutnya, yakni pengangkutan dan konstruksi

dan jasa-jasa. Berdasarkan kenampakan data ini, maka dapat disimpulkan Provinsi Kalimantan Utara merupakan kota yang pertumbuhan ekonominya ditopang oleh sektor perdagangan dan jasa. Karena itu, menjadi penting untuk memprioritaskan dua sektor ini dalam sistem inovasi daerah.

#### 6.4.2. Penataan Ruang Kota

Berikut merupakan kenampakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan:

Data Peruntukan Lahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012

	<b>PENGUNAAN TANAH TAHUN 2009</b>	<b>LUAS (Ha)</b>	<b>Persen (%)</b>
1	Garasi Bus	15,432	0,27
2	Hotel	0,915	0,02
3	Industri	57,317	1,01
4	Jasa Dan Perdagangan	94,185	1,66
5	Kebun	2,065	0,04
6	Kesehatan	2,236	0,04
7	Makam	19,991	0,35
8	Militer	18,915	0,33
9	Pelabuhan	89,722	1,59
10	Pemukiman	2.033,385	35,92
11	Pemukiman Teratur	185,168	3,27
12	Pendidikan	20,637	0,36
13	Perairan darat	129,655	2,29
14	Pergudangan	14,743	0,26
15	Perkebunan	1,516	0,03
16	Persawahan	2.765,320	48,85
17	Pertanian Tanah Kering	176,080	3,11
18	Tanah Terbuka	24,237	0,43
19	Tempat Pembuangan Akhir	5,606	0,10
20	Terminal	3,410	0,06
<b>JUMLAH</b>		<b>5.660,535</b>	<b>100,00</b>

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah persentase pemanfaatan lahan untuk perdagangan dan jasa cukup signifikan. Meskipun persawahan dan pertanian tanah kering memiliki jumlah yang lebih besar namun sektor ini belum mampu memberikan peningkatan ekonomi yang maksimal di Provinsi Kalimantan

Utara

### 6.4.3. Keamanan

Kondusivitas daerah dapat menjamin iklim investasi suatu daerah. Karena itu, aspek keamanan cukup penting untuk menjamin inovasi Provinsi Kalimantan Utara dapat diimplementasikan.

Berikut merupakan data keamanan di Provinsi Kalimantan Utara:

Data Kondisi Keamanan dan Politik Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2010 - 2013

No	Uraian	Jumlah			
		2010	2011	2012	2013
1	Jumlah kasus-kasus kriminalitas yang terjadi	312	265	336	-
2	Angka kriminalitas	570	408	459	199
3	Jumlah kegiatan demonstrasi dan unjuk rasa	-	19	0	0
4	Jumlah kasus mogok kerja	-	-	0	0
5	Jumlah perempuan yang memPHK karyawan	25	31	10	11

Berdasarkan data tersebut nampak jumlah angka kriminalitas yang fluktuatif terjadi. Kondisi ini kiranya perlu untuk dirubah mengingat kriminalitas dapat mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Akan tetapi kasus mogok kerja dan demonstrasi yang relatif kecil menjadi nilai positif.

Dari pemaparan daya saing daerah diatas menunjukkan adanya potensi dari sektor jasa dan perdagangan untuk diprioritaskan. Hal ini ditunjang dengan data yang menunjukkan bahwa dua sektor ini telah banyak memberikan pemasukan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Akan tetapi, Provinsi Kalimantan Utara harus mengevaluasi kondisi keamanan daerah dimana angka kriminalitas masih terhitung tinggi.

## **BAB VII**

### **KONDISI YANG INGIN DICAPAI**

#### **7.1. Vitra Sebagai Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara**

Sektor jasa dan perdagangan telah digambarkan dapat menjadi satu prioritas dalam sistem inovasi daerah Provinsi Kalimantan Utara. Prioritas digunakan sebagai landasan acuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini dilakukan demi tujuan mengoptimalkan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sekarang dan waktu yang akan datang. Keberadaan sektor jasa dan perdagangan menjadi prioritas juga telah disebutkan sebagai satu sektor yang dapat mengintegrasikan keberadaan potensi wilayah, kebutuhan masyarakat, dan keberadaan industri yang selama ini telah ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Penggunaan sektor jasa dan perdagangan juga mengacu pada data statistik, salah satunya berdasarkan lapangan pekerjaan utama masyarakat Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2014. Di tahun tersebut dari 107.668 jiwa penduduk kebanyakan bekerja pada sektor jasa, yakni sebanyak 27.184 jiwa (25,25 persen). Disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25.341 jiwa (23,54 persen) dan sektor industri pengolahan sebesar 21.941 jiwa (20,38 persen). Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2014 sebanyak 8.235 jiwa (7,65 persen) lebih banyak dibanding tahun 2013 sebanyak 5.335 jiwa. Adanya keberadaan sektor jasa ini telah diketahui juga dapat menyerap tenaga kerja, begitupun dengan perdagangan, hotel dan restoran.

Besarnya jumlah tenaga kerja di lingkungan sektor jasa dan perdagangan nampaknya berhubungan dengan perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan PDRB Provinsi Kalimantan Utara tersaji bahwasanya terdapat 3 sektor lapangan usaha berturut-turut selama 4 tahun terakhir menduduki posisi tertinggi dibandingkan 6 sektor lainnya, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor industri pengolahan. Sektor ini menjadi sektor potensial yang harus mendapat perhatian. Dua sektor berikutnya yaitu sektor jasa-jasa dan sektor keuangan, sewa, jasa perusahaan

dapat berpotensi lebih berkembang lagi melalui peran pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mengembangkan potensi lokal yang ada.

### Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Provinsi Kalimantan Utara

No	ap. Usaha	ADHK (Persen)					ADHB (Persen)				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pertanian	9,17	8,02	7,14	6,52	6,07	8,88	7,77	6,75	6,36	5,8
2.	Pertambangan & penggalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Industri pengolahan	14,11	13,64	13,51	13,26	13,19	14,34	13,75	13,31	12,76	12,7
4.	Listrik, gas dan air bersih	1,33	1,34	1,33	1,30	1,29	1,08	1,08	1,09	1,05	1,01
5.	Konstruksi	0,88	0,91	0,90	0,91	0,92	0,97	1,07	1,10	1,11	1,15
6.	Perdagangan, hotel & restoran	43,18	44,58	45,73	46,86	47,68	40,94	42,60	44,03	45,39	46,58
7.	Pengangkutan & komunikasi	13,68	13,53	13,55	13,51	13,5	15,16	14,36	14,21	13,80	13,75
8.	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	7,18	7,40	7,47	7,48	7,51	6,58	6,75	6,97	7,05	7,15
9.	Jasa-jasa	10,46	10,58	10,37	10,17	9,84	12,05	12,62	12,54	12,48	11,86

**Sumber:** Badan Pusat Statistik

Data jumlah pekerjaan dan PDRB tersebut dapat menjadi acuan untuk mendukung keberadaan sektor jasa sebagai prioritas dalam SIDA Provinsi Kalimantan Utara. Sektor ini diharapkan dapat menjadi tumpuan perekonomian dan mampu menyerap tenaga kerja. Sistem inovasi hadir untuk menjadi tindak lanjut atas agenda reformasi birokrasi. SIDA sebagai salah satu agenda untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan formulasi strategi dan arah kebijakan yang integratif.

Guna memudahkan proses pengintegrasian antara potensi daerah dan kinerja pemerintah daerah maka diperlukan satu frasa yang dapat memberikan gambaran tersebut. Vitra dipilih sebagai satu frasa yang dapat menyimpulkan keberadaan sektor jasa dan perdagangan sebagai prioritas sistem inovasi daerah dengan ditunjang melalui potensi wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan sektor lain yang dapat mendukung.

Vitra merupakan istilah yang menggabungkan dua kata yang saling berhubungan, yakni Service and Trade. Service merupakan istilah bahasa Inggris yang berarti jasa. Jasa atau service ditetapkan sebagai prioritas dalam sistem inovasi daerah untuk kemudian dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah

Sektor Jasa, mengutip Hill (1997) pada jurnal Balin & Giard (a Process Oriented Approach to The Service Concepts), didefinisikan sebagai sebuah perubahan dari kondisi seseorang atau barang pada unit ekonomi, yang membawa tentang hasil dari aktivitas unit ekonomi, dengan kesepakatan telah ditentukan. Lebih mudahnya sektor jasa mementingkan pada layanan yang tidak berwujud pada kepemilikan. Jasa memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah: usaha rumah tangga, perumahan, hiburan atau rekreasi, perawatan pribadi, kesehatan, bisnis, komunikasi, transportasi, jasa keuangan, pendidikan.

Pada sektor jasa ini Provinsi Kalimantan Utara memiliki sektor jasa unggulan seperti: usaha rumah tangga, perumahan, hiburan atau rekreasi dan bisnis. Keberadaan jasa ini merupakan bagian dari sektor tersier yang juga akan ditunjang melalui keberadaan sektor industri, perdagangan, wisata dan rekreasi. Maka berdasarkan arti jasa dan jasa, terkandung makna bahwa usaha Provinsi Kalimantan Utara dalam mengembangkan sektor jasa sebagai prioritas dalam inovasi daerah dengan diwujudkan melalui kerja nyata dari berbagai pihak.

Sedangkan trade berarti perdagangan. Sektor perdagangan dipilih karena mampu menunjang keberadaan sektor jasa. Sektor perdagangan juga memiliki kontribusi dalam PDRB Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan artinya perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi yang bergerak dalam penyediaan dan distribusi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sektor industri

melalui mekanisme pasar atau operasi khusus untuk barang-barang kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kedua penjelasan tersebut, maka **Vitra** memiliki makna bahwa sistem inovasi daerah yang mengunggulkan sektor jasa dan perdagangan dengan ditunjang oleh integrasi potensi wilayah, sosio kultur, potensi sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Proses implementasi dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan masyarakat dan sektor swasta.

Vitra ditetapkan sebagai istilah setelah merefleksikan peta regulasi dan kebijakan Provinsi Kalimantan Utara dan formulasi perencanaan pembangunan, beberapa diantaranya melalui RPJPD, RPJMD, RTRW, dan RKPD. Sedangkan, untuk mengukur sejauhmana perkembangan infrastruktur dan fasilitas inovasi digunakan hasil kajian yang merujuk pada data-data statistik yang merupakan gambaran umum Provinsi Kalimantan Utara dan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Selain data statistik, sebagaimana pembahasan pada gambaran awal dan pembahasan permasalahan diulas juga hasil kajian lapangan yang menghasilkan gambaran secara kualitatif.

Frasa ini juga melalui refleksi terhadap posisi strategis wilayah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal lalu lintas perekonomian. Wilayah kota yang memiliki pelabuhan dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan jasa pergudangan dan transportasi di sekitar pelabuhan. Wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang cenderung tidak luas seperti kabupaten menjadikan sistem inovasi daerah tidak dapat mengintegrasikan jejaring potensi berdasarkan aspek unggulan kewilayahan. Akan tetapi, dengan cakupan wilayah yang tidak begitu luas, maka Provinsi Kalimantan Utara menggunakan potensi sektoral sebagai prioritas dalam penyusunan SIDA.

Pada pembahasan selanjutnya Vitra akan digunakan sebagai diintegrasikan dengan agenda pembangunan daerah berdasarkan kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Setelah itu, dilakukan perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program.

## **7.2. Sinergi Vitra dengan Agenda dan Kebijakan Pembangunan Daerah**

Proses integrasi dilakukan sebagai sebuah jalan untuk merangkai sistem dalam inovasi. Inovasi sebagai sistem selain membutuhkan payung hukum, juga membutuhkan suatu visi yang dikerjakan secara bersama. Selama ini, egoisitas untuk menapai keberhasilan dalam setiap institusi telah membuat capaian kinerja di daerah tidak mampu maksimal. Oleh sebab itu, sistem inovasi daerah hendak untuk melakukan integrasi agenda pembangunan daerah dengan merajutnya menuju inovasi yang terfokus pada sektor jasa.

Secara legislatif, keberadaan sistem inovasi daerah di Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki landasan yang dapat digunakan acuan secara tegas. Meskipun telah diatur beberapa aturan yang dapat menjadi penunjang sistem inovasi, akan tetapi sistem inovasi tetap membutuhkan sebuah landasan yang kuat agar dapat dilaksanakan secara bersama. Mengarah pada hal tersebut, maka disusunlah sebuah rancangan dan agenda dengan memuat potensi dan arah kerja dalam implementasi Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara memprioritaskan beberapa SKPD untuk mencapai hasil yang dirancang. Secara khusus, SKPD prioritas merupakan satuan kerja yang memiliki hubungan dalam mencapai inovasi daerah di Provinsi Kalimantan Utara, terlebih yang memiliki fokus pada sektor jasa. Keberadaan SKPD prioritas ini dirujuk sebagaimana program kerja dan indikator kinerja mereka pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. Dengan penyelerasan ini, maka Sistem Inovasi Daerah diharapkan menjadi bagian penting pada rumusan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun berikut merupakan SKPD prioritas terkait SIDa Provinsi Kalimantan Utara:

### **A. Bappeda**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang kemudian disingkat Bappeda merupakan organisasi inti dalam kesatuan SKPD Provinsi Kalimantan

Utara. Bappeda merupakan institusi yang memiliki bank data serta mengontrol jalannya pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

Pada konteks SIDA, Bappeda merupakan institusi penanggung jawab dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan SIDA merupakan dokumen yang dapat membingkai perencanaan pembangunan daerah. Bappeda sebagai koordinator dalam konseptualisasi dan pada implementasi jalannya SIDA Provinsi Kalimantan Utara. Melalui prosedur pelaksanaan yang dimiliki, institusi ini telah memiliki beberapa program yang dapat menjadi acuan teknis dalam pelaksanaan SIDA.

Adapun berikut merupakan program prioritas dari Bappeda pada urusan perencanaan pembangunan dalam RPJMD yang terkait dengan SIDA

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
3. Program perencanaan pembangunan ekonomi
4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
5. Program perencanaan sosial dan budaya
6. Program pengembangan data/Informasi
7. Program kajian Perencanaan & Kebijakan Pembangunan daerah
8. Program Pengembangan penelitian / kajian masyarakat meningkatnya jumlah kajian dan penelitian masyarakat tentang kebijakan pembangunan daerah
9. Program Pengembangan Kelembagaan Penelitian Daerah meningkatnya koordinasi kelembagaan riset unggulan daerah.

## **B. Dinas PU**

Keberadaan Dinas PU nantinya dapat menunjang keberadaan infrastruktur daerah secara fisik. Inovasi daerah yang membutuhkan jaringan keunggulan Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan fasilitas infrastruktur yang mampu

diakses oleh masyarakat. Infrastruktur yang aksesibel misalnya meliputi: jaringan jalan yang baik antar lokasi unggulan dan keberadaan sarana lokasi unggulan inovasi yang menarik.

Untuk mewujudkan infrastruktur daerah secara fisik yang mendukung inovasi daerah. Dinas PU memiliki beberapa program dalam urusan pekerjaan umum RPJMD Provinsi Kalimantan Utara yang dapat diintegrasikan dalam kaitannya dengan SIDA Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana berikut:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum serta Pelayanan Publik dengan indikator tersusunnya dokumen perencanaan dan terbangunnya sarana dan prasarana umum serta fasilitas publik.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan terpeliharanya dan terbangunnya terminal cargo/terminal penumpang/halte
3. Program Pemanfaatan Ruang dengan indikator tersusunnya data penataan reklame
4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5. Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan
6. Program Pembinaan Pembangunan Gedung dan Lingkungan

### **C. Dinas Komunikasi dan Informatika**

Saat ini, inovasi daerah telah ditentukan oleh sejauhmana aspek ICT telah menunjang aktivitas layanan publik daerah. Salah satu yang menunjang aspek tersebut telah tertuang dalam konsep *e-government*. Diskominfo merupakan satuan perangkat yang berperan untuk menginisiasi konsep *e-government* dengan kegiatan pembuatan aplikasi layanan publik hingga evaluasi. Pekerjaan ini berintegrasi dengan rancangan perencanaan layanan publik sebagaimana gagasan *smart city* yang diinisiasi oleh Bappeda. Adanya layanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel telah terbukti mampu meningkatkan legitimasi dan partisipasi masyarakat pada pemerintahan. Jika tingkat kepercayaan

tumbuh, maka ini akan meningkatkan kepercayaan para investor untuk menanam investasi di Provinsi Kalimantan Utara.

Selain dapat meningkatkan layanan publik, keberadaan Dinas Kominfo juga dapat meningkatkan agenda promosi unggulan daerah. Karena itu, peran Dinas Kominfo pada konteks SIDA ini cukup vital karena akan dapat memoles tampilan inovasi menjadi menarik.

Beberapa program dalam urusan komunikasi dan informatika RPJMD Provinsi Kalimantan Utara berikut dapat diintegrasikan pada SIDA:

1. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik (terlaksananya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah)
2. Program pengembangan komunikasi, informasi, media massa
3. Program Pengolahan dan Penyajian data informasi
4. Program Sosialisasi Kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Media Massa
5. Program Pengembangan Aplikasi Informatika

#### **D. Dinas Tenaga Kerja**

Dinas Tenaga Kerja selain memiliki data terkait jumlah serapan tenaga kerja, juga berperan untuk memfasilitasi kebijakan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara. Peran ini cukup signifikan, pasalnya keberadaan sektor jasa sebagai unggulan juga harus mampu digali datanya secara maksimal. Juga sektor jasa dan perdagangan harus mampu menyerap tenaga kerja yang selama ini menjadi masalah di Provinsi Kalimantan Utara. Proses integrasi ini

Berikut merupakan program dari Dinas Tenaga Kerja yang tertuang dalam urusan ketenagakerjaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

3. Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja

#### **E. Dinas Koperindag**

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan memainkan peran penting pada SIDA Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dikarenakan inovasi sektor jasa ditunjang dengan keberadaan sektor koperasi, industri dan perdagangan, sebagaimana yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya. Karena itu, keberhasilan Dinas Koperindag pada peranannya secara otomatis dapat meningkatkan keberhasilan sektor jasa.

Berikut merupakan program prioritas Dinas Koperindag dalam **urusan perindustrian**, RPJMD yang terkait dengan SIDA:

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

#### **Urusan Perdagangan;**

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor,
3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

#### **Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;**

1. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha Mikro Kecil Menengah,
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi,
4. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

#### **F. Dinas Kelautan dan Perikanan**

Dinas KP akan memberikan kontribusi dalam SIDA mengenai hasil pemanfaatan sumber daya kelautan. Di Provinsi Kalimantan Utara hasil kelautan dan perikanan telah terbukti memberikan sumbangsih pada roda perekonomian daerah dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan sumber daya kelautan dan perikanan ini juga terbukti dapat meningkatkan sektor jasa, khususnya pada jasa pelelangan ikan. Oleh sebab itu, peran dinas kelautan dan perikanan menjadi dapat diintegrasikan pada SIDA Provinsi Kalimantan Utara.

Berikut merupakan urusan kelautan dan perikanan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara yang dapat dikaitkan dengan SIDA:

1. Program pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan
2. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
3. Program optimalisasi perijinan usaha perikanan
4. Program optimalisasi dan pemasran produksi perikanan

#### **G. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan**

Badan ini memiliki peran yang cukup penting dalam melakukan pengawasan pada inovasi daerah Provinsi Kalimantan Utara. Salah satu peran yang dapat mereka lakukan adalah melakukan fasilitasi terhadap arus penanaman modal dan investasi. Dinas ini juga memiliki peran dalam menentukan arah mengenai iklim investasi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Lebih dari itu, mereka juga dapat melakukan memberikan izin terhadap sektor jasa baik dalam skala kecil atau besar di Provinsi Kalimantan Utara.

Berikut merupakan program pada urusan yang dapat diintegrasikan dengan SIDA:

1. Program promosi dan kerjasama investasi
2. Program peningkatan investasi
3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Dengan adanya beberapa SKPD prioritas dalam implementasi SIDA diharapkan adanya sistem kerja yang integratif. Hal ini akan diarahkan pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan ditetapkan menjadi rencana kerja pada SIDA Provinsi Kalimantan Utara.

#### **H. Dinas Pertanian**

Sebagai wilayah agraris perkebunan dan pertanian menjadi satu potensi yang haru terus digapai manfaatnya di Provinsi Kalimantan Utara. Selain menjadi mata pencaharian beberapa masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, keberadaan perkebunan dan pertanian juga dapat menunjang sektor jasa. Penunangan dapat terjadi ketika Provinsi Kalimantan Utara mulai meningkatkan secara serius hasil pertanian dan hasil olahan pertanian. Selama ini, keberadaan industri jasa pengolahan hasil pertanian di Provinsi Kalimantan Utara telah berkembang pesat meskipun Provinsi Kalimantan Utara bukan merupakan wilayah yang memiliki hasil pertanian melimpah.

Berikut merupakan program urusan pertanian dalam RPJMD kaitannya dengan SIDA:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Tani
2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan
3. Program peningkatan pemasaran produksi hasil peternakan

#### **I. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata**

Data menunjukkan ada hasil positif mengenai sektor pariwisata di Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan sektor ini merupakan salah satu unggulan dalam menunjang keberadaan sektor jasa. Peningkatan destinasi wisata dan jaringan sektor jasa wisata perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Kalimantan Utara. Dengan adanya jumlah wisatawan yang meningkat dapat berimbas positif pada pemasukan asli daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Berikut merupakan program urusan pariwisata dalam RPJMD yang terkait dengan SIDA:

1. Program pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata
2. program pengembangan destinasi pariwisata,
3. program pengembangan kemitraan (kerjasama dalam pengembangan pariwisata).

#### **4.3 Penataan Unsur SIDA**

Untuk mencapai rumusan yang ingin dicapai, maka strukturasi perlu dilakukan. Hal ini diupayakan melalui penentuan pola wewenang dan pertanggungjawaban. Sehingga indikator capaian dapat diimplementasikan dengan baik.

Adapun dalam penetapannya, berikut merupakan Tim Koordinasi Sida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi No. 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, terdiri dari:

Pengarah : Gubernur Kalimantan Utara

Ketua : Sekretaris Daerah

Sekretaris : Kepala Bappeda

Anggota :

1. Kepala Dinas/Badan/Kantor yang terkait
  - Dinas PU
  - Dinas Kominfo
  - Dinas Koperindag
  - Dinas Kelautan dan Perikanan
  - Badan Perencanaan Modal dan Pelayanan Perijinan
  - Dinas pertanian
  - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

## 2. Lembaga/Organisasi lainnya yang terkait

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

### **Triple Helix**

Sistem inovasi daerah juga harus diupayakan melalui adanya keterlibatan tiga unsur yang biasa disebut triple helix. Tiga unsur tersebut ialah pengambil kebijakan, pengusaha, dan akademisi.

### **Pengambil Kebijakan**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan institusi yang memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan sebagaimana ketetapan yang telah diatur. Secara spesifik, keterlibatan diupayakan melalui keberadaan SKPD yang bertanggung jawab pada keberhasilan inovasi daerah. SKPD tersebut merupakan struktur yang akan menjalankan inovasi daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab berdasarkan otoritas masing-masing.

### **Pengusaha**

Keberadaan pengusaha disini dimaksudkan untuk dapat menjangkau keberadaan inovasi daerah melalui investasi dan kerjasama pemenuhan infrastruktur. Keberadaan pengusaha menjadi cukup penting dalam meningkatkan lajur sektor prioritas perdagangan dan jasa. Karena itu, keterlibatan pengusaha harus mampu dioptimalisasikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam bentuk kerjasama pemerintahan

### **Akademisi**

Kalangan akademisi dihadirkan untuk dapat memberikan pemaparan mengenai hasil studi. Hasil studi dapat diwujudkan melalui penelitian yang dapat bersifat evaluasi atau pengembangan arah pembangunan kedepan. Unsur akademisi ini dipandang sebagai aktor independen yang bisa memberikan masukan secara obyektif berlandaskan ilmu pengetahuan kepada pemerintah. Oleh karena itu, penting dalam pencapaian sistem inovasi daerah untuk melibatkan kalangan akademisi.



## BAB VII

### ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS SIDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Atas dasar pemetaan hingga analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh sebuah arah kebijakan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan Sistem Inovasi Daerah.

Arah Kebijakan	Kondisi Sekarang	Kondisi yang Dicapai	Program	SKPD Penanggung Jawab
<b>Peningkatan kapasitas aparatur dalam implementasi inovasi daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kapasitas pemerintah yang masih belum inovatif</li><li>- Minimnya pelatihan yang menunjang inovasi daerah</li><li>- Minimnya jumlah aparatur yang kompeten di bidang inovasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Meningkatnya inovasi daerah dengan <i>good governance</i> dan <i>e-government</i> melalui pengembangan kegiatan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan</li><li>-Rekrutmen aparatur yang kompeten di bidang inovasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li></ul>	Semua SKPD penanggung jawab SIDA
<b>Peningkatan layanan berbasis e-government</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Belum maksimalnya layanan berbasis <i>e-government</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya layanan berbasis <i>e-government</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Program Peningkatan Pelayanan Informasi</li></ul>	-Dinas Kominfo

Arah Kebijakan	Kondisi Sekarang	Kondisi yang Dicapai	Program	SKPD Penanggung Jawab
			Publik (terlaksananya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah)  -Program Pengolahan dan Penyajian data informasi	
<b>Peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, perdagangan dan infrastruktur fisik daerah</b>	-Pembangunan Infrastruktur yang belum berdasar pada RTRW  -Kondisi jalan rusak yang belum diperbaiki  -Infrastruktur pasar yang masih perlu direnovasi dan	-Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berdasar pada RTRW  -Meningkatnya kondisi jalan yang baik  -Meningkatnya infrastruktur pasar disertai dengan promosi	-Program Perencanaan Pembangunan Daerah  -Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan	Bappeda  Dinas PU

Arah Kebijakan	Kondisi Sekarang	Kondisi yang Dicapai	Program	SKPD Penanggung Jawab
<b>penunjang inovasi</b>	dipromosikan -Infrastruktur petunjuk lokasi sentra jasa dan perdagangan daerah	-Meningkatnya petunjuk lokasi sentra jasa dan perdagangan	cepat tumbuh -Program perencanaan pembangunan ekonomi -Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum serta Pelayanan Publik	
<b>Peningkatan jaringan transportasi</b>	-Belum terjejaringnya sarana transportasi antara terminal, stasiun, pelabuhan, dengan lokasi strategis	-Meningkatnya jaringan transportasi antara terminal, stasiun, pelabuhan dengan lokasi strategis	-Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan terpeliharanya dan terbangunnya terminal cargo/terminal	Dinas PU

Arah Kebijakan	Kondisi Sekarang	Kondisi yang Dicapai	Program	SKPD Penanggung Jawab
			penumpang/halte  -Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
<b>Peningkatan Kebijakan dan sosialisasi inovasi daerah</b>	-Belum adanya kebijakan HKI  -Belum adanya kebijakan pendukung inovasi daerah	-Adanya kebijakan tentang HKI  -Meningkatnya kebijakan pendukung inovasi daerah	-Program Pemanfaatan Ruang dengan indikator tersusunnya data penataan reklame  -Program pengembangan komunikasi, informasi, media massa  -Program Sosialisasi Kebijakan dan	-Bappeda -Dinas Kominfo -Dinas Koperindag -Dinas Kelautan dan Perikanan -Dinas Tenaga Kerja

Arah Kebijakan	Kondisi Sekarang	Kondisi yang Dicapai	Program	SKPD Penanggung Jawab
			Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Media Massa dengan -Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan -Program optimalisasi perijinan usaha perikanan -Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja	

Arah Kebijakan	Kondisi Sekarang	Kondisi yang Dicapai	Program	SKPD Penanggung Jawab
<p><b>Peningkatan pemberdayaan dan fasilitasi masyarakat di sektor jasa dan perdagangan</b></p>	<p>Belum maksimal fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat pada sektor perdagangan dan jasa, serta sektor pendukungnya</p>	<p>fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat pada sektor perdagangan dan jasa, serta sektor pendukungnya</p>	<p>-Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p> <p>-Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah</p> <p>-Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</p> <p>-Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</p> <p>-Program</p>	<p>-Dinas Tenaga Kerja</p> <p>-Dinas Koperindag</p> <p>-Dinas Perikanan dan Kelautan</p> <p>-Dinas pertanian</p>

Arah Kebijakan	Kondisi Sekarang	Kondisi yang Dicapai	Program	SKPD Penanggung Jawab
			Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja -Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah -Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha Mikro Kecil Menengah -Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, -Program penciptaan iklim usaha kecil	

Arah Kebijakan	Kondisi Sekarang	Kondisi yang Dicapai	Program	SKPD Penanggung Jawab
			<p>menengah yang kondusif</p> <p>-Program pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan</p> <p>-Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir</p> <p>-Program Pemberdayaan Masyarakat Tani</p> <p>-Program peningkatan pemasaran produksi hasil peternakan</p>	
<b>Peningkatan</b>	-Belum optimalnya	-Meningkatnya jumlah	-Program	-Bappeda

Arah Kebijakan	Kondisi Sekarang	Kondisi yang Dicapai	Program	SKPD Penanggung Jawab
<p><b>kebijakan penguat unsur SIDA</b></p>	<p>kerjasama pendukung penguatan sistem inovasi daerah</p> <p>-Belum maksimalnya hasil kajian dan penelitian terkait sistem inovasi daerah</p>	<p>kerjasamaguna menunjang sistem inovasi daerah</p> <p>-Meningkatnya hasil kajian dan penelitian penguatan unsur SIDA</p>	<p>pengembangan data/Informasi</p> <p>-Program Pengembangan penelitian / kajian masyarakat meningkatnya jumlah kajian dan penelitian masyarakat tentang kebijakan pembangunan daerah</p> <p>-Program promosi dan kerjasama investasi</p> <p>-Program peningkatan investasi</p> <p>-program pengembangan</p>	<p>-Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan</p> <p>-Dinas Pemuda, Olahraga, dan pariwisata</p>

Arah Kebijakan	Kondisi Sekarang	Kondisi yang Dicapai	Program	SKPD Penanggung Jawab
			kemitraan (kerjasama dalam pengembangan pariwisata)	
<b>Peningkatan infrastruktur ruang publik</b>	Belum termaksimalkannya infrastruktur ruang publik	Meningkatnya infrastruktur ruang publik yang aksesibel	-Program perencanaan sosial dan budaya -Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan -Program Pembinaan Pembangunan Gedung dan Lingkungan	Bappeda Dinas PU
<b>Peningkatan ketersediaan</b>	Belum adanya sentra perdagangan dan jasa	Adanya sentra perdagangan dan jasa	Program Pengembangan	-Dinas Koperindag

Arah Kebijakan	Kondisi Sekarang	Kondisi yang Dicapai	Program	SKPD Penanggung Jawab
<b>sentra perdagangan dan jasa</b>			Sentra-Sentra Industri Potensial	
<b>Peningkatan Produk Unggulan Daerah</b>	Belum termaksimalkannya produktivitas produk unggulan daerah	Meningkatnya produktivitas produk unggulan daerah	-Program Pengembangan Kelembagaan Penelitian Daerah meningkatnya koordinasi kelembagaan riset unggulan daerah -Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor,	-Bappeda -Dinas Koperindag
<b>Peningkatan Pemanfaatan</b>	Belum optimalnya pembangunan daerah	Meningkatnya pembangunan daerah sesuai dokumen perencanaan daerah	Program kajian Perencanaan	Bappeda

Arah Kebijakan	Kondisi Sekarang	Kondisi yang Dicapai	Program	SKPD Penanggung Jawab
<b>Tata Ruang Wilayah Tata</b>	berdasarkan RTRW		&Kebijakan Pembangunan daerah	
<b>Peningkatan Promosi Sektor Jasa dan Perdagangan dan sektor penunjang</b>	Belum adanya promosi sektor jasa dan perdagangan (Vitra)	Meningkatnya promosi sektor jasa dan perdagangan Provinsi Kalimantan Utara	-Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi -Program optimalisasi dan pemasaran produksi perikanan -Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan -Program	-Bappeda -Dinas Kelautan dan Perikanan -Dinas pertanian

Arah Kebijakan	Kondisi Sekarang	Kondisi yang Dicapai	Program	SKPD Penanggung Jawab
			pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata	
<b>Integrasi lokasi unggulan wisata dengan sektor jasa dan perdagangan.</b>	Belum terintegrasinya lokasi unggulan wisata dengan sektor jasa dan perdagangan	Adanya integrasi lokasi unggulan wisata dengan sektor jasa dan perdagangan melalui SIDA	-Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi -program pengembangan destinasi pariwisata,	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata

Berdasarkan pada roadmap tersebut diharapkan adanya keterhubungan antar target yang telah ditetapkan. Sistem inovasi daerah mengembangkan ekonomi wilayah dengan mendorong para *stakeholders* sebagai aktor yang berkerjasama dalam melakukan pengembangan. Oleh sebab itu, dengan adanya SIDA ini diharapkan ekonomi dapat berkembang di Provinsi Kalimantan Utara

## **BAB VIII**

### **RENCANA AKSI PENGUATAN SIDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Untuk menindaklanjuti keberadaan arah kebijakan dan program prioritas, maka disusun rencana aksi penguatan SIDA. Rencana aksi disusun sebagai pedoman teknis melalui berdasarkan waktu pelaksanaan SIDA.

Pada tahap pertama rencana aksi dilakukan dengan cara melakukan penguatan pada struktur organisasi SIDA. Organisasi ini akan melakukan sinkronisasi, harmonisasi, sinergi SIDA Provinsi Kalimantan Utara dengan dokumen pembangunan daerah, provinsi, dan nasional. Dengan adanya integrasi ini diharapkan ada satu pembangunan daerah yang efektif. Diharapkan pula organisasi SIDA bisa memperkuat pelaksanaan dengan mengedepankan aspek monitoring dan evaluasi. Kebutuhan anggaran untuk SIDA juga menjadi tanggung jawab organisasi dengan diusulkan pada APBD

Selain penguatan organisasi, juga diperlukan untuk sosialisasi terkait SIDA Provinsi Kalimantan Utara kepada pihak LSM, masyarakat, swasta, dan Perguruan Tinggi. Hal ini penting mengingat sosialisasi merupakan langkah awal dari keberlanjutan arah kebijakan SIDA yang akan dikuatkan melalui unsur triple helix.

Adapun berikut merupakan pengembangan dari rencana aksi prioritas inovasi perdagangan dan jasa

Program	Kegiatan	Jangka Pendek 2016	Jangka Menengah 2016-2020	Jangka Panjang 2016-2036	Output	SKPD Penanggung Jawab
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas pada aparatur</li> <li>- Kegiatan rekrutmen aparatur</li> </ul>	✓	✓	✓	Aparatur yang inovatif, memiliki budaya inovasi dan memiliki pengetahuan terhadap inovasi daerah	Semua SKPD penanggung jawab SIDA
Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik (terlaksananya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah)	Kegiatan pembuatan pelayanan publik berbasis aplikasi/IT	✓	✓		Layanan yang cepat dan aksesibel	-Dinas Kominfo
Program Pengolahan dan Penyajian data informasi	Pembuatan layanan informasi terkait SIDA yang mudah dijangkau	✓	✓	✓	Informasi yang memuat unggulan daerah, sektor prioritas, dan progress report dari pelaksanaan SIDA	-Dinas Kominfo
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembuatan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan	✓	✓	✓	Pembuatan dokumen yang integratif dengan memperhatikan keberadaan SIDA	Bappeda

Program	Kegiatan	Jangka Pendek 2016	Jangka Menengah 2016-2020	Jangka Panjang 2016-2036	Output	SKPD Penanggung Jawab
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Meningkatkan perencanaan wilayah strategis	✓	✓	✓	Adanya dokumen perencanaan wilayah strategis yang sinkron dengan SIDA	Bappeda
Program perencanaan pembangunan ekonomi	koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi di bidang pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan	✓	✓	✓	Adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat disertai dengan pemerataan ekonomi	Bappeda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum serta Pelayanan Publik	Penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan sarpras fasilitas publik penunjang SIDA	✓	✓		Tersusunnya dokumen perencanaan dan terbangunnya sarana dan prasarana umum serta fasilitas publik penunjang SIDA	Dinas PU
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan terpeliharanya dan terbangunnya terminal cargo/terminal penumpang/halte	Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi penunjang SIDA berupa terminal penumpang/halte /cargo	✓	✓	✓	Terbangunnya dan terpeliharanya sarana transportasi penunjang SIDA	Dinas PU
Program	Membangun dan	✓			Terbangun dan	Dinas PU

Program	Kegiatan	Jangka Pendek 2016	Jangka Menengah 2016-2020	Jangka Panjang 2016-2036	Output	SKPD Penanggung Jawab
Pengendalian Pemanfaatan Ruang	memelihara lahan koridor jalan-jalan arteri dalam kota terkait SIDA				terpeliharanya lahan koridor jalan-jalan arteri dalam kota terkait SIDA	
Program Pemanfaatan Ruang	Menyusun data penataan reklame dan menata reklame sebagai alat promosi inovasi daerah	✓	✓		Tersusunnya data penataan reklame dan tertatanya reklame sebagai alat promosi inovasi daerah	Dinas PU
Program pengembangan komunikasi, informasi, media massa	Meningkatkan pelayanan informasi publik pada masyarakat	✓	✓	✓	Meningkatnya pelayanan informasi publik pada masyarakat	Dinas Kominfo
Program Sosialisasi Kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Media Massa	Kegiatan sosialisasi kebijakan pembangunan terkait SIDA melalui media massa	✓	✓	✓	Adanya kegiatan sosialisasi kebijakan pembangunan melalui media massa	Dinas Kominfo
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Membuat kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan khususnya kebijakan yang	✓	✓		Adanya kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan dan terdapat kebijakan yang memuat HKI	Dinas Koperindag

Program	Kegiatan	Jangka Pendek 2016	Jangka Menengah 2016-2020	Jangka Panjang 2016-2036	Output	SKPD Penanggung Jawab
	memuat HKI					
Program optimalisasi perijinan usaha perikanan	Meningkatkan pelayanan perijinan usaha perikanan secara optimal	✓	✓	✓	Meningkatnya pelayanan perijinan usaha perikanan secara optimal	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Melakukan pengawasan melalui norma kerja dan jamsostek di perusahaan	✓			Adanya pengawasan melalui norma kerja dan jamsostek di perusahaan	Dinas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Melakukan sosialisasi entrepreneurship	✓	✓	✓	Melakukan sosialisasi entrepreneurship	Dinas Tenaga Kerja
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan pada usaha kecil menengah	✓	✓	✓	Adanya pelatihan yang memiliki keberlanjutan	Dinas Koperindag
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Pembinaan kepada PKL dan asongan	✓			Dapat teraturnya lokasi sentra PKL	Dinas Koperindag
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelatihan <i>skill</i> dan produktivitas kerja pada calon tenaga kerja	✓	✓	✓	Menigkatnya kualitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
Program	Melakukan	✓	✓	✓	Adanya proses	Dinas Koperindag

Program	Kegiatan	Jangka Pendek 2016	Jangka Menengah 2016-2020	Jangka Panjang 2016-2036	Output	SKPD Penanggung Jawab
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	pendampingan, fasilitasi, dan pengembangan industri kecil dan menengah				pendampingan , fasilitasi, dan pengembangan yang dilakukan	
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha Miko Kecil Menengah	Melaksanakan dukungan usaha bagi usaha mikro kecil menengah dengan memberikan stimulus berupa dana	✓	✓		Adanya dukungan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Dinas Koperindag
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi,	Melakukan fasilitasi terhadap koperasi aktif		✓	✓	Adanya proses pendampingan terkait koperasi aktif	Dinas Koperindag
Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Melakukan kebijakan mengenai persaingan usaha	✓			Terlaksanakanya kebijakan persaingan usaha	Diinas Koperindag
Program pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan	pemberdayaan dibidang kewirausahaan dan meningkatkan promosi hasil kewirausahaan masyarakat dalam wilayah	✓	✓	✓	Adanya pemberdayaan dibidang kewirausahaan dan meningkatkan promosi hasil kewirausahaan masyarakat dalam wilayah kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

Program	Kegiatan	Jangka Pendek 2016	Jangka Menengah 2016-2020	Jangka Panjang 2016-2036	Output	SKPD Penanggung Jawab
	perikanan dan kelautan					
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	✓			Adanya usaha pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan Masyarakat Tani	Pembinaan kelembagaan petani yang berprestasi	✓			Terbinanya lembaga petani yang berprestasi	Dinas Pertanian
Program peningkatan pemasaran produksi hasil peternakan	Penyediaan sarana pemasaran produk peternakan dan terselenggaranya kegiatan expose peternakan	✓			Trsedianya sarana pemasaran produk peternakan dan terselenggaranya kegiatan expose peternakan	Dinas Pertanian
Program pengembangan data/Informasi	Menyajikan data statistik dan informasi pembangunan yang cepat dan akurat	✓	✓	✓	Tersajinya data statistik dan informasi pembangunan yang cepat dan akurat	Bappeda

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jangka Pendek 2016</b>	<b>Jangka Menengah 2016-2020</b>	<b>Jangka Panjang 2016-2036</b>	<b>Output</b>	<b>SKPD Penanggung Jawab</b>
Program Pengembangan penelitian / kajian masyarakat meningkatnya jumlah kajian dan penelitian masyarakat tentang kebijakan pembangunan daerah	Penelitian dan pengkajian kebijakan pembangunan daerah terkait SIDA	✓	✓	✓	Adanya hasil penelitian dan kajian yang dimanfaatkan	Bappeda
Program promosi dan kerjasama investasi	Melakukan promosi produk unggulan daerah dan inovasi daerah serta melakukan kerjasama investasi	✓	✓	✓	Dilakukannya kegiatan promosi produk unggulan daerah dan inovasi daerah	-Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Program peningkatan investasi	Meningkatkan investasi dan pemberdayaan UMKM	✓	✓	✓	Jumlah UMKM yang meningkat	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jangka Pendek 2016</b>	<b>Jangka Menengah 2016-2020</b>	<b>Jangka Panjang 2016-2036</b>	<b>Output</b>	<b>SKPD Penanggung Jawab</b>
Program pengembangan kemitraan (kerjasama dalam pengembangan pariwisata)	Meningkatkan kerjasama terkait pembangunan infrastruktur wisata	✓	✓	✓	Pembangunan infrastruktur wisata	Dinas Pemuda, Olahraga, dan pariwisata
Program perencanaan sosial dan budaya	Memfasilitasi koordinasi perencanaan kegiatan sosial dan budaya	✓	✓	✓	Adanya kegiatan sosial budaya yang dapat meningkatkan kunjungan wisata	Bappeda
Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan	Menyusun data status bangunan lingkungan khususnya di wilayah ruang publik	✓			Tersusunnya data status bangunan lingkungan	Dinas PU

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jangka Pendek 2016</b>	<b>Jangka Menengah 2016-2020</b>	<b>Jangka Panjang 2016-2036</b>	<b>Output</b>	<b>SKPD Penanggung Jawab</b>
Program Pembinaan Pembangunan Gedung dan Lingkungan	Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan dan lingkungan	✓	✓	✓	Kegiatan partisipatif guna mendorong termaksimalkannya ruang publik	Dinas PU
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Pembangunan sentra produksi unggulan daerah dan UMKM	✓	✓		Adanya sentra produk lokal, perdagangan, jasa dan UMKM	Dinas Koperindag
Program Pengembangan Kelembagaan Penelitian Daerah meningkatnya koordinasi kelembagaan riset unggulan daerah	Melakukan penelitian dan kajian terkait produk unggulan daerah	✓	✓	✓	Adanya hasil penelitian dan kajian terkait produk unggulan daerah	Bappeda
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Kegiatan peningkatan dan pengembangan ekspor.	✓	✓	✓	Meningkatnya ekspor hasil perdagangan	Dinas Koperindag
Program kajian Perencanaan	Melakukan kajian dan rekomendasi	✓	✓	✓	Adanya kebijakan pengembangan dan	Bappeda

Program	Kegiatan	Jangka Pendek 2016	Jangka Menengah 2016-2020	Jangka Panjang 2016-2036	Output	SKPD Penanggung Jawab
&Kebijakan Pembangunan daerah	terkait kebijakan pengembangan dan pemanfaatan wilayah				pemanfaatan wilayah berdasarkan prioritas SIDA dan RTRW	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	promosi dan kerjasama investasi terkait SIDA (Vitra)	✓	✓	✓	Adanya promosi dan kerjasama penunjang Vitra	Bappeda
Program optimalisasi dan pemasaran produksi perikanan	Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	✓	✓	✓	Meningkatnya hasil produksi perikanan daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan	Peningkatan pemasaran hasil pertanian	✓	✓	✓	Meningkatnya pemasaran hasil pertanian	Dinas pertanian

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jangka Pendek 2016</b>	<b>Jangka Menengah 2016-2020</b>	<b>Jangka Panjang 2016-2036</b>	<b>Output</b>	<b>SKPD Penanggung Jawab</b>
Program pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata	Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata	✓	✓	✓	Jumlah wisatawan yang berkunjung meningkat	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi yang terintegrasi dengan sektor unggulan daerah dan inovasi daerah	✓	✓	✓	Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi yang integratif	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
program pengembangan destinasi pariwisata	Pengembangan lokasi wisata yang terintegrasi dengan lokasi sentra unggulan daerah	✓	✓		Adanya jaringan antara lokasi wisata dengan sentra unggulan daerah	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata

